

**ISU PEMIMPIN PEREMPUAN MUSLIMAH DALAM FRAMING MEDIA
DARING REPUBLIKA
(Analisis Framing Robert N. Entman)**

Tesis

OLEH
ALİYATUR RUTBAH
NIM 16751001



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ISU PEMIMPIN PEREMPUAN MUSLIMAH DALAM FRAMING MEDIA
DARING REPUBLIKA
(Analisis Framing Robert N. Entman)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

OLEH
ALİYATUR RUTBAH
NIM 16751001

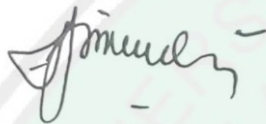
**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Isu Pemimpin Perempuan Muslimah dalam Framing Media Daring Republika (Analisi Framing Robert N. Entman)”. Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 06 Juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M. Ag
NIP 19600910 198903 2 001

Malang, 06 Juni 2021

Pembimbing II



Drs. H. Basri Zain, MA, Ph.D
NIP 19681231 199403 1 002

Malang, 06 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam



Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.
NIP 19731212 199803 01 008




LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Isu Pemimpin Perempuan Muslimah dalam *Framing* Media Daring Republika (Analisis *Framing* Robert N. Entman)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 14 Januari 2020.

Dewan Penguji,


(Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.)
NIP 19731212 199803 01 008 Ketua


(Dr. H. Helmi Syaifudin, M.Fil.I)
NIP 19670720 200003 1 001 Penguji Utama


(Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag)
NIP 19600910 198903 2 001 Pembimbing I


(Drs. H. Basri, M.A, Ph.D)
NIP 19681231 199403 1 002 Pembimbing II



Prof. Dr. Lili Sumbulah, M.Ag.
NIP 19740826 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aliyatur Rutbah
NIM : 16751001
Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam
Judul Tesis : Isu Pemimpinan Perempuan Muslimah dalam
'Framing' Media Daring Republika (Analisis
Framing Robert N. Entman).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 06 Juni 2021

Hormat saya



Aliyatur Rutbah
16751001

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi, Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. dan Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Drs. H. Basri Zain, MA, Ph.D. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Ibu Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. sekeluarga yang telah mengajari penulis banyak hal selama penulis kuliah dan tinggal di Malang.

8. Semua staff dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
9. Orang tua tercinta dan terkasih penulis, ayahanda H. Shohih, ibunda Hj. Rohmah, yang telah sabar dan ikhlas memberikan cinta, kasih sayang yang tak ternilai, serta do'anya kepada penulis.
10. Saudara penulis, kakak tercinta H. Ubed dan keluarganya, adik tercinta Moh. Sulthon Arobi dan Nila Faza Fiddaroin, terimakasih sudah sabar membimbing dan menemani penulis disaat suka maupun duka.
11. Teman-teman SIAI angkatan 2016, terima kasih atas kebaikan dan juga ilmunya, kalian adalah keluarga kedua saya di Malang. Khususnya Mba Anti, terimakasih banyak sudah sabar membimbing dan mengajari penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga buat Mba Widi, teman seperjuangan tesis, terimakasih banyak karena dengan sabar terus memberi semangat dan motifasi bagi penulis. Semoga kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amiiin...

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amiin.

Malang, 06 Juni 2021

Penulis,

Aliyatur Rutbah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Motto	xii
Abstrak	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Penelitian	12
F. Orisinalitas Penelitian	13
G. Definisi Istilah	20
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Media Massa	22
1. Media Daring	24
a. Republika Online (ROL)	27
b. Latar Belakang Berdirinya	28
c. Segmentasi dan Karakteristik Isi	30

d. Visi dan Misi Surat Kabar Republika	31
B. Analisis Framing	33
1. Fakta/ Peristiwa adalah Hasil Konstruksi	34
2. Media adalah Agen Konstruksi	34
3. Berita Bukan Refleksi dari Realitas, Ia Hanyalah Konstruksi dari Realitas	35
C. Analisis Framing Robert N.Entman.....	39
1. Perangkat Framing	40
a. Seleksi Isu	42
1) <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah)	42
2) <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	43
3) <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Pilihan Moral)	43
4) <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	43
b. Penonjolan Isu	44
2. Efek Framing	46
D. Perempuan dan Media Massa	47
E. Pemimpin Perempuan	49
1. Argumentasi Teologis Kepemimpinan Perempuan	51
2. Hak-Hak Politik Perempuan	64
3. Partisipasi Perempuan dalam Politik	66
F. Kerangka Berfikir	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	71
B. Data dan Sumber Data Penelitian	72
C. Teknik Pengumpulan Data	73
1. Teknik Simak Bebas Libat Cakap	74

2. Teknik Catat	74
D. Analisis Data	75
1. <i>Problem Identification</i> (Identifikasi masalah)	75
2. <i>Diagnose Causes</i> (<i>Memperkirakan Penyebab Masalah</i>)....	75
3. <i>Moral Evaluation</i> (<i>Evaluasi Moral</i>)	76
4. <i>Treatment Recommendation</i> (<i>Menekankan Penyelesaian</i>)....	76
E. Langkah-langkah Analisis Data	77
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	78
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	79
3. Kesimpulan (<i>Concluding Drawing/Verification</i>).....	79

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Seleksi Isu pada Berita yang Berhubungan dengan “Kepemimpinan Perempuan” di Media Daring Republika	84
B. Analisis Penonjolan Isu pada Berita yang Berhubungan dengan “Kepemimpinan Perempuan” di Media Daring Republika	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	18
2.1	Framing Robert N. Entman	41
2.2	Empat elemen <i>Framing</i> Robert N. Entman	44
4.1	Rekapitulasi Judul-judul Berita “kepemimpinan perempuan” yang dipublikasikan media daring Republika	84
4.1.2	Latar Belakang Berita I.....	85
4.1.3	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita I.....	89
4.1.4	Latar Belakang Berita II	89
4.1.5	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita II	92
4.1.6	Latar Belakang Berita III	92
4.1.7	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita III.....	94
4.1.8	Latar Belakang Berita IV.....	95
4.1.9	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita IV	98
4.1.10	Latar Belakang Berita V	98
4.1.11	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita V	102
4.1.12	Latar Belakang Berita VI	103
4.1.13	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita VI	106
4.1.14	Latar Belakang Berita VII	106
4.1.15	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita VII	109
4.1.16	Latar Belakang Berita VIII	110
4.1.17	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita VIII	114
4.1.18	Latar Belakang Berita IX.....	115
4.1.19	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita IX	119
4.1.20	Latar Belakang Berita X	119
4.1.21	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita X	122
4.1.22	Latar Belakang Berita XI	122
4.1.23	Analisis Framing Robert N. Entman pada Berita XI	124

DAFTAR GAMBAR

2,1	Kerangka Berfikir	70
3,1	Teknik Framing Robert N. Entman	76
3,2	Analisis Interaktif Miles dan Huberman	78



MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. AT-Taubah {9}:71)

“Laki-laki dan Perempuan bukanlah Malaikat yang selalu benar, atau Iblis yang selalu salah. Tetapi, keduanya adalah manusia utuh dengan potensi akal budi yang bisa berkembang untuk kebaikan masyarakat.”

(Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 2019)

ABSTRAK

Rutbah, Aliyatur. 2019. *Isu Pemimpin Perempuan Muslimah dalam 'Framing' Media Daring Republika (Analisis Framing Robert N. Entman)*. Tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah, M. Ag. (II) Drs. H. Basri Zain, MA, Ph.D.

Kata Kunci: Isu Gender, Hukum Islam, Media Daring, Analisis *Framing*

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini, media daring bisa menjadi alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi, meyakinkan bahkan membentuk suatu opini terkait isu-isu tertentu, misalnya isu gender. Diangkatnya “isu pemimpin perempuan” oleh media daring Republika menjadi tanda kalau isu gender tersebut masih ramai diperbincangkan dan diperdebatkan dikalangan masyarakat, terutama masyarakat muslim. Dengan menggunakan Analisis *Framing* perspektif Entman, penelitian ini akan berusaha memahami pendapat para ulama terkait isu gender yang disajikan oleh media daring Republika. Sekaligus juga bisa mengetahui bagaimana sudut pandang yang digunakan media daring Republika dalam membingkai isu pemimpin perempuan tersebut. Melihat fenomena di atas, kiranya peneliti mengambil dua fokus penelitian, yaitu: (1) seleksi isu (pemilihan fakta) dan (2) penonjolan isu (penulisan fakta) berita-berita yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan.

Untuk menjawab fokus penelitian di atas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode simak yang diikuti teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman (seleksi isu dan penonjolan isu). Serta mengikuti langkah-langkah interaktif (*interactive*) yang digagas oleh Miles dan Huberman selama proses menganalisis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Seleksi isu (pemilihan fakta) pada berita-berita di atas dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dan *kedua*, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Kedua fakta tersebut dikemas kedalam bingkai hukum, lebih khusus hukum dalam koridor Agama Islam oleh media daring Republika. 2) Cara yang digunakan untuk menonjolkan penulisan fakta *pertama* ini, disajikan dengan menuliskan dalil-dalil *naş* –al-Quran surat an-Nisa’ ayat 34 dan hadis Abu bakrah–. *Kedua*, disajikan media daring Republika dengan menuliskan dalil *naş* al-Quran yang membolehkan, seperti firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97, kemudian ada fakta-fakta sejarah, seperti kisah-kisah kesuksesan para pemimpin perempuan dalam memimpin wilayah kekuasaannya, serta menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga Islam guna mendorong para perempuan untuk mau ikut aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat.

ABSTRACT

Rutbah, Aliyatur. 2019. *Issue of Muslim Women Leader in Republika Online Media (Framing Robert N. Entman)*. Thesis, Islamic Studies Program, Postgraduate, Islamic State of Maulana Malik Ibrahim Malang University. Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah, M. Ag. (II) Drs. H. Basri Zain, MA, Ph.D.

Keywords: Gender Issues, Islamic Law, Online Media, Framing Analysis

In the current era of globalization and technological advancements, mass media, especially online media can be the most powerful tool to influence, convince and even form an opinion regarding the news issues presented. The appointment of the "women leader issue" by Republika online media is a sign that the gender issue is still an issue that is often discussed and debated among the public, especially Muslim communities. By using the Entman Framing Analysis approach, it will help researchers understand the opinions of the ulama regarding the "women leader issue" presented by Republika online media. Besides, it can also find out how the perspective used by Republika online media in framing the issue of women's leadership. See the above phenomenon, presumably, researchers took two formulations of the sub-focus: (1) issue selection (fact selection) and (2) highlighting issues (fact writing) news related to women's leadership.

This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out by the method of listening which was followed by the technique of free and involved incompetent and noted techniques. This research uses Robert N. Entman's framing analysis model (issue selection and issue highlighting).

The results showed that: 1) Selection of the issues (selection of facts) in the news above was divided into two parts, first, women were not allowed to be leaders and second, women were allowed to be leaders. These two facts are packaged into a legal framework, more specifically law in the corridors of the Islamic Religion by Republika online media. 2) The method used to accentuate the writing of this first fact is presented by writing the arguments *naş* - al-Quran surah an-Nisa 'verse 34 and the hadith of Abu Bakrah -. Second, Republika's online media is presented by writing the *naş* al-Quran that allows, like the word of God in verse an-Nahl verse 97, then there are historical facts, such as stories of the success of women leaders in leading their territory, and presenting activities carried out by Islamic institutions to encourage women to want to be actively involved in every activity in the community.

الملخص

الرتبة ، عالية. 2019 قضية رئيسة المرأة المسلمة في "إطار" وسائل الإعلام الإلكترونية جمهورية (إطار التحليل روبرت ن. إيمان). قسم الدراسة الإسلامية. كلية الماجستير للدراسات الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة الأول: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة، الماجستير، المشرف الثاني: الدكتور الحاج بصري زين، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: قضايا الجنسين، الشريعة الإسلامية، وسائل الإعلام الإلكترونية، إطار التحليل

وفي عصر العولمة والتقدم التكنولوجي اليوم، يمكن لوسائل الإعلام الإلكترونية أن تكون أقوى أداء للتأثير والتأكيد بل التشكيل الآراء المتعلقة بالقضية المعنية. تحميل "قضية رئيسة المرأة" في وسائل الإعلام الإلكترونية Republika دليل على أنها منتشرة وسط المجتمع خاصة المسلمين. باستخدام إطار التحليل لإيمان، يكون هذا البحث أن يفهم آراء العلماء المتعلقة بـ "قضية رئيسة المرأة المسلمة" التي قدمتها وسائل الإعلام الإلكترونية Republika. ويكون أيضا أن يعرف كيف أن زاوية الرؤية المستخدمة في وسائل الإعلام الإلكترونية لأن تطير قضية رئيسة المرأة. وفقا للظاهرة السابقة تأخذ الباحثة الأمرين المتركين، هما: (1) اختيار القضية (الحقيقة) و (2) إبراز القضية (كتابة الحقيقة) في الأخبار المتعلقة برئيسة المرأة.

ولإجابة تركيز البحث السابق، تستخدم الباحثة المدخل الكيفي الوصفي. وجمع البيانات تستخدم الباحثة على الطريقة السعوية التحريرية. وتحليل البيانات تستخدم على إطار التحليل لروبرت ن. إيمان (اختيار القضية وإبرازها) وتتبع إلى الطريقة التفاعلية لمايلس وهوبرمان.

ونتائج هذا البحث تدل أن: (1) يكون اختيار القضية (الحقيقة) في الأخبار السابقة نوعين: أولاً، تكون المرأة غير مسموحة لأداء الرياسة. ثانياً، تكون المرأة مسموحة لأداء الرياسة. هتان الحقيقتان معبائتان في الإطار القانوني، خاصة القانون الإسلامي من قبل وسائل الإعلام الإلكترونية Republika. (2) وتكون الطريقة لإبراز الكتابة عن الحقيقة هي: الأولى مع تقديم الأدلة النقلية أي القرآن سورة النساء آية 34 والحديث من أبو بكر. الثانية، تحميل وسائل الإعلام الإلكترونية Republika مع تقديم الأدلة التي تسمحها مثلما قاله الله تعالى في القرآن سورة النحل 97، والحقائق التاريخية مثل خبرات نجاح الرياسة للمرأة في ولايتها، وتقديم أيضا الأنشطة التي تكون في المؤسسات الإسلاميه لتشجيع المرأة كي تشترك في كل النشاط الاجتماعي فعالا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Quran yang menjadi sumber pokok hukum Islam, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Ia juga menyatakan bahwa Nabi Saw., diutus ke dunia untuk membagikan rahmat ke seluruh alam semesta. Cita-cita al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal.¹

Ibn Qayyim setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks suci al-Quran maupun sunnah Nabi Saw., akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan dibangunnya syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia secara universal, seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Secara lebih khusus, Ramadhan al-Buṭi dengan mengesankan telah merumuskan kemaslahatan, sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*². Ia mengatakan:

“Kemaslahatan adalah menjaga atau memelihara tujuan *syariah*, diantara tujuan *syariah* yang berhubungan dengan manusia ada lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, *naṣab* (keturunan) dan harta. Maka setiap tindakan yang mencerminkan pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut disebut dengan *maṣlahah*, dan setiap tindakan yang menafikan lima pokok dasar tersebut disebut dengan *mafsadat*.”

¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. (Cet.II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 272.

²Muhammad Sya'id Ramadhan al-Buṭi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: *Mu'assasah al-Risalah*, 1973), 15.

Pernyataan di atas sejalan dengan al-Ghazali, dengan penekanan pada urutan yang dimaksud dari lima penjagaan tersebut.³ Dari sini, baik al-Buti maupun al-Ghazali, sepakat bahwa agama Islam berkomitmen terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal. Pada dimensi ini, agama selalu hadir dalam bentuknya yang adil, merahmati, egaliter, dan demokrasi. Hal ini juga berarti bahwa agama Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat. Oleh karena itu, sistem keagamaan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya –ras, agama, etnis, dan gender– tidak memiliki relevansi dengan Islam dan harus ditolak. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan ini sekali lagi merupakan ruh dari seluruh aktivitas kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Dalam Islam yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebajikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal.⁵ Pemahaman tersebut sudah jelas disebutkan dalam firman Allah surat al-Hujurat (49): 13, yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Meski pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dan hak asasi manusia telah menjadi komitmen seluruh kaum muslimin. Namun, realitanya sampai

³Abbas Arfan, Masalah dan Batasan-batasan menurut al-Buti, “*de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Juni, 2013), 91.

⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 274-275.

⁵Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Pustaka Obor: Jakarta: 2017), 3.

⁶Al-Quran, al-Hujurat, 49: 13.

sekarang ide-ide egalitarian dalam al-Qur'an dan hadist-hadist nabi SAW masih sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias. Dengan memposisikan perempuan sebagai *the second class*. Sebut saja pada persoalan-persoalan yang lebih khusus, persoalan partikular. Misalnya, dalam hal perempuan di sektor publik/politik, dan secara lebih khusus untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.⁷ Yang mana persoalan tersebut melahirkan pro-kontra yang sangat luar biasa, bahwa perempuan kurang dan bahkan tidak dapat memainkan peran independen dalam tataran publik tersebut.

Dalam pandangan mayoritas ahli fiqh konservatif selama ini, peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, berbeda jika arti politik praktis yang didalamnya memerlukan pengambilan keputusan mengikat yang menyangkut masyarakat luas, seperti menjadi seorang hakim, masuk pada lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, kebanyakan ulama Islam sepakat antara laki-laki dan perempuan tidak bisa diberlakukan secara sama. Sebagaimana kutipan dari fatwa yang dikeluarkan Universitas al-Azhar (1952) dalam Husein, menyebutkan:⁸

Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Adapun kekuasaan umum yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah kekuasaan memutuskan/memaksa dalam urusan-urusan kemasyarakatan, seperti kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif).

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 275.

⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 275-276.

Kalau dilihat kembali sejarahnya, posisi perempuan masih belum beruntung, terutama sebelum Islam datang. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, keadaan dan kondisi kaum perempuan tersebut jauh berbeda, Nabi mengangkat derajat kaum perempuan yang diperlakukan tak manusiawi di zaman jahiliyah (Pra-Islam).⁹ Sebagaimana dalam salah satu tulisannya, Syahrur mengungkapkan bahwa, “Pada hakikatnya, hak terlibat dalam aktivitas politik adalah hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada kaum perempuan. Lebih jelasnya, dalam usahanya untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu sistem patriarki yang tumbuh subur pada masa tersebut dan masa-masa sebelumnya, Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak politik tersebut, atau dengan kata lain, perempuan memiliki hak dan kemampuan yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik”.¹⁰

Namun sayang, dalam perjalanan sejarah Islam, partisipasi perempuan yang sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah tersebut mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Dampaknya, ruang aktivitas perempuan hanya dibatasi pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat¹¹ dalam kehidupan sehari-hari. Pembatasan-pembatasan tersebut tidak hanya terdeteksi dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga menyebar dalam realita

⁹Hafids Muftisany, “Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?,” *Republika*, Jumat, 19 Desember 2014, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz36-wanita-menduduki-jabatan-publik-bolehkah>

¹⁰Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar hermenutika Hukum Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, (Cet. I; Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), 276.

¹¹Posisi subordinat sendiri adalah cara pandang yang menempatkan perempuan di posisi kedua (*inferior*) dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut bisa dijumpai dalam ranah domestik, misal di keluarga dan juga bisa publik, misal di lingkungan masyarakat, ruang kerja, politik, dsb.

sosial.¹² Maka bukan sesuatu yang aneh, jika kita kesulitan menemukan literatur-literatur tentang pandangan Islam klasik yang memberikan hak-hak bagi perempuan, terutama hak untuk menjadi seorang pemimpin.

Sebaliknya, kita akan menemukan pandangan-pandangan ulama klasik yang melarang perempuan menjadi pemimpin, lebih khusus di ranah publik. Misalnya hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang berbunyi:

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Bahwasannya “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.”¹³ Namun, setelah dikaji ulang oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Fathimah Mernessi; hadits tersebut mengandung beberapa keganjilan dari sanad dan juga matan. Bahkan, hadits tersebut juga bertentangan dengan ayat suci al-Quran surat an-Naml (27): 23-25 yang mengisahkan tentang kesuksesan Ratu Saba’ (Ratu Bilqis) ketika memimpin negaranya. Berikut ayatnya:¹⁴

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبُّهُمْ الشَّيْطَانُ أَغْمَاهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

¹²Husein Muhammad dalam tulisannya, mengemukakan bahwa ada beberapa alasan pemasangan terhadap aktivitas perempuan di ranah publik, di antaranya karena perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang, dan kehadiran mereka di tempat umum juga dipandang sebagai sumber godaan; dalam bahasa Arab disebut “fitnah”. Pandangan-pandangan yang bersifat tendesius tersebut, sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yaitu al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw., yang dibaca secara harfiah dan stagnan. Dalam kurun waktu yang panjang, pandangan-pandangan interpretatif yang deskriminatif tersebut diterima dan diyakini secara luas bahkan sebagian kaum muslimin abad 20 ini. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa perempuan tidak akan mampu menjalankan tugas-tugas politik yang berat itu, karena akal dan tenaganya yang lemah. Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*. (Cet. II; Yogyakarta: Lkis, 2007), 167-169.

¹³HR. Bukhori No. 4073.

¹⁴Al-Quran, an-Naml, 27: 23-25.

فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

Dalam sejarah Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak, ditemukan banyak perempuan yang sukses menjadi pemimpin. Misalnya Di Aceh, diantara perempuan yang pernah menjadi pemimpinan adalah Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah (1641-1675); Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678); Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah (1678-1688); dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Di Jawa, pemimpin perempuan yang terkenal adalah Ratu Kalinyamat, Ratu Pakubuwono I atau yang disebut juga dengan Ratu Amardika. Di Sumatera Barat ada Rasuna Said, Rahmah el Yunussiah (pemimpin dalam pendidikan) dan Roehana Kudus (pemimpin surat kabar). Dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan lokal yang tidak tertulis dalam catatan sejarah.¹⁵

Dewasa ini, selain karena pemahaman agama yang salah, berbekal budaya patriarki, sampai pembagian peran gender yang tidak adil di masyarakat. Bukah hal yang tidak mungkin, jika media massa juga turut berkontribusi dalam memahami masyarakat terkait isu-isu gender yang berkembang saat ini. hubungan antara media massa dengan isu gender ini seperti dua sisi mata uang, di satu sisi media massa bisa menjadi wadah dalam melestarikan ketidakadilan gender, dan di sisi yang lain media massa mampu menjadi wadah atau instrumen melestarikan keadilan gender, terutama untuk para perempuan.¹⁶

¹⁵Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, 9 dan 21.

¹⁶Sebagai wadah ketidakadilan gender, misalnya pada berita-berita pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan TKW, dan lain sebagainya, yang mana berita-berita

Seiring perkembangan teknologi dan arus informasi yang deras, membuat layanan media bergerak ke arah dinamis dalam menyajikan pemberitaannya. Salah satunya dengan menggunakan media daring (media online)¹⁷. Media massa *Republika* yang merupakan salah satu media massa terbesar di Indonesia, juga turut hadir dalam format media daring atau media yang berbasis internet, atau dikenal dengan sebutan *Republika.co.id* (*Republika online/ROL*). Sebagai media massa atau surat kabar komunitas Islam, *Republika Online* berusaha menampilkannya melalui tulisan-tulisan berita dari sisi Islam atau Islam yang kosmopolitan.

Dalam paradigma konstruksionis, media tidak semata dipandang sebagai saluran yang netral. Tapi, media dipandang sebagai agen konstruksi. Dalam paradigma ini, media juga merupakan subjek yang ikut mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya, atau media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.¹⁸ Hal tersebut senada dengan pandangan yang meyakini bahwa media massa berdiri di tengah-tengah realitas yang sarat akan konflik dan kepentingan; baik dari dalam

tersebut sering disajikan dengan bahasa-bahasa berita yang menyudutkan bahkan melecehkan kaum perempuan. Sedangkan media massa sebagai wadah keadilan gender, biasanya dilakukan media massa dengan mempublikasikan berita-berita kesuksesan perempuan di ranah publik, kemudian mempublikasikan berbagai kegiatan dari lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Dan lain sebagainya.

¹⁷Dalam konteks media massa Indonesia, sekitar tahun 2010-2014 media massa mengalami perubahan yang cukup besar. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa, masyarakat mengalami perubahan tren dalam mengakses berita, dari metode konvensional (koran, radio, televisi) beralih menjadi digital pada situs-situs berita daring. Nampaknya, data dari AJI ini sejalan dengan data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tentang penetrasi pengguna internet yang mencapai 143,26 juta jiwa dari jumlah total penduduk 262 juta orang atau sekitar 54,68%, dengan pencarian berita dalam bidang politik sekitar 36,94%. Lihat di laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, <https://apjii.or.id/survei2017>, diakses pada tanggal 24 September 2018.

¹⁸Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Cet. II; Yogyakarta: Lkis 2004), 22-23.

maupun luar media massa, tak terkecuali media massa Republika. Oleh karena itu, wajar jika dikatakan kalau media massa bukanlah saluran yang netral (bebas nilai) terhadap suatu isu tertentu.

Misalnya, berita nasional tentang penolakan sejumlah ormas Islam di Jabar atas keikutsertaan perempuan di pilkada Jabar. Pemberitaan tersebut diberi judul “Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada.”¹⁹ Kalau peristiwa tersebut didefinisikan sebagai jihad para sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ), tentu saja realitas yang hadir tidak menguntungkan Netty Prasetiyani Heryawan sebagai salah satu kandidat calon kepala daerah Jawa Barat yang dimaksud ormas tersebut. Sebaliknya, kalau peristiwa itu dipahami sebagai bentuk usaha media Republika untuk menunjukkan bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi para perempuan yang ingin ikut terlibat aktif di ranah publik, maka realitas yang hadir menguntungkan Netty Prasetiyani Heryawan yang diposisikan sebagai korban.

Dalam berita tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang yang dipahami dan dipilih media massa dalam memberitakan suatu permasalahan (isu) sangat penting, media massa berada pada posisi yang mampu mengkonstruksi realitas, yang pada akhirnya dikonsumsi oleh khalayak. Pertanyaannya, dengan cara apa media massa mengkonstruksi realitas? yakni dengan media memilih mana realitas yang diambil dan mana yang tidak diambil (seleksi isu) dan juga mana realitas yang ditonjolkan dan mana yang tidak (penonjolan isu).

¹⁹Bilal Ramadhan, “Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada,” Republika, Selasa 30 May 2017, 06:58 WIB. Lihat pada <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/30/oqgitw330-ini-alasan-13-ormas-islam-jabar-tolak-calon-perempuan-di-pilkada>

Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah dikemukakan di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan dan lebih mendalam terutama kajian tentang isu gender, lebih khusus isu pemimpin perempuan yang sampai saat ini masih menjadi pro-kontra di sejumlah masyarakat, terutama dikalangan ulama (tokoh Agama Islam). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengulas secara mendalam berita-berita di media daring Republika yang berhubungan dengan kajian pemimpin perempuan, sekaligus mengetahui bagaimana media daring Republika membingkai berita-berita tersebut. Dengan analisis framing Robert N. Entman, peneliti di sini akan meneliti bagaimana media daring Republika dalam menyeleksi isu (memilih fakta) dan menonjolkan isu (menulis fakta) terkait berita-berita pemimpin perempuan. Di sini, peneliti mengambil judul, “Isu pemimpin Perempuan dalam ‘Framing’ Media Daring Republika,” dengan model analisis framing model Robert N. Entman, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sudut pandang yang digunakan media daring Republika dalam membingkai isu gender tersebut.

B. Fokus Penelitian

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah berita-berita yang berhubungan dengan isu gender, lebih khusus pemimpin perempuan muslimah yang dipublikasikan oleh Media Daring Republika. Untuk mengulas secara mendalam dan terarah bagaimana pemberitaan tersebut dibingkai oleh media daring Republika, maka masalah pokok tersebut dirinci menjadi sub-pokok masalah di bawah ini:

1. Bagaimana media daring Republika menyeleksi isu (memilih fakta) berita-berita yang berhubungan dengan pemimpin perempuan muslimah?
2. Bagaimana media daring Republika menonjolkan isu (menulis fakta) berita-berita yang berhubungan dengan pemimpin perempuan muslimah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana media daring Republika menyeleksi isu (memilih fakta) berita-berita yang berhubungan dengan pemimpin perempuan muslimah?
2. Untuk mengetahui bagaimana media daring Republika menonjolkan isu (menulis fakta) berita-berita yang berhubungan dengan pemimpin perempuan muslimah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian tesis ini diuraikan menjadi dua bagian: *Pertama* manfaat teoritis (akademis), dan *kedua* manfaat praktis. Sebagaimana pemaparan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis (akademik):

Penelitian ini diharap mampu memperkaya dan mengembangkan khazanah keilmuan studi Islam, terutama yang berkaitan dengan kajian kebahasaan dan gender, misalnya isu pemimpin perempuan muslimah di ranah publik. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam, peneliti di sini mencoba menganalisisnya di media daring Islam “Republika Online (ROL)” dengan analisis bahasa, lebih khusus *analisis framing* model Robert N. Entman.

Manfaat Analisis *framing* Entman ini dapat digunakan untuk mengetahui, *pertama* bagaimana media daring Republika dalam menyeleksi isu (memilih fakta), terutama yang berkaitan dengan isu pemimpin perempuan muslimah di ranah publik. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan empat skema Entman; *Problem Identification, Causal Interpretation, Moral Evaluation, Treatment Recommendation*. Dan *kedua*, bagaimana cara media daring Republika dalam menulis fakta (menonjolkan isu) terutama yang berkaitan dengan isu pemimpin perempuan muslimah di ranah publik. Yang pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah cermin bagi khalayak atau pembaca, agar dapat lebih kritis dalam menyikapi sebuah isu yang diberitakan oleh media massa, sehingga tidak serta merta menerima

begitu saja berita yang disajikan oleh media massa tanpa adanya klarifikasi/pengecekan kebenarannya, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan.

Dengan begitu, harapannya mampu memahami *hidden* wacana dalam arena media, dan pada akhirnya tidak selalu menjadi korban media massa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sedikit pelajaran bagi masyarakat, terutama para pelaku media dalam memahami hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan; baik dalam ranah domestik maupun publik. Karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan juga dipilih.

E. Batasan Penelitian

Tema yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah seputar isu perempuan yang akan lebih fokus pada “pemimpin perempuan muslimah”. Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *analisis framing* model Robert N. Entman. Model analisis ini biasa digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana proses media dalam membingkai sebuah isu sosial, dengan cara menyeleksi dan menonjolkan suatu aspek tertentu.

Subyek penelitian bersumber dari portal media daring, lebih khusus lagi Republika online. Karena isu gender terkait pemimpin perempuan muslimah tidak terbit setiap hari di media Republika, maka peneliti di sini akan lebih fokus pada berita-berita, yang masuk pada kategori rubrik khazanah dan kolom, kedua rubrik tersebut merupakan rubrik yang disajikan Republika sebagai wadah bagi para

pengamat atau peneliti tentang suatu isu tertentu. Dalam konteks ini, peneliti akan lebih fokus pada tulisan-tulisan yang bertema gender, lebih khusus tentang pemimpin perempuan muslimah di ranah publik.

F. Orisinalitas Penelitian

Sub bab ini memberikan ruang kepada peneliti untuk melihat hasil karya ilmiah, baik berupa buku, artikel, jurnal dan lain-lain sebagai sumber rujukan yang memiliki kontribusi bagi tesis ini. Penelitian terdahulu juga dapat merangsang untuk menemukan tema baru. Dari sub bab ini, peneliti dapat menemukan *research gaps* untuk menentukan kelayakan penelitian dari tema yang diangkat. Berikut beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tesis, sekaligus perbedaannya, bagian ini akan dipaparkan peneliti dalam bentuk deskripsi dan tabel, di antaranya:

1. Amalia Djuwita, “Politisi Perempuan dalam Bingkai Media (Analisis *Framing* Robert Entman atas Pemberitaan Politisi Perempuan di Media Cetak)”.²⁰

Permasalahan yang ditekankan dalam jurnal ini adalah isu-isu tentang perempuan dan politik, lebih khusus tentang para politisi perempuan yang sedang terjerat kasus korupsi.

Dalam penelitiannya, Amalia memakai analisis framing model Robert Entman. Penelitian Amalia tersebut bertujuan untuk mengetahui

²⁰Amalia Djuwita, “Politisi Perempuan dalam Bingkai Media (Analisis *Framing* Robert Entan atas Pemberitaan Politisi Perempuan di Media Cetak)”. *Channel*, 1 (April 2018).

bagaimana kekuatan media dalam membentuk opini publik, khususnya pemberitaan yang berhubungan isu perempuan misalnya kasus korupsi yang menjerat para politisi perempuan. Melalui model framing Entman ini, peneliti menemukan fakta bahwa dari sekian banyak pembingkai berita korupsi, politisi perempuan mendapat porsi yang lebih atau menonjol dibanding berita korupsi para politisi laki-laki.

2. Ardhina Pratiwi, “Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Rrobert N. Entman)”.²¹

Dalam penelitiannya, Ardhina memakai analisis framing model Robert Entman. Tujuan Ardhina dalam penelitiannya adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Republika dan BBC News memberitakan tentang LGBT. Dengan analisis framing model Entman ini, peneliti menemukan fakta bahwa keduanya sama-sama memberitakan tentang LGBT, namun cara pembingkai berita berbeda, Republika selalu mengedapankan ideologi agama Islam sedangkan BBC News mengupas isu tersebut dengan netral tanpa menghubungkannya dengan agama.

3. Yurike Fitriana, “Pemimpin Perempuan dalam Media (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk pada Pemberitaan Sosok Tri Risma Harini di Liputan 6 SCTV pada Bulan Februari 2014.”²²

²¹Ardhina Pratiwi, “Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis *Framing* Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Rrobert N. Entman)”. *Thaqafiyat*, 1 (Juni 2018).

Fitriani dalam penelitiannya lebih fokus pada bagaimana media massa “SCTV” mengkonstruksi pemberitaan pemimpin atau politikus perempuan, Tri Risma Harini. Penelitian ini berangkat dari paradigma kritis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Teun Van Dijk; yang meyakini bahwa teks-teks berita bukanlah cerminan realitas yang sesungguhnya, melainkan bentuk kekuasaan simbolik demi kepentingan kelompok tertentu.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konstruksi politikus atas Risma Harini di media massa, dominan dikaitkan dengan wacana dominan atau pengetahuan-pengetahuan yang ada dimasyarakat terkait stereotip perempuan (dalam politik dan dan juga gender). Dengan kata lain, Risma dikaitkan dengan subjektivitasnya sebagai seorang perempuan dan juga tugas domestik sebagai seorang ibu.

4. Glandy Burnama, “Stereotyping Risma: Pembingkai Sosok Tri Rismaharini di Majalah Detik dan Tempo”.²³

Burnama dalam penelitiannya memakai analisis framing model Pam-Kosicki dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana media massa memberitakan atau membingkai berita terkait sosok pemimpin perempuan Surabaya, yakni Tri Rismaharini (Walikota Surabaya). Dengan model analisis framing, ditemukan masih adanya stereotip gender pada berita yang

²²Yurike Fitriana, *Pemimpin Perempuan dalam Media (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk pada Pemberitaan Sosok Tri Risma Harini di Liputan 6 SCTV pada Bulan Februari 2014)*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

²³Glandy Burnama, dkk. “Stereotyping Risma: Pembingkai Sosok Tri Rismaharini di Majalah Detik dan Tempo”. *Scriptura*, 1 (Juli 2014)

berkaitan dengan pemimpin Surabaya tersebut, seperti feminim, domestik, emosional, dan tidak memiliki kemampuan politik

5. Reni Octarianty, “Analisis *Framing* terhadap Pemberitaan Pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jawa Timur 2013”.²⁴

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah terkait media massa, lebih khusus media daring (*online*) ketika membingkai sebuah isu politik, dalam konteks ini adalah peristiwa yang dialami oleh pasangan calon Gubernur Jawa Timur; Khofifah-Herman yang sebelumnya pernah gagal dalam pilgub Jawa Timur 2013. Penelitian ini fokus pada empat media daring, di antaranya detik.com, kompas.com, viva.co.id, dan okezone.com. Reni memakai analisis *framing* model Pan-Kosicki (Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris) sebagai pisau analisisnya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa berita yang ditulis keempat media online tersebut telah membingkai pasangan cagub Jatim Khofifah-Herman sebagai pasangan yang memang tidak pantas lolos dalam pilihan gubernur Jawa Timur 2013.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini akan dipaparkan di bawah ini:

1. Pada penelitian *pertama*, sumber penelitian atau subyek penelitian berasal dari media cetak secara umum, sedangkan penelitian sekarang subyek penelitiannya bersumber dari media daring, lebih khusus media daring Republika. Antara penelitian pertama dengan yang sekarang sama-sama berhubungan dengan

²⁴Reni Octarianty, “Analisis *Framing* terhadap Pemberitaan Pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jawa Timur 2013”. *E-Komunikasi*, 1 (Tahun 2015).

isu gender, namun pada penelitian pertama permasalahan yang ditekankan terkait politisi perempuan yang sedang terjerat kasus korupsi, sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan pada isu kepemimpinan perempuan muslimah di ranah publik yang sampai saat ini masih menemukan pro dan kontra baik dari kalangan masyarakat umum maupun para tokoh agama Islam.

2. Pada penelitian *kedua*, subyek penelitiannya adalah dua media daring, yaitu Republika dan BBC News, sedangkan pada penelitian sekarang peneliti lebih memilih untuk fokus pada satu media daring, yaitu Republika. Antara penelitian pertama dengan yang sekarang sama-sama berhubungan dengan isu gender, namun pada penelitian pertama, namun pada penelitian pertama permasalahan yang ditekankan adalah masalah LGBT, sedangkan penelitian sekarang adalah isu pemimpin perempuan muslimah.

3. Pada penelitian *ketiga* ini, subyek penelitian bersumber dari media massa, lebih khusus media televisis SCTV, sedangkan pada penelitian sekarang, sumber penelitian adalah media massa, lebih khusus media daring Republika. Fokus penelitian *ketiga* dengan penelitian sekarang sama, yakni mengangkat permasalahan gender, terutama tentang isu pemimpin perempuan. Meski sama-sama menggunakan analisis bahasa, namun teori analisis yang digunakan berbeda, pada penelitian pertama, peneliti menggunakan analisis wacana kritis, dan pada penelitian sekarang peneliti menggunakan analisis framing.

4. Pada penelitian *keempat*, subyek penelitian bersumber dari dua media massa, yaitu detik dan tempo, sedangkan pada penelitian sekarang subyek penelitiannya bersumber dari sebuah media daring, lebih khusus Republika.

Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan *framing* (pembingkaiian) dalam sebuah berita sebagai alat untuk menganalisis, namun model yang digunakan berbeda, pada penelitian pertama menggunakan analisis framing model Pam-Kosicki, sedangkan penelitian sekarang memakai analisis framing model Robert N. Entman.

5. Pada penelitian *kelima*, peneliti memilih subyek penelitian dari empat media daring (*okezon.com*, *viva.co.id*, *detik.com*, dan *kompas.com*), sedangkan pada penelitian sekarang peneliti lebih memilih untuk fokus pada satu media daring, yaitu Republika. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan *framing* (pembingkaiian) dalam sebuah berita sebagai alat untuk menganalisis, namun model yang dipakai berbeda, pada penelitian pertama memakai analisis framing model Pam-Kosicki, sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Amalia Djuwita, "Politisi Perempuan dalam Bingkai Media (Analisis Framing Robert Entman atas Pemberitaan Politisi Perempuan di Media Cetak)".	-Membahas tentang permasalahan gender, lebih khusus gender perempuan -Subyek penelitian bersumber dari media massa -Teori: Analisis Framing Robert N. Entman	-Menekankan pada masalah politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi	-Teori: Analisis Framing Robert N. Entman -Obyek: wacana kepemimpinan perempuan -subyek penelitian: media daring Republika
2	Ardhina Pratiwi,	-Teori: Analisis Framing Robert	- Menekankan pada	-Teori: Analisis Framing Robert

	“Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Rrobert N. Entman)”. 2018	N. Entman -Subyek penelitian bersumber dari media daring	permasalahan LGBT -Memilih subyek penelitian dari empat media daring (okezon.com, viva.co.id, detik.com, dan kompas.com)	N. Entman -Obyek: wacana kepemimpinan perempuan -subyek penelitian: media daring Republika
3	Yurike Fitriana, “Pemimpin Perempuan dalam Media (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk pada Pemberitaan Sosok Tri Risma Harini di Liputan 6 SCTV pada Bulan Februari 2014. 2015	-Menekankan pada pembahasan gender, terutama masalah kepemimpinan perempuan	-Fokus pada pemberitaan Tri Risma Harini -Subyek penelitik: media televisis SCTV -Teori: Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk	-Teori: Analisis Framing Robert N. Entman -subyek penelitian: media daring Republika
4	Glandy Burnama, “Stereotyping Risma: Pembangkaian Sosok Tri Rismaharini di Majalah Detik dan Tempo”. 2014	-Menekankan pada pembahasan gender, terutama masalah kepemimpinan perempuan -Menggunakan analisis framing	- Fokus pada pemberitaan Tri Risma Harini -Lebih memilih analisis framing model Pam-Kosicki -Subyek penelitian bersumber dari dua media cetak, yaitu Detik dan Tempo	-Teori: Analisis Framing Robert N. Entman -subyek penelitian: media daring Republika
5	Reni Octarianty, “Analisis Framing terhadap Pemberitaan	-Mengangkat isu perempuan dan politik, terutama dalam area eksekutif	- Fokus pada pemberitaan pasangan Khofifah-Herman	-Teori: Analisis Framing Robert N. Entman -Obyek: wacana kepemimpinan

	Pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jawa Timur 2013”. 2015	daerah -Memakai metode kepustakaan -Subyek penelitian bersumber dari media daring	-Teori: Analisis Framing Pam-Kosicki -Lebih menekankan pembahasan tentang dinasti politik dan elit politik -Bersumber dari empat media daring, diantaranya: detik.com, kompas.com, viva.co.id, dan okezone.com	perempuan -subyek penelitian: media daring Republika
--	--	---	--	---

G. Definisi Istilah

1. Pemimpin Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Isu pemimpin perempuan di ranah publik ini merupakan salah satu isu gender yang sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan masyarakat. Terutama masyarakat beragama. Pangkal perdebatan dari isu gender ini berkaitan dengan boleh tidaknya perempuan aktif, dan menjadi pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi di wilayah publik.

2. Analisis Framing

Adalah salah satu teknik analisis bahasa yang digunakan untuk mengetahui proses media ketika melakukan pembingkaihan aspek tertentu

dari realitas, dan juga membuat aspek tersebut lebih menonjol dalam teks berita. Melalui analisis framing, peneliti bahasa bisa mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang dipakai media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut bisa menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

3. Media Daring

Salah satu bentuk media massa baru (*new media*) yang merupakan buah dari perkembangan teknologi, yakni internet.

4. Republika Online

Merupakan percampuran komunikasi media digital dari media massa Republika. Informasi yang disampaikan media daring akan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal. Selain menyajikan informasi, media daring Republika juga menjadi wadah bagi komunitas, terutama komunitas umat Islam

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Massa

Pasca era reformasi sekitar tahun 1998, media massa Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Saat itu, media massa seakan terlepas dari rantai pemerintahan otoriter yang selama ini membelenggunya, semakin banyak media massa yang menyajikan berita-berita dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk surat kabar (koran), tabloid, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan bidang teknologi, sosial, politik, dan persepsi masyarakat terhadap media massa, saat ini media massa telah mengalami perkembangan yang signifikan.

Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media massa. Dalam dunia jurnalistik, media massa dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu cetak, elektronik dan Online/daring.²⁵ Dalam perkembangannya, media massa juga berperan aktif sebagai *agen of change*, atau

²⁵*Media Cetak*: media tertua yang ada di muka bumi. Media ini berawal dari media yang disebut dengan *Acta Diurna* dan *Acta Senatus* di kerajaan Romawi, yang kemudian berkembang pesat setelah Johannes Guttenberg menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar (koran), tabloid, dan juga majalah. Sedangkan *Media Elektronik*: muncul karena perkembangan teknologi modern yang berhasil memadukan konsep media cetak, berupa penulisan naskah dengan suara (radio), bahkan kemudian berkembang dengan gambar, melalui layar televisi. Jadi, yang dimaksud dengan media massa elektronik adalah radio dan televisi. Kemudian, yang dimaksud dengan *Media Online*: adalah media yang menggunakan internet. Sepintas lalu, orang menganggap media online sama dengan media elektronik, tapi dalam perkembangannya para pakar memisahkannya dalam kelompok tersendiri. Alasannya, media online menggabungkan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan. Lihat Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indah, 2008), 13.

sebagai institut pelopor perubahan dalam masyarakat, diantaranya: ²⁶ a) Sebagai media edukasi, menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. b) Sebagai media informasi, media yang setiap saat menyampaikan informasi yang terbuka, jujur, dan benar kepada masyarakat. Dengan harapan, masyarakat akan menjadi masyarakat yang informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada masyarakat, c) Sebagai media hiburan, sebagai institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya Indonesia. Dengan demikian, media massa diharapkan mampu mendorong perkembangan budaya yang bermanfaat bagi manusia, sehingga mampu mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia.

Terkait media massa, terdapat dua pandangan yang saling berseberangan, yaitu pandangan *positivism* dan pandangan *konstruksionis*. Dalam pandangan *positivism*, media massa dilihat murni sebagai saluran yang netral dari pengaruh-pengaruh di luar media massa atau hanya sebagai sarana penyampai informasi/berita kepada khalayak umum. Pendek kata, media massa di sini tidak ikut berperan dalam pembentukan realitas. Jadi, apa yang diberitakan atau ditampilkan dalam media massa itulah yang sebenarnya terjadi. Ia hanya sebagai saluran yang murni menggambarkan realitas atau peristiwa yang sedang terjadi.

Sebaliknya, dalam pandangan *konstruksionis*, media massa tidak hanya dilihat sebagai saluran yang bebas (netral), tapi juga mampu menjadi subjek atau sebagai agen konstruksi sosial yang ikut terlibat dalam merekonstruksi realitas,

²⁶Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika)*, (Cet.I; T.tt: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 50-51.

lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Pandangan semacam ini jelas-jelas menolak pandangan *positivism* yang melihat media sebagai saluran yang netral. Dalam pandangan *konstruksionis*, berita yang disajikan media massa bukan hanya dipahami sebagai penggambaran realitas, atau sebatas menunjukkan pendapat sumber berita, namun dengan berbagai instrumen yang dimilikinya media massa juga ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan tersebut.²⁷

Berikut akan dijelaskan pengertian dari media daring, lebih khusus media daring Republika atau yang lebih dikenal dengan “Republika Online”.

1. Media Daring (*online*)²⁸

Selain disajikan dalam bentuk media cetak, berita juga disajikan dalam bentuk media daring (*online*). Sebenarnya, pemanfaatan media daring ini sama dengan media massa pada umumnya, yaitu menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat. Namun, letak perbedaannya adalah cara pemanfaatannya yang membutuhkan perangkat komputer, laptop, *smartphone* dengan jaringan internet yang memadai. Sekalipun kehadirannya belum terlalu lama, media daring sebagai salah satu jenis media massa tergolong memiliki pertumbuhan yang menakjubkan. Bahkan saat ini, hampir sebagian besar masyarakat mulai dan sedang menggemari media daring. Sekalipun internet tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk media

²⁷Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Cet. II; Yogyakarta: Lkis 2004), 22-23.

²⁸Syarifuddin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 32-34.

massa, tetapi keberadaan media daring saat ini sudah diperhitungkan banyak orang sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita.

Di antara keunggulan media daring adalah informasinya yang bersifat *up to date*, *real time*, dan praktis. *Up to date* karena media daring dapat melakukan *upgrade* suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media daring memiliki proses penyajian informasi dan berita yang lebih mudah dan sederhana. *Real time* karena media daring dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung. Sebagian besar wartawan media daring dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa, setiap saat dan setiap waktu untuk meng-*update* informasi. *Praktis*, karena media daring dapat diakses dimana saja dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. Selain itu, juga ada beberapa keunggulan lain, dikutip Reni dari James C. Foust, yaitu: *audience control*, *storage and retrieval*, *unlimited space*, *immediacy*, *multimedia capability*, dan *interactivity*.²⁹ Sebenarnya keunggulan-keunggulan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pihak media massa, seperti wartawan yang dituntut agar lebih cepat dan bagus dalam memilih dan menulis berita.

Harus diakui, dalam satu dekade belakangan ini penggunaan teknologi berbasis internet, salah satunya kehadiran media daring sangat marak di

²⁹*Audience control* atau pembaca lebih leluasa memilih berita, *storage and retrieval* berarti berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah, *unlimited space* yang bermakna memungkinkan jumlah berita jauh lengkap ketimbang media lainnya, *immediacy* atau berita yang disajikan segar, cepat dan langsung, *multimedia capability* berarti bisa menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya di dalam berita, dan *interactivity* yang berarti memungkinkan adanya peningkatan partisipasi dari pembaca. Lihat Reny Octorianty, "Analisis Framing terhadap Pemberitaan Pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jawa Timur 2013," *E-Komunikasi*, 1 (2015), 2-3.

masyarakat. Saat ini, hampir semua media cetak dan media elektronik memiliki media daring sebagai penunjang basis dokumentasi penyajian informasi dan beritanya. Jadi, setiap berita yang disajikan media cetak maupun media elektronik, kini juga dapat diakses melalui media daring atau *website* masing-masing media tersebut.

Dewasa ini, media daring semakin digemari oleh kalangan jurnalistik dan masyarakat pada umumnya, karena tidak hanya dapat mencari dan memperoleh informasi semata, tetapi juga dapat melakukan korespondensi atau komunikasi tertulis dengan narasumber. Internet terbukti telah mampu menjelma menjadi sarana komunikasi yang paling mudah dan praktis. Oleh karena itu, agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya dimata publik, media massa perlu lebih jeli dalam menyikapi keberadaan media daring. Setiap wartawan juga dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi internet yang lebih memadai. Hakikatnya, penulisan berita di media daring sama dengan berita di media cetak. Mungkin, perbedaannya hanya terletak pada formatnya di Internet.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis *framing* di media massa Republika dalam bentuk media daring. Penentuan media massa ini sebagai obyek penelitian didasarkan atas pertimbangan, diantaranya karena media massa Republika merupakan salah satu media massa terbesar yang ada di Indonesia, terutama karena media massa ini mewakili orang Muslim di Indonesia, media massa ini juga biasa disebut dengan “koran hijau.” Berikut pemaparan profil harian Republika:

³⁰Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, 179.

a. **Republika Online (ROL)**³¹

Kebutuhan akan informasi menjadi komoditas utama bagi masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang aktif dalam mencari informasi. Informasi tak hanya terbatas pada media cetak, oleh karena itu *Republika* hadir dalam format *Republika.co.id* (*Republika Online* / ROL). Kehadiran media daring ini ibarat penawar bagi masyarakat yang haus akan informasi. Seiring perkembangan teknologi dan arus informasi yang deras, membuat layanan media bergerak ke arah dinamis dalam menyajikan pemberitaannya. Salah satunya dengan menggunakan media daring di internet untuk menyebarluaskan berita. Tak terkecuali dengan *Republika*; yang menjadi salah satu surat kabar nasional terbesar di Indonesia salah satu keunggulannya adalah dengan memanfaatkan media daring untuk merebut pangsa masyarakat informasi.

Republika Online termasuk ke dalam bentuk *new media*, yaitu bentuk-bentuk media massa dengan isi yang diciptakan dan dibentuk oleh perubahan teknologi, yakni internet. Media daring sendiri mulai berkembang di Indonesia kira-kira sejak pergantian kepemimpinan era Presiden Soeharto sekitar tahun 1998. Tak hanya surat kabar, majalah, tabloid, tetapi televisi pun juga hadir dalam bentuk media daring. Jadi *Republika Online* merupakan sumber informasi yang termasuk kedalam *online journalism* atau *online newspaper* di internet. Media daring ini memanfaatkan berbagai fitur baru dari dunia pencampuran komunikasi

³¹Profil Media Daring Republika-
<https://esamethyra.wordpress.com/2015/10/23/media-online-republika-co-id-rol/> diakses pada
Rabu 05 September 2018.

media digital; diantaranya audio, video, animasi, dan peningkatan kontrol pengguna. Sehingga kelebihan dalam media daring ini adalah beritanya yang selalu diperbaharui secara berkelanjutan, dan memiliki interaktivitas, *hypertext*, dan multimedia.

Republika Online merupakan Media Komunitas Muslim Indonesia. Membaca berita melalui media daring ini memiliki kelebihan tersendiri. Jika kita membaca di surat kabar, berita yang kita dapatkan hanya sebatas berita untuk hari itu saja, tetapi jika kita membaca melalui media daring, kita bisa membaca tidak hanya edisi untuk hari ini, tetapi juga bisa edisi sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dari segi isi berita, media daring tidak berbeda jauh dengan apa yang ada dalam surat kabar *Republika*, yang membedakan Hanya dari teknis saja, di mana jika dalam surat kabar berita disajikan dengan melakukan proses pencarian, pengumpulan dan percetakan. Sedangkan dalam *Republika Online*, berita disajikan dalam format *multimedia* yang ditandai dengan adanya gambar dan video. Selain itu, kelebihan yang dapat kita rasakan jika membaca *Republika.co.id* adalah informasi yang diperbaharui secara berkelanjutan.

b. Latar Belakang Berdirinya³²

Republika hadir dengan latar belakang politik Islam yang saat itu diwakili Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sedang mendapat angin segar dalam pentas politik nasional. Nama *Republika* merupakan ide dari Presiden Soeharto yang disampaikan saat beberapa pengurus ICMI melaporkan rencana pendirian harian tersebut. Kejadian

³²Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan*, 168-172.

tersebut berlangsung ketika ICMI sedang menyelenggarakan seminar tentang pers Islam pada tanggal 28 November 1991. Seminar tersebut merekomendasikan agar muncul media Islam yang cukup kuat, baik dari segi sosial politik maupun dari segi bisnis untuk mengatasi ketimpangan pers Islam sebelumnya. Harapan tersebut, akhirnya menjadi kenyataan dengan lahirnya *Republika* pada tanggal 4 Januari 1993.

Republika hadir sebagai pelopor pembaruan di media massa Indonesia. Surat kabar harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. *Republika* terbit demi kemaslahatan bangsa, dan penebar manfaat bagi semesta.³³

Selain itu, surat kabar harian ini juga hadir salah satunya karena keprihatinan para tokoh Islam yang melihat belum ada satupun media atau pers Islam dalam kehidupan pers nasional yang berpengaruh secara signifikan. Dalam sajian isinya, *Republika* mencoba untuk menampilkan Islam secara substantif. Islam yang ditampilkan adalah Islam yang kosmopolitan³⁴. Di awal perjalanan karirnya sekitar 10 tahun, *Republika* mampu memenuhi keinginan pembaca Muslim untuk memiliki koran yang

³³Surat Kabar *Republika*, Jumat, 12 Oktober 2018, 6.

³⁴Kosmopolitan dalam KBBI bermakna punyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Di sini kosmopolitan dimaksudkan agar Islam bukan hanya sekedar persoalan untuk orang desa dan ulama, tetapi sebuah agama yang bisa mengilhami suatu kesadaran sosial yang sesuai dengan aspirasi rakyat sebagai keterbukaan, pluralisme, dan pemahaman hal-hal duniawi (*profane*) secara cerdas.

bernuansa Islam. Tentu saja dengan visi dan misi yang jelas; demi mempercepat terbentuknya masyarakat “madani”.

Usaha-usaha tersebut bisa kita lihat dari beberapa sektor masyarakat modern yang dikembangkan oleh *Republika*, diantaranya: dari sektor sosial, *Republika* memiliki dompet *dhuafa Republika*³⁵. Dari sektor budaya, *Republika* berupaya membangkitkan kesenian dan kebudayaan Islam, seperti konser maupun pagelaran kesenian yang bernuansa Islami, yang biasanya diselenggarakan setiap tahun baru Hijriyah. Dari teknologi, *Republika* menjadi salah satu pelopor media cetak yang mengembangkan media daring bernama *Republika Online* (www.republika.co.id).

c. Segmentasi Isi Surat Kabar *Republika*³⁶

Menurut Erick Thohir selaku komisaris utama, *Republika* adalah koran yang menjadi ciri khas “keIslaman”. Dengan segmentasi yang bercitrakan sebagai surat kabar komunitas Islam, *Republika* berusaha menampilkannya melalui tulisan-tulisan dan berita dalam prespektif Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya laju teknologi, menjadikan media daring *Republika* terus mengalami perbaikan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya, media daring *Republika* menyajikan berita-beritanya dengan beberapa komponen pokok beserta kanal-kanal (rubrik) yang ada di dalamnya, Berikut pemaparannya:

³⁵Institusi sosial tersebut kini menjadi yayasan mandiri yang berpengaruh, bahkan dipercaya menjadi salah satu Badan Amil Zakat dan Sedekah atau disingkat dengan BAZIS Nasional.

³⁶Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan*, 173-174.

Komponen pertama di media daring *Republika*, *News cestion* (berita harian) yang didalamnya menyajikan beberapa rubrik, seperti: politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Kedua *Khazanah*, dengan rubrik-rubriknya seperti: filantropi, hikmah, Islam digest, mualaf, rumah zakat³⁷, dan berbagai tulisan yang membincangkan tentang pernak-pernik ke-Islaman. Ketiga *Internasional*, berita-berita seputar luar negeri (internasional), seperti berita yang ada di Timur Tengah, Palestina, Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Keempat *Ekonomi*, berita-berita seputar ekonomi baik dalam atau luar negeri yang disajikan dalam berbagai rubrik, seperti: Syariah, bisnis, digital, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima *Kolom*, artikel yang ditulis oleh seseorang (tidak harus seorang jurnali atau watawan) tentang suatu topik yang sedang berkembang di masyarakat. Di media daring ini, kolom disajikan dengan beberapa rubrik, seperti: resonansi, analisis, dan fokus. Dan masih banyak lagi komponen-komponen berita yang disajikan oleh media daring *Republika*.

d. Visi dan Misi Surat Kabar Republika³⁸

Dengan komitmennya sebagai surat kabar harian, *Republika* mempunyai visi dan misi yang jelas. Visi yang diusung *Republika* adalah “Menjadikan harian *Republika* sebagai surat kabar umat yang terpercaya, mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun juga mempunyai prinsip perihal keterlibatannya

³⁷Media massa *Republika* memiliki dompet *dhuafa Republika*, yaitu sebuah institusi sosial yang bergerak mengurus masalah zakat dan sedekah.

³⁸Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan*, 178-180.

dalam menjaga persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam dengan berlandaskan pemahaman yang *rahmat li al-lamin*.”

Erick Thohir mengharapkan surat kabar *Republika* bisa ikut berperan aktif dalam proses mencerdaskan bangsa, mengembangkan kebudayaan, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan masyarakat Indonesia baru.³⁹ Dan untuk mencapai visi tersebut, *Republika* mempunyai misi-misi hampir dalam semua bidang kehidupan manusia. Berikut pemaparannya:

Pertama, Politik: 1) mengembangkan demokrasi; 2) optimalisasi peran lembaga-lembaga negara; 3) mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat; 4) mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik; 5) penghargaan terhadap hak-hak sipil; 6) mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Kedua, Ekonomi: 1) mendorong keterbukaan dan demokrasi ekonomi; 2) mempromosikan profesionalisme; 3) berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dan pengaruh globalisasi; 4) pemerataan sumber-sumber daya ekonomi; 5) mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis; 6) mengembangkan ekonomi *syariah*; 7) berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi (UMKMK).

Ketiga, Budaya: 1) kritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat; 2) mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat,

³⁹Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan*, 172-173.

mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan nurani; 3) menolak-betuk-bentuk kebudayaan yang merusak moral, akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan; 4) menolak pornografi dan pornoaksi.

Keempat. Agama: 1) mensyiarkan Islam; 2) mempromosikan semangat toleransi; 3) mewujudkan Islam “*rahmat li al-lamiin*”; 4) membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat.

Kelima. Hukum: 1) mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum; 2) menjunjung tinggi supremasi hukum; 3) mengembangkan mekanisme *check and balances* pemerintah-masyarakat; 4) menjunjung tinggi HAM; 5) mendorong pemberantasan KKN secara tuntas.

B. Analisis Framing

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Analisis framing ini terutama berkembang berkat pandangan kaum konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya.⁴⁰ Pandangan/ penilaian tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Fakta/ Peristiwa adalah Hasil Konstruksi.

⁴⁰Eriyanto, *Analisi Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Cet.I; Yogyakarta: Lkis, 2004), 13.

Bagi kaum konstruksionis, realitas bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Menurut pandangan ini, tidak ada realita yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas dipahami wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam konsep konstruksionis, fakta atau realitas bukan sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan kemudian menjadi bahan dari berita. Fakta atau realitas pada dasarnya dikonstruksi, atau manusia-lah yang membantuk dunia mereka sendiri.⁴¹

2. Media adalah Agen Konstruksi.

Pandangan konstruksionis mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan positivis dalam menilai posisi media massa. Dalam *pandangan positivis*, media dipandang murni sebagai saluran, tempat bagaimana pesan disebarkan oleh komunikator (media massa) ke penerima (khalayak). Pandangan semacam ini, melihat media bukanlah sebagai agen melainkan hanya saluran yang netral. Sebaliknya, dalam *pandangan konstruksionis* media bukan sekedar saluran yang netral, ia juga merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakannya. Di sini, media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang juga ikut mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Dengan

⁴¹Eriyanto, *Analisi Framing*, 19.

berbagai instrumen yang dimilikinya, media juga ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.⁴²

3. Berita Bukan Refleksi dari Realitas, Ia Hanyalah Konstruksi dari Realitas.

Dalam *pandangan positivis*, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan, di mana kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Disini berita adalah refleksi dan pencerminan dari sebuah realitas (*mirror of reality*). Tetapi dalam *pandangan konstruksionis*, berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana sebuah realitas dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.⁴³

Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Perbedaan antara realitas yang sebenarnya dengan berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai suatu kewajaran. Perbedaan pendapat antara kaum positivis dengan kaum konstruksioni dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan pula dalam hal bagaimana hasil kerja seorang wartawan (media massa) seharusnya dinilai.⁴⁴

⁴²Eriyanto, *Analisi Framing*, 22-23.

⁴³Eriyanto, *Analisi Framing*, 24-26.

⁴⁴Eriyanto, *Analisi Framing*, 26.

Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.⁴⁵

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.⁴⁶

Ada beberapa definisi mengenai framing yang disampaikan oleh berbagai ahli. Meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada titik singgung utama dari definisi framing tersebut. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dari proses

⁴⁵Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*, (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 161-162.

⁴⁶Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 162.

tersebut, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/ peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat khalayak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Frank D. Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi khalayak, penyajian realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti.⁴⁷

Framing juga merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Di mana cara pandang atau prespektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan, dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Gitlin, frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas. Gitlin dengan mengutip Erving Goffman, menjelaskan bagaimana frame media tersebut terbentuk. Kita setiap hari membingkai dan membungkus realitas dalam aturan

⁴⁷Eriyanto, *Analisi Framing*, 66-67.

tertentu, kemasan tertentu, dan menyederhanakannya, serta memilih apa yang tersedia dalam pikiran dan tindakan.⁴⁸

Setiap hari jurnalis berhadapan dengan beragam peristiwa dan berbagai pandangan yang kompleks. Melalui frame, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks itu menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan prespektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak. Menurut Gitlin, frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik. Dengan frame, jurnalis memproses berbagai informasi yang tersedia dengan jalan mengemasnya sedemikian rupa dalam kategori kognitif tertentu dan diampaikan kepada khalayak. Secara luas, pendefinisian masalah ini menyertakan di dalamnya konsepsi dan skema interpretasi wartawan. Pesan, secara simbolik menyertakan sikap dan nilai. Ia hidup, membentuk, dan menginterpretasikan makna di dalamnya.⁴⁹

Ada dua aspek dalam framing.⁵⁰ *Pertama*, memilih fakta/ realitas. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan ini biasanya

⁴⁸Eriyanto, *Analisi Framing*, 68.

⁴⁹Eriyanto, *Analisi Framing*, 69.

⁵⁰Eriyanto, *Analisi Framing*, 69-70.

diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu, misalnya dengan penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian kata yang mencolok, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan dengan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

C. Analisis Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media⁵¹. Konsep framing menurut

⁵¹Menurut Entman, meskipun analisis framing dipakai dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkannya adalah bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak. Menurut Entman, framing bisa menjadi paradigma penelitian komunikasi. Framing misalnya dapat dipakai untuk meneliti beberapa konsep berikut. *Pertama*, otonomi khalayak. Bagaimana sebuah teks dibaca secara dominan oleh khalayak, dan kenapa teks dibaca dengan cara pandang tertentu dan bukan dengan cara lain. *Kedua*, praktik jurnalistik. Ranah penelitian ini misalnya melihat bagaimana frame mengetahui kerja wartawan. Apa yang diperhatikan oleh wartawan pertama ketika ia meliput peristiwa, kenapa ia melihat aspek tertentu, alasan apa yang menyebabkan ia melihat dengan cara tertentu dan bukan dengan cara lain. Bagaimana wartawan membuat satu informasi lebih penting dan menonjol dibandingkan informasi lain, faktor-faktor apa yang menyebabkannya, dan sebagainya. *Ketiga*, analisis isi. Dalam analisis isi tradisional, yang diukur oleh peneliti adalah bagaimana kecenderungan pemberitaan suatu media, apakah positif ataukah negatif, dari suatu teks. Disini teks dipandang sebagai sesuatu yang linear. Sama sekali tidak diperhatikan bahwa dalam teks ada penonjolan yang mempengaruhi pembacaan atas suatu teks. *Keempat*, pendapat umum. Penelitian dalam ranah ini sangat banyak, misalnya dalam jajak pendapat, bagaimana pertanyaan yang disusun dengan frame tertentu mempengaruhi jawaban

Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks⁵².

1. Perangkat Framing

Dalam konteks Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.⁵³ Sebagaimana dengan konsep umum pendekatan framing, Entman dalam analisis framingnya juga menekankan pada dua dimensi besar, yaitu: seleksi isu dan penekanan/ penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/ isu. Kedua dimensi ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya.⁵⁴

khalayak. Atau bagaimana seorang kandidat atau politisi yang mengemas isu dalam cara tertentu dan menonjolkannya, berpengaruh terhadap persepsi khalayak atas suatu isu. Dan bagaimana kalau isu ditonjolkan dan dikemas dengan cara lain akan berbeda pandangan khalayak. Lihat pada Eriyanto, *Analisi Framing*, 185.

⁵²Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Karena informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Diantara bentuk-bentuknya, ialah menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab dibenak khalayak. Dengan begitu, sebuah ode/ gagasan/ informasi akan lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Lihat pada Eriyanto, *Analisi Framing*, 186.

⁵³Eriyanto, *Analisi Framing*, 188.

⁵⁴Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 163.

Secara teknis, tidak mungkin bagi jurnalis untuk mem-framing seluruh bagian berita. Maksudnya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (*happening*) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, kejadian-kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui oleh khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan.⁵⁵

Penonjolan sebagaimana yang disinggung sebelumnya, merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Karena dengan realitas disajikan secara menonjol atau mencolok sudah barang tentu punya peluang yang besar untuk diperhatikan sehingga lebih mampu mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.⁵⁶ Karena itu dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; kemudian menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana – penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, dan lain-lain.

Tabel 2.1. Tabel Framing Robert N. Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak Semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, karena media massa memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tertentu telah dipilih, bagaimana

⁵⁵Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 172.

⁵⁶Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 163-164.

	aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.
--	--

Berikut penjelasan perihal seleksi isu dan penonjolan isu yang ditekankan dalam analisis framing Entman:

a. Seleksi Isu

Aspek memilih isu ini berkaitan dengan pemilihan fakta. Bagian mana yang akan diliput atau diberitakan oleh wartawan dari suatu isu/peristiwa? aspek memilih fakta tidak dapat dilepaskan dari bagaimana fakta itu dipahami oleh media. Dalam mendefinisikan suatu peristiwa, Entman menyebut ada empat cara yang sering dilakukan oleh media. Keempat cara itu merupakan strategi media, dan membawa konsekuensi tertentu atas realitas yang terbentuk oleh media, yaitu:⁵⁷

1) *Define problem* (pendefinisian masalah)

Merupakan elemen yang dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame*/ bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada suatu peristiwa, bagaimana peristiwa/ isu tersebut dipahami atau dilihat dengan nilai positif atau negatif.

2) *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

⁵⁷Eriyanto, *Analisi Framing*, 197-198.

Merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

3) *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral)

adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebagai argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip b erhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

4) *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Proses pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bagian dari teknis jurnalistik, tetapi juga politik pemberitaan. Maksudnya, bagaimana dengan cara dan strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas.

Tabel 2.2. Tabel Empat Elemen *Framing* Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang akan disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dilihat untuk melegitimasi atau mendealektika suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang harus di tempuh untuk mengatasi masalah?

b. Penonjolan Aspek Tertentu dari Suatu Isu

Penonjolan aspek tertentu dari suatu isu sangat berkaitan dengan penulisan fakta. Proses ini mau tidak mau sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk dibaca oleh khalayak. Pilihan kata-kata tertentu yang dipakai tidak sekedar teknis jurnalistik, akan tetapi sebagai politik bahasa. Bagaimana bahasa – yang dalam hal ini umumnya pilihan kata-kata yang dipilih – dapat menciptakan realitas tertentu kepada khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga bisa membatasi persepsi kita dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang melihat prespektif lain, menyediakan aspek tertentu dari suatu peristiwa dan mengarahkan bagaimana khalayak harus memahami suatu peristiwa. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kata-kata sesungguhnya dapat mengarahkan logika tertentu untuk memahami suatu persoalan.

Pada dasarnya, pola penonjolan ini tidaklah dimaknai sebagai bias, tetapi secara ideologis sebagai strategi wacana: upaya menyuguhkan pada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima. Kata penonjolan (*salience*) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna dan berkesan. Suatu peningkatan dalam penonjolan mempertinggi probabilitas penerima atau lebih memahami informasi, melihat makna lebih tajam, lalu memprosesnya dan menyimpannya dalam ingatan. Bagian informasi dari teks dapat dibuat lebih menonjol dengan cara menempatkan atau mengulang atau mengasosiasikan dengan simbol-simbol budaya yang sudah terkenal.⁵⁸

Bagaimanapun tingkat penonjolan teks dapat sangat tinggi bila teks itu sejalan dengan skemata sistem keyakinan penerima. Skemata serta konsep-konsep tersebut erat berhubungan dengan kategori, scripts, atau stereotype, yang merupakan kumpulan ide di dalam mental yang memberi pedoman seseorang untuk memproses informasi. Karena penonjolan merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima, maka kehadiran *frame* dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak.⁵⁹

⁵⁸Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 164

⁵⁹Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 164.

2. Efek Framing

Framing, kata Entman memiliki implikasi penting bagi komunikasi, terutama komunikasi politik. Menurutnya, frames menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda⁶⁰. Konsep framing dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. Framing analysis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ungkapan/ ucapan, atau yang lain. Menurutnya, framing secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Lebih lanjut, membuat frame ialah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, atau merekomendasikan penyelesaiannya.⁶¹

Peristiwa-peristiwa penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik selalu menarik perhatian masyarakat dan memfokuskannya pada problem sosial tertentu. peristiwa ini umumnya mendorong kalangan media

⁶⁰Misalnya, dalam konteks politik. Politisi mencari dukungan dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Mereka para politisi mampu membangun frame berita bersama jurnalis. Dalam konteks ini, lanjut Entman, framing memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik, dan frame dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak –ia menunjukkan identitas para aktor atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Namun, Entman menyayangkan, banyak teks berita yang merefleksikan permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebuah isu, memperlihatkan homogenitas framing pada satu tingkat analisis, dan belum mempersaingkannya dengan framing lainnya. Lihat pada Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 164.

⁶¹Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 164-165.

untuk menghadirkan suatu diskusi di mana semua pihak dapat menyuarakan pendapat dan penafsirannya tentang peristiwa itu sendiri dan masalah sosial yang terkandung didalamnya. Keputusan atau kecenderungan media massa diantaranya juga bisa dipengaruhi oleh sumber elit yang diwawancarai.⁶²

D. Perempuan dan Media Massa

Woman Discourse adalah perbincangan mengenai perempuan yang belum dan kemungkinan besar tidak akan pernah berujung, selalu saja ada *new topic* yang menarik untuk diperbincangkan *public* dan menjadi *private headline* isu keseharian. Persoalan demi persoalan seolah tak kunjung habis terkupas dalam menanggapi isu perempuan, mulai dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan seksual, korban skandal, politik hingga emansipasi. Sampai sekarang-pun isu-isu tersebut masih menghiasi atmosfer pembicaraan publik. Wacana dengan bahan perbincangan perempuan seperti memiliki daya tarik tersendiri, apa saja isu tentang perempuan selalu menarik kalangan untuk mendebat dan membincangnya. Dan media massa adalah salah satu alat penting dan paling berperan dalam menyebarkan isu perbincangan perempuan, bahkan terlahir asumsi yang menyatakan media massa dan perempuan ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi.⁶³

Terlebih lagi pasca Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1955 yang melahirkan Deklarasi Beijing, media massa semakin semarak dalam

⁶²Eriyanto, *Analisi Framing*, 196.

⁶³Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 104-105.

menampilkan isu-isu perempuan. Momen tersebut sekaligus membuka peluang politik bagi perempuan di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak-haknya, yang juga didukung peran media massa dalam menyebarkan hasil-hasil dari konferensi tersebut. Di sisi lain, media massa juga menjelma sebagai wadah para aktivis gerakan perempuan untuk terus menyuarakan hak-haknya dalam bidang politik.⁶⁴

Yang dimaksud dengan Isu perempuan di atas adalah isu-isu yang dampaknya dirasakan oleh perempuan secara langsung. Misalnya: hak reproduksi, ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan, politik (hak memilih dan dipilih), dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut menjadi salah satu bukti bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan sangatlah beragam, mulai dari kehidupan pribadi atau yang bersifat domestik sampai yang bersifat publik. Keberagaman persoalan tersebut menurut Molyneux (1986) dalam Machya (2009) dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat “praktis” dan “strategis”. Kepentingan gender “praktis” bukan mempersoalkan konstruksi gender yang tidak adil melainkan berangkat dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai perempuan. Misalnya: tentang perawatan kesehatan, air bersih, pemeliharaan anak dan sebagainya. Sementara, kepentingan gender “strategis” atau yang lebih identik dengan isu-isu feminis ini lahir dari adanya subordinasi perempuan di masyarakat yang akhirnya mendorong untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil gender. Misalnya: penghapusan kekerasan dalam rumah

⁶⁴Machya Astuti Dewi, “Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan”, *Ilmu Komunikasi*, 3 (September-Desember 2009), 230.

tangga, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan dalam bidang politik; baik itu hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih.⁶⁵

Diantara sekian banyak persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan juga yang paling disorot oleh media massa selain kekerasan adalah masih terpinggrinya posisi perempuan dalam bidang politik. Karena faktanya, sampai sekarang jumlah keterwakilan perempuan yang ikut terlibat dalam bidang politik; baik itu pada tingkat legislatif maupun eksekutif masih jauh lebih rendah dibanding jumlah keterwakilan laki-laki. Padahal di Negara Indonesia jumlah populasi antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

E. Pemimpin Perempuan

Pemimpin merupakan salah satu faktor penentu bagi sebuah kelompok atau organisasi dalam meraih sebuah kesuksesan. Itu semua bisa tercermin dari bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sebuah organisasi, seperti membangun sikap yang konstruktif dalam tubuh organisasi, seorang pemimpin juga harus bisa membimbing dan memberi contoh yang baik bagi para anggotanya.⁶⁶

Sejak abad ke-15, al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya adalah masalah kepemimpinan, al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang

⁶⁵Dewi, "Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan", 230.

⁶⁶Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Cet. I; Jakarta: Preanada Media, 2006), 211.

diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan bukanlah monopoli kaum laki-laki, karena juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala negara).⁶⁷

Aburdene dan Naisbit dalam Nur Cholis menyebutkan ada beberapa perilaku yang mencirikan kepemimpinan perempuan, dan perilaku-perilaku tersebut dikelompokkan kedalam enam ciri utama, diantaranya: memberdayakan (*empowering*), merestrukturisasi (*restructuring*), mengajarkan (*taching*), memberikan contoh (*providing role models*), mendorong keterbukaan (*encouraging openness*).⁶⁸

1. Argumentasi Teologis Kepemimpinan Perempuan

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Ia juga menyatakan bahwa Nabi Saw., diutus ke dunia untuk membagikan rahmat ke seluruh alam semesta. Cita-cita al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal.⁶⁹

⁶⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 49.

⁶⁸Nur Cholis, "Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan Pendidikan," *National Forum of Education Administration and Supervision Journal*, 4 (1998-1999), 5.

⁶⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. (Cet.II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 272.

Ibn Qayyim setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks suci al-Quran maupun sunnah Nabi Saw. akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan dibangunnya syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia secara universal, seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Secara lebih khusus, Ramadhan al-Buṭi dengan mengesankan telah merumuskan kemaslahatan, sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*⁷⁰. Ia mengatakan:

“Kemaslahatan adalah menjaga atau memelihara tujuan *syariah*, diantara tujuan *syariah* yang berhubungan dengan manusia ada lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, *naṣab* (keturunan) dan harta. Maka setiap tindakan yang mencerminkan pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut disebut dengan maṣlahah, dan setiap tindakan yang menafikan lima pokok dasar tersebut disebut dengan *mafsadat*.”

Pernyataan di atas sejalan dengan al-Ghazali, dengan penekanan pada urutan yang dimaksud dari lima penjagaan tersebut.⁷¹ Dari sini, baik al-Buṭi maupun al-Ghazali, sepakat bahwa agama Islam berkomitmen terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal. Pada dimensi ini agama selalu hadir dalam bentuknya yang adil, merahmati, egaliter, dan demokrasi. Hal ini juga berarti bahwa agama Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat. Oleh karena itu, sistem keagamaan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya –ras, agama, etnis, dan gender– tidak memiliki relevansi dengan Islam dan harus ditolak. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan ini sekali lagi

⁷⁰Muhammad Sya'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: *Mu'assah al-Risalah*, 1973), 15.

⁷¹Abbas Arfan, *Maslahah dan Batasan-batasan menurut al-Buti*, “*de Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Juni, 2013), 91.

merupakan ruh dari seluruh aktivitas kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan.⁷²

Salah satu keutamaan ajaran Islam adalah memandang manusia secara setara dengan tidak membeda-bedakannya berdasarkan kelas sosial (kasta), ras, dan jenis kelamin. Dalam Islam yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal. Pemahaman tersebut sudah jelas disebutkan al-Quran surat al-Hujurat (49:13).⁷³

Sebagaimana di atas, bahwa pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dan hak asasi manusia sebenarnya telah menjadi komitmen seluruh kaum muslimin. Tidak seorang muslim pun yang mengingkarinya. Akan tetapi, masalahnya menjadi tidaklah sederhana ketika mereka memasuki persoalan-persoalan yang lebih khusus, persoalan partikular. Misalnya, dalam hal perempuan di sektor publik/politik, dan secara lebih khusus untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.⁷⁴

Dalam pandangan mayoritas ahli fiqh konservatif selama ini, peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, berbeda jika arti politik praktis yang didalamnya memerlukan pengambilan keputusan mengikat yang menyangkut masyarakat luas, seperti menjadi seorang hakim, masuk pada lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, kebanyakan ulama Islam sepakat

⁷²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 274-275.

⁷³Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Pustaka Obor: Jakarta: 2017), 3.

⁷⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (IRCiSoD:Yogyakarta, 2019), 275.

antara laki-laki dan perempuan tidak bisa diberlakukan secara sama. Sebagaimana kutipan dari fatwa yang dikeluarkan Universitas al-Azhar (1952) dalam Husein, menyebutkan:⁷⁵

Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Adapun kekuasaan umum yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah kekuasaan memutuskan/memaksa dalam urusan-urusan kemsyarakatan, seperti kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan melaksanan undang-undang (eksekutif).

Kalau dilihat kembali sejarahnya, posisi perempuan masih belum beruntung, terutama sebelum Islam datang. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang keadaan dan kondisi kaum perempuan tersebut jauh berbeda, Nabi mengangkat derajat kaum perempuan yang diperlakukan tak manusiawi di zaman jahiliyah (Pra-Islam).⁷⁶

Sejarah mencatat bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang dikenal dengan zaman Jahiliyah, kedudukan kaum perempuan sangatlah rendah dan buruk. Kaum perempuan saat itu dianggap tidak lebih berharga dari komoditi. Mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga diwariskan sebagaimana harta benda. Bahkan, setelah mewarisi istri ayahnya, seorang laki-laki dapat mengawininya. Maulana Muhammad Ali, sebagaimana yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, mengatakan, “Dikalangan masyarakat Arab pra-Islam, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, putranya yang lebih tua atau anggota keluarga lainnya memiliki

⁷⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 275-276.

⁷⁶Hafids Muftisany, “Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?,” *Republika*, Jumat, 19 Desember 2014, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz36-wanita-menduduki-jabatan-publik-bolehkah>

hak untuk memiliki janda atau janda-jandanya, mengawini mereka jika mereka suka, tanpa memberikan mas kawin, mengawinkannya dengan orang lain, atau sebaliknya; melarang mereka kawin dengan orang lain.⁷⁷

Selain itu, bangsa Arab pada masa Jahiliyah juga biasa menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup dengan motif menambah beban ekonomi dan membawa aib bagi keluarga. Sependapat dengan hal itu, Faishol menambahkan bahwa pada periode pra-Islam tidak ada pembatasan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki seorang laki-laki.⁷⁸

Selain praktik-praktik tersebut, pada masa Jahiliyah juga terdapat banyak bentuk-bentuk praktik perkawinan yang telah dihapus setelah Islam datang. Di antaranya adalah perkawinan *mut'ah* (jenis perkawinan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan), perkawinan *zawaj al-badal* (saling bertukar istri), perkawinan *zawaj al-shighar* (bentuk perkawinan yang serupa dengan perkawinan yang umum berlaku, kecuali tidak ada mas kawin yang diberikan karena pengantin laki-lakinya mengawinkan putri atau saudara perempuannya dengan laki-laki yang akan mengawinkan putri atau saudara perempuan dengannya), dan perkawinan *jawaz al-istibda'* (suami boleh menyuruh istri bersetubuh dengan laki-laki lain agar bisa hamil).⁷⁹ Begitulah kondisi umum kaum perempuan pada saat Islam belum datang. Setelah Islam datang hampir semua

⁷⁷Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*”, terj. Farid Wajidi & Cici Farkha, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 28.

⁷⁸M.Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 40-41.

⁷⁹Engineer, *The Rights of Women*, 28.

praktik-praktik yang merendahkan derajat kaum perempuan dihapus dan diganti dengan ajaran-ajaran yang ramah dan toleran terhadap perempuan.⁸⁰

Dalam salah satu tulisannya, Syahrur mengungkapkan bahwa, “Pada hakikatnya, hak terlibat dalam aktivitas politik adalah hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada kaum perempuan. Lebih jelasnya, dalam usahanya untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu sistem patriarki yang tumbuh subur pada masa tersebut dan masa-masa sebelumnya, Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak politik tersebut, atau dengan kata lain, perempuan memiliki hak dan kemampuan yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik”.⁸¹

Sebagian pihak menyatakan bahwa pada masa awal Islam, perempuan sudah terlibat dalam medan pertempuran politik bersama Nabi Saw., tetapi mereka tidak ikut terlibat dalam menentukan hukum. Yang kemudian pernyataan tersebut diluruskan oleh Syahrur,

“Saya berpendapat bahwa perempuan saat itu tidak terlibat dalam penentuan hukum karena pengaruh konteks sejarah yang memaksa sekaligus membatasi ruang gerak mereka, bukan karena syariat Islam menghendaki demikian. Dalam hal ini, kita tidak berhak membandingkan atau menganalogikan realitas yang kita hadapi saat ini dengan realitas perempuan dalam bidang sosial dan politik pada saat Nabi hidup, karena memang masanya sudah berubah dan berkembang.”

⁸⁰M.Faisol, *Hermeneutika Gender*, 41.

⁸¹Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar hermenutika Hukum islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, (Cet. I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 276.

Ia melanjutkan, bahwa perempuan terutama muslimah hendaknya menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih, bahkan berhak merebut puncak kekuasaan dalam sebuah negara.⁸²

Pangkal perdebatan persoalan perempuan di atas, terutama kepemimpinan perempuan, pertama-tama dikembalikan pada kata *qawwam* dalam firman Allah surat an-Nisa' (4:34)⁸³, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata *qawwam* sebagai: penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan, pemimpin, menjaga sepenuhnya secara fisik dan moral, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan laki-laki menjadi pengelola masalah-masalah perempuan. Tim Departemen Agama dalam al-Quran dan terjemahannya juga mengartikan demikian. Dari pemaknaan di atas nampak jelas bahwa laki-laki berada di posisi superior, sementara perempuan berada di posisi inferior.⁸⁴

Argumen superioritas laki-laki tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pihak laki-laki memiliki aset kekayaan yang mampu menghidupi istri dalam bentuk maskawin dan pembiayaan hidup keluarga sehari-hari.⁸⁵ Misalnya pernyataan az-Zamakhshari (467-538 H), pemikir Mu'tazilah tersebut mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-'aql*), ketegasan

⁸²Syahrur, *Prinsip Dasar hermenutika*, 277- 279.

⁸³Al-Quran, an-Nisa' (4): 34.

⁸⁴Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, 5.

⁸⁵Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, 5.

(*al-hazm*), tekad yang kuat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), kemampuan menulis (*al-kitabah*), dan keberanian (*al-furusiyah aq al-ramyu*). Para penafsir yang lain, seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad Thahir bin Asyur, mereka semua sepakat bahwa kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, kodrati. Atas dasar inilah mereka berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik, lebih khusus politik.⁸⁶

Dewasa ini, pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut telah terbantahkan sendirinya dengan fakta-fakta yang riil. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Sampai saat ini, banyak kita saksikan perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua organisasi, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan pekerjaan dan profesi. Realitas ini sekaligus memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat di atas tidaklah benar. Yang benar adalah produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Di sisi lain, kenyataan ini juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak secara terus-menerus, dari kehidupan nomaden ke ber peradaban, dari kerangka berpikir

⁸⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 283-284.

tradisionalis ke kerangka berpikir rasionalis, dari pandangan tekstual ke pandangan substansial, dari tertutupan kepada keterbukaan, dan seterusnya.⁸⁷

Kalau begitu, bagaimana kita menyikapi surat an-Nisa' (4:34), yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Yang oleh banyak orang dijadikan dalil penolakan kepemimpinan perempuan? Berangkat dari wacana pemikiran fiqh, maka ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang bersifat sosiologis-kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki sebenarnya lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki atau yang lebih dikenal sebagai peradaban patriarkal. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.⁸⁸

Jika kita gali lebih dalam *asbab an-nuzul* ayat di atas, maka konteks ayat tersebut bukan berkenaan dengan masalah kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, secara kontekstual ayat tersebut berhubungan dengan kasus rumah tangga, lebih khusus lagi, berkaitan dengan kebutuhan biologis suami. Hal ini dipahami dari sebab penamparan suami (Sa'ad bin Rabi') atas penolakan istrinya (Habibah binti Zaid) yang menolak berhubungan badan. Dari sini, maka ayat di atas bukan bersifat normatif-yuridis melainkan pernyataan sosiologis, karena ia turun berkenaan dengan urusan rumah tangga. Sebagaimana pernyataan Sa'id

⁸⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 284-285.

⁸⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 285.

‘Aqil Siraj dalam Sofyan, ayat ini adalah ayat “ranjang”, dan karenanya tidak bisa dijadikan alasan atas keharaman kepemimpinan perempuan di ranah publik.⁸⁹

Terkait dengan kosakata dalam al-Quran, Umar (2002) dalam Afifah menyatakan bahwa terdapat banyak bias gender dalam kosakata bahasa Arab. Dalam tradisi Arab, jika yang menjadi sasaran pembicaraan laki-laki dan perempuan, maka kata yang digunakan adalah bentuk maskulin, karena ada kaidah yang menyatakan, setiap yang menggunakan bentuk maskulin, maka dengan sendirinya di dalamnya termasuk perempuan. Tidak berlaku sebaliknya, jika yang digunakan kata feminim, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Misalnya kata *iman* dan *khalifah*, dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam bahasa Arab tersebut tidak mempunyai bentuk feminin, dan keduanya hanya diperuntukan untuk laki-laki. Pada akhirnya, bias tersebut berimplikasi pada cara dan hasil proses penafsira al-Quran. Hal ini nampak pada terjemahan al-Quran surat an-Nisa’ (4:34) yang ada di Departemen Agama, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

yaitu: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan”. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa laki-laki menjadi syarat atas kepemimpinan seseorang.⁹⁰

⁸⁹Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 129.

⁹⁰Neng Dara Afifah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Obor, 2017), 144.

Padahal, berdasarkan kaidah bahasa Arab, kata *al-rijal* tidak selalu menunjuk ke semua laki-laki, melainkan hanya sebagian laki-laki tertentu yang memenuhi kriteria.⁹¹ Dalam konteks ayat ini, kata *al-rijal* merujuk pada Sa'ad bin Rabi' suami Habibah binti Zaid. Dengan begitu makna konotatif kata *al-rijal* adalah suami.

Selain dari al-Quran, pangkal perdebatan para ulama tentang persoalan kepemimpinan perempuan juga merujuk pada hadits Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Haitsam] Telah menceritakan kepada kami [Auf] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, - yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhari. No. 4073).

Dilihat dari sisi *asbab al-wurud* nya, secara kontekstual hadits tersebut berkenaan dengan kepemimpinan putri Kisra, penguasa Persia yang saat itu menjabat sebagai kepala negara. Sebagaimana yang dikutip Sofyan dari *fath al-Bari* nya Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H), bahwa hadits tersebut bermula dari

⁹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Quran*, (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001), 172.

‘Abdullah Ibn Hudzaifah. Ada laporan dari penyampai pesan Rasulullah bahwa Raja Kisra Anusyirwan menanggapi dengan sinis ajakan masuk Islam sampai merobek-robek surat Rasulullah Saw. Setelah tahu kabar tersebut, Nabi Saw. berdoa kepada Allah SWT. agar kerajaan itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan Allah SWT mengabulkan permohonan Rasulullah Saw. tidak berselang lama setelah merobek surat dari Nabi Saw. Kisra Anusyirwan dibunuh oleh anak laki-lakinya, dan anak tersebut juga membunuh saudaranya-saudaranya, setelah ia menjadi raja ia akhirnya mati diracun. Ketika itulah kekuasaan kerajaan jatuh di tangan anak perempuannya yang bernama Bauran binti Syiruyah Ibn Kisra. Mendengar realitas politik negeri Persia tersebut, Nabi Saw berkomentar sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Bukhori (No.4073):⁹²

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Komentar Nabi Saw sangat argumentatif. Disamping karena terkabulnya doa Nabi Saw. sebelumnya, juga karena kapabilitas Bauran yang lemah dibidang kepemimpinan.⁹³ Hadits tersebut tidak diungkapkan Nabi dalam kerangka legitimasi hukum. Tegasnya, hadits tersebut tidak memiliki relevansi hukum.

Selain itu, hadits Abu Bakrah tersebut juga berbentuk *kalam khabar* (kalimat berita), bukan larangan atau perintah. Karena itu, kalaulah hadits tersebut akan diterima, maka hendaknya ditempatkan sesuai konteksnya, yakni berkenaan dengan diangkatnya Bauran binti Syiruyah Ibn Kisra, sebagai raja Persia, setelah

⁹²Sofyan, *Fikih Feminis*, 133.

⁹³Sofyan, *Fikih Feminis*, 134.

raja sebelumnya meninggal dunia. Boleh jadi pernyataan Rasulullah tersebut dikhususkan pada waktu itu ketika kemampuan perempuan dalam masalah kenegaraan belum memadai, atau lebih khusus lagi, hadits tersebut hanya berkaitan dengan kasus Bauran yang barangkali telah diketahui ketidakmampuannya memimpin kerajaan besar seperti Persia.⁹⁴

Lebih khusus, Hamka Hasan memaparkan bahwa memang kondisi kerajaan Persia saat itu adalah kerajaan yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya dan kediktatoran sebagai hukumnya. Raja tidak mengaplikasikan nilai-nilai musyawarah dan mufakat, serta tidak menghormati pendapat pihak lain. Hubungan antara individu menjadi tidak baik, pembunuhan merajalela. Kondisi Persia seperti itulah yang direspon Nabi melalui jawabannya terhadap berita suksesi kepemimpinan di Persia. Kalaulah kondisi di Persia ketika itu demokratis, mungkin respon Nabi tidak seperti bunyi hadits yang menyatakan kegagalan perempuan dalam memimpin suatu Negara.⁹⁵

Hadits terkait penolakan kepemimpinan perempuan tersebut tidak bisa dihukumi secara general, terutama jika dihadapkan pada fakta-fakta sejarah yang ada. Terbukti sejumlah perempuan mampu memimpin bangsanya secara sukses dan gemilang. Pada masa sebelum Islam kita mengenal Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba'. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang, negaranya sentosa, itu semua karena ia mampu mengatur negaranya dengan sikap dan pandangan yang

⁹⁴Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara "Analisis Isu-isu Gender dalam al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjamun al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel*, (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2017), 125.

⁹⁵Hamka Hasan. *Tafsir Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Cet. I; T.tt: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), 205.

demokratis sebagaimana yang diceritakan al-Quran dalam surat an-Naml (27:23-25), yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (1). Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (2) agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang ka mu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan (3).⁹⁶

Kemudian ada Indira Gandhi, Margaret Tacher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho dan Syekh Hasina Zia yang merupakan beberapa contoh pemimpin bangsa yang suksse di era modern. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit kepala negara/pemimpin yang berjenis kelamin laki-laki gagal dalam memimpin bangsanya. Dengan demikian, kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin sebuah negara tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin; laki-laki atau perempuan. Tapi, lebih kepada sistem yang diterapkan dan kemampuannya dalam memimpin.⁹⁷

Jika demikian, maka hadits di atas tidak boleh digeneralisasi untuk semua kasus, tapi harus dipahami dari sisi esensinya. Di mana hadits tersebut

⁹⁶AL-Quran, an-Naml (27): 23-25.

⁹⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 289.

bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu, yang karena kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratif. Dari sini, maka poin pentingnya dalam sebuah kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas; dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan.⁹⁸

2. Hak-Hak Politik Perempuan

Dalam wacana Islam,⁹⁹ politik (*al-siyasah*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk memperoleh kesejahteraan di muka bumi dan kebahagiaan di akhirat. Politik dalam arti ini adalah sebuah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia ada disegala ruang baik ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal maupun komunal. Meski, kebanyakan orang menyempitkan pengistilahan politik hanya pada tataran politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompok yang bersifat sementara, bukan lagi untuk kepentingan universal, yaitu masyarakat luas dalam jangka waktu yang lebih panjang dan kekal.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang dan konstitusi berdasarkan

⁹⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 290.

⁹⁹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 163-164.

keanggotaan sebagai warga negara.¹⁰⁰ Di sini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena praktik demokrasi yang benar menghendaki hal tersebut. Prinsip demokrasi memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk berpolitik, menjaga, dan membela kepribadiannya.¹⁰¹

Untuk mewujudkan hak-hak politik yang serasi dan adil sesuai gender tersebut, Negara Indonesia memiliki komitmen terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan yang tercermin dalam konvensi maupun konstitusi. Meski begitu, jaminan persamaan hak tersebut, belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan dipaparkan hak-hak persamaan, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan dalam bidang politik:¹⁰²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Menyatakan bahwa:

- a. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tanpa ada pengecualian.
- b. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah kesepakatan internasional dalam bentuk Undang-Undang, misalnya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*). CEDAW sebagai konvensi internasional telah diratifikasi Negara kita menjadi UU No 7 tahun 1984. Inti dari konvensi ini adalah

¹⁰⁰Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al-Huquq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*, terj. Ikhwan Fauzi, (Cet. I; T.t: AMZAH, 2002), 34.

¹⁰¹Ja'far, *al-Huquq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam*, 108.

¹⁰²Tapi Omas Ihromi et al., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Bandung: ALUMNI, 2000), 292-293.

menghentikan segala bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan, di sini undang-undang negara diminta supaya menghapuskan semua sistem yang terindikasi membedakan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰³ Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- c. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- d. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Semua peraturan-peraturan yang tertuang dalam naskah tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada satu peraturan pun yang mendiskriminasikan perempuan, terutama dalam hal keikutsertaan dan keterlibatan dibidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya.

3. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Seiring dengan perkembangan zaman, perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesejahteraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kemakmuran, dan keberhasilan pembangunan. Kesejahteraan gender sendiri merupakan salah satu instrumen penegakan hak asasi manusia, yaitu dengan terealisasinya kesetaraan dan keadilan gender. Sebenarnya, pembahasan secara

¹⁰³Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Cet. II; Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 14.

khusus dalam hal ini sudah dimulai sejak tahun 1980- an melalui forum-forum internasional. Adapun penerapannya, bisa melalui strategi *Gender Mainstreaming* atau pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development (GAD)*¹⁰⁴.

Realitanya,¹⁰⁵ pendekatan pembangunan selama ini masih belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga turut mengambil peran terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dan dampak dari kesenjangan gender (*gender gap*) ini adalah permasalahan gender (*gender issue*) yang ada dalam pembangunan. Misalnya, belum terwujudnya keseimbangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kebutuhan gender strategis masih belum terpenuhi, minimnya peran perempuan pada sektor pemerintah baik sebagai legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), eksekutif (Kepala negara, kepala daerah), maupun yudikatif (Mahkamah Agung).¹⁰⁶

Sejalan dengan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di atas, perempuan Indonesia diharapkan turut serta berkontribusi dalam politik. Dengan

¹⁰⁴Pendekatan *Gender and Development (GAD)*, menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Meskipun GAD ini sempat diperdebatkan pada *The International Conference on Population and Development (CPD)* di Cairo 1994, dan *The 4th World Conference of Woman* di Beijing 1995. Namun, di sisi lain ada hal yang disepakati, yaitu adanya komitmen operasional tentang peningkatan status dan peran perempuan di dalam hukum dan pembangunan, mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan, hingga menikmati hasil-hasil pembangunan. Lihat. Astrid, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, 8.

¹⁰⁵Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2009), 89-91.

¹⁰⁶Secara horizontal pembagian atau pemisahan kekuasaan di Indonesia menganut doktrin *trias politica*. *Trias politica* meyakini bahwa kekuasaan dalam negara terdiri dari tiga macam, yaitu *legislatif / rule making function* atau kekuasaan membuat undang-undang, *eksekutif/rule application function* atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan *yudikatif/rule adjudication function* atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lihat. Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet. XXIV; Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 151.

kata lain, kesetaraan dan keadilan gender dalam sektor politik perlu ditumbuhkembangkan sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia yang demokratis. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam politik. Bagi perempuan, partisipasi politik adalah suatu kegiatan baik secara individu maupun kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Dalam konteks Indonesia, yang saat ini sedang mengalami proses pendewasaan politik sejak reformasi 1998, partisipasi politik bagi perempuan terlihat dalam pimpinan organisasi perempuan, jumlah kursi perempuan di DPR, kepala daerah, terpilihnya presiden perempuan pertama di Indonesia Megawati Soekarno Putri, dan lain-lain.¹⁰⁷

Partisipasi perempuan dalam sektor politik atau kontribusi nyata perempuan dalam politik tersebut didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam masyarakat dan sejauh al-Quran serta sunnah menyuarakan kesetaraan gender dalam ruang sosial, perempuan memiliki hak penuh untuk ikut berpartisipasi dalam ruang politik. Perempuan bebas mengekspresikan pandangan dan persetujuan serta argumennya terhadap kebijakan pemerintah.¹⁰⁸

Jelaslah, bahwa perempuan memiliki kesempatan yang luas dalam setiap aktivitas politik. Keterlibatan secara aktif perempuan di ranah politik tersebut, menegaskan bahwa suatu pemerintahan bukanlah sebuah bentuk kekuatan absolut yang lahir dari prinsip-prinsip *ilahiah*. Lebih tepatnya, ia

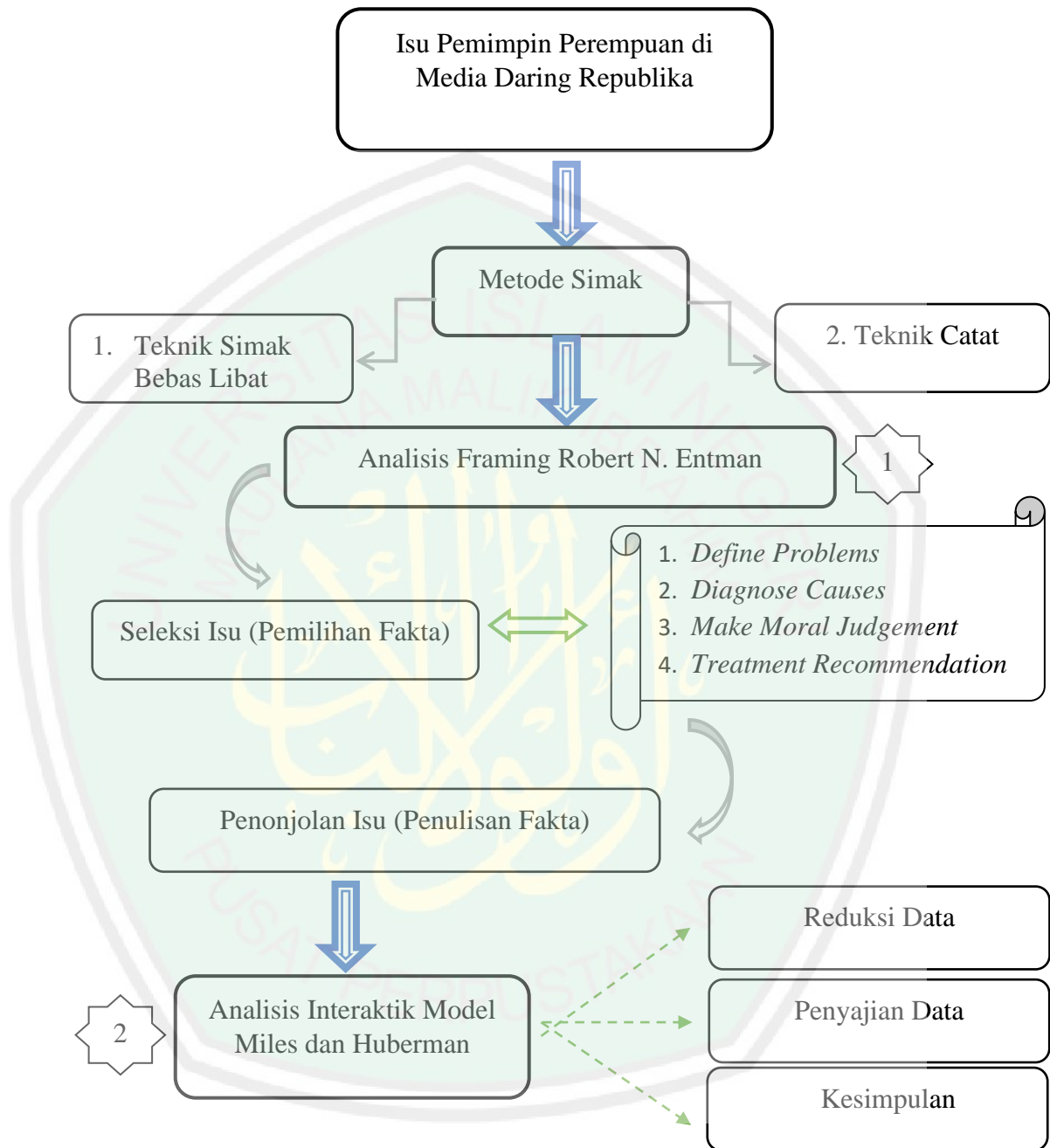
¹⁰⁷Arif Budi Warianto, *Gender and Politics*, (Cet. I; Yogyakarta: Kerjasama antara Tiara Wacana dan Pusat Studi Wanita UGM, 2009), 67-68.

¹⁰⁸Ali Hosein Hakim, et al., *Islam and Fenisism: Theory, Modelling, and Application*, terj. A.H. Jemala Gembala, (Cet.I; Jakarta: al-Huda, 2005), 128.

merupakan sejenis kepemimpinan yang dibentuk dalam kerangka kerja institusi-institusi dan organisasi-organisasi konvensional, yang menjamin seorang pemegang kekuasaan untuk melayani. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama besar Iran, Imam Khomeini dalam Hakeem, beliau menyatakan bahwa, “kaum perempuan harus ikut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial-politik bersama kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan dari kedua fungsi gender dalam keikutsertaan menentukan nasib masa depan suatu bangsa, karena nasib suatu bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyatnya.¹⁰⁹ Meskipun begitu, dewasa ini kita masih banyak menemukan sebuah pandangan yang dipegang oleh sebagian masyarakat tentang pelarangan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut, dengan membatasi peran perempuan hanya dalam lingkungan keluarga dan pendidikan anak.

¹⁰⁹Hakim, et al, *Islam and Fenisism...*, 129-132.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 2,1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana penelitian pada umumnya, metode penelitian merupakan bagian inti dalam sebuah penelitian, karena akan berdampak signifikan bagi proses penelitian. Bab ketiga ini dirancang peneliti untuk menjalankan langkah-langkah penting dalam sebuah metode penelitian. Berikut adalah topik-topik yang termasuk bagian dari prosedur penelitian, diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan penelitian yang berbentuk *Qualitative Descriptive*. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menyajikan datanya secara teliti atau seksama sebagaimana sifat alamiah itu sendiri.¹¹⁰ Sedangkan pendekatan kualitatif, adalah sebuah penelitian yang tidak hanya menyajikan data secara umum, tapi juga fokus pada kedalaman informasi untuk sampai pada makna yang sesungguhnya.¹¹¹ Kekualitatifan penelitian ini, juga karena datanya bukan berbentuk angka, tetapi berupa kata-kata, gambar, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang objektif, cermat, sistematis, serta jelas terkait dengan sumber data.¹¹²

¹¹⁰Fatimah Djajasudarma, *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian* (Cet-II; Refika Aditama: Bandung, 2006), 16.

¹¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2010), 8

¹¹²I Nyoman Payuyasa, “Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV”. *Segara Widya*, 5 (November: 2017), 15.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji secara mendalam bagaimana media massa, khususnya media daring Republika melalui bahasanya yang ideologis memberitakan isu pemimpin perempuan di ranah publik, terutama perempuan muslimah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, objektif serta sistematis, jenis penelitian yang digunakan di sini adalah analisis *framing*, terutama teknik yang diperkenalkan oleh Robert N. Entman.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan satu diantara kunci utama dari sebuah penelitian. Kelengkapan sumber data mempengaruhi kelancaran pada proses penelitian. Sebaliknya, data yang tidak lengkap akan menyulitkan peneliti dalam mengolahnya. Yang dimaksud dengan data dalam sebuah penelitian adalah catatan atau kumpulan fakta. Data bisa berupa angka, kata-kata dan lain sebagainya.¹¹³ Dan judul penelitian dalam konteks tesis ini adalah “Isu Pemimpinan Perempuan Muslimah di Media Daring Republika”. Ada dua macam sumber data yang dipakai dalam penelitian tesis ini, diantaranya: sumber primer dan sumber sekunder.¹¹⁴

Pertama, sumber primer. Sumber data utama ini memuat beberapa informasi terkait permasalahan yang dikaji atau sumber data yang langsung memberi informasi pada peneliti (pengumpul data). Dalam konteks tesis ini, sumber data utamanya adalah bahasa atau kata-kata yang digunakan media daring

¹¹³Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2012),73.

¹¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 83.

Republika dalam menyajikan berita yang berkaitan dengan pemimpin perempuan muslim di wilayah publik.

Kedua, sumber sekundernya, pada sumber kedua ini memuat beberapa data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bisa dijadikan sebagai penguat dari data utama, sumber data tersebut mampu memberikan informasi (data) secara tidak langsung pada pengumpul data, biasanya diperoleh dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan majalah yang membahas tentang pemimpin perempuan atau keterlibatan perempuan di ranah publik ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya budaya dan agama, selain itu juga pembahasan tentang media massa terutama media daring (online), dan tak luput juga kajian tentang analisis *framing*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, terdapat metode-metode yang lazim dipakai, diantaranya: metode simak dan metode cakap, lebih khusus dalam penelitian ini, peneliti memakai metode simak.

Disebut dengan metode simak karena cara yang dipakai dalam menghasilkan data adalah dengan menyimak (memperhatikan dengan seksama) penggunaan bahasa. Metode simak ini memiliki teknik dasar yang berbentuk teknik sadap, karena sebenarnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Dalam usaha mendapatkan data, penelitian ini dilakukan dengan cara menyadap

penggunaan bahasa seseorang baik yang berbentuk lisan maupun tulisan.¹¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menyadap atau menyimak penggunaan bahasa secara tertulis yang digunakan media daring Republika dalam memberitakan isu perempuan terutama pembahasan tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Disini, peneliti akan memakai teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat dalam proses pengumpulan datanya.¹¹⁶ Berikut penjelasannya:

1. Teknik Simak Bebas Libat Cakap

Penelitian dengan teknik ini tidak ikut melibatkan peneliti secara langsung di lapangan.¹¹⁷ Maksudnya, peneliti hanya menjadi pengamat atau penyimak dalam suatu percakapan atau tulisan yang digunakan media daring Republika. Dengan kata lain, peneliti hanya menyimak dialog atau tulisan dari sumber informannya, yang dalam konteks ini sumber informannya adalah portal Republika online.

2. Teknik Catat

Selanjutnya adalah teknik catat atau *taking note method*. Teknik kedua ini sangat fleksibel,¹¹⁸ karena bisa digunakan bersama-sama dengan teknik-teknik sebelumnya, dengan catatan data yang tersedia berupa bahasa lisan. Namun, jika data yang tersedia berupa tulisan, maka peneliti bisa memakai teknik catat sebagai pasangan teknik simak bebas libat cakap, disini peneliti akan mencoba menganalisis posisi aktor (subyek dan obyek)

¹¹⁵Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 90-91.

¹¹⁶Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, 91.

¹¹⁷Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 208.

¹¹⁸Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, 211.

dan juga posisi pembaca dalam teks berita yang ditampilkan oleh media daring Republika.¹¹⁹

D. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam konteks ini, peneliti memakai metode Analisis *Framing* Robert N. Entman. Analisis *Framing* Entman ini menunjukkan bagaimana proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari sebuah realitas. Analisis *framing* ini, menempatkan informasi dalam suatu konteks tertentu, kemudian menjadikan isu tersebut mendapatkan porsi lebih dibanding isu lainnya, dari sini, peneliti juga akan mengetahui apa sudut pandang yang dipilih wartawan atau media massa dalam menyeleksi dan menonjolkan isu tertentu.

Menurut Robert N. Entman ada empat teknik yang harus diperhatikan ketika sedang menganalisis *framing*, diantaranya:

1. *Problem Identification (Identifikasi masalah)*

Bagaimana suatu peristiwa/berita dipandang? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?

2. *Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)*

Peristiwa itu dipandang disebabkan oleh apa? Apa yang bisa dianggap menjadi penyebab dari suatu masalah? Atau siapa yang dianggap menjadi penyebab (aktor) dari suatu peristiwa?

¹¹⁹Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, 92.

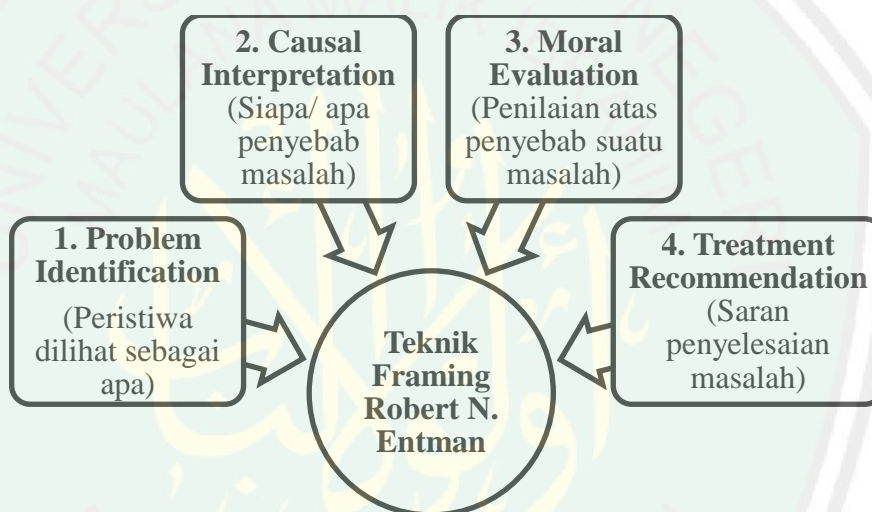
3. *Moral Evaluation (Evaluasi Moral)*

Nilai moral apa yang ditampilkan dalam menjelaskan masalah?

Nilai moral apa yang ditampilkan ketika menghukumi atau mendelegitimasi sebuah tindakan?

4. *Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)*

Solusi apa yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi suatu masalah?



Gambar 3, 1 Teknik *Framing* Robert N. Entman

Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.¹²⁰ *Framing* disini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan media massa ketika menyeleksi isu (memilih fakta/berita) dan menonjolkan isu (menulis fakta/berita). Dengan cara pandang yang seperti itu pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang

¹²⁰Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Cet.I; Yogyakarta: Lkis, 2004), 186.

ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.¹²¹ Atau bisa juga mendefinisikan *framing* sebagai sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/ peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat khalayak.¹²²

Berdasarkan alasan di atas, maka dalam konteks penelitian ini, analisis *framing* Entman digunakan untuk mengetahui: *pertama*, bagaimana media daring Republika dalam menyeleksi isu (memilih fakta), terutama yang berkaitan dengan isu pemimpin perempuan? Hal tersebut dapat dijelaskan dengan empat skema Entman di atas. *Kedua*, bagaimana cara media daring Republika dalam menulis fakta (menonjolkan isu) terutama yang berkaitan dengan isu pemimpin perempuan? Berikut ini, akan dipaparkan judul-judul berita yang dipublikasikan media daring Republika terkait “pemimpin perempuan di ranah publik”.

E. Langkah-Langkah Analisis Data

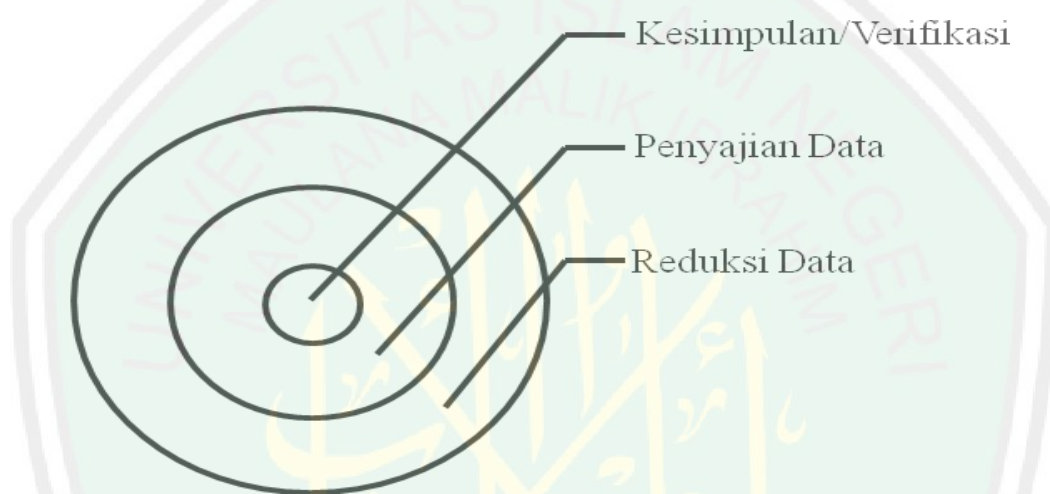
Dalam menjalankan tahap Analisis data sesuai dengan teori *framing* Robert N. Entman di atas, peneliti mengikuti langkah-langkah sesuai dengan metode interaktif (*interactive model*) yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman.

¹²¹Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*, (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004), 162.

¹²²Eriyanto, *Analisi Framing*, 66-67.

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan, bahwa proses dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan terus berlangsung sampai tuntas (sampai datanya jenuh). Diantara aktivitas pada analisis data secara interaktif adalah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*).¹²³

Berikut pemaparannya:



Gambar 3, 2 Analisis Interaktif Miles dan Huberman

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)¹²⁴

Mereduksi disebut juga dengan menyeleksi berbagai hal pokok dari sebuah sumber penelitian, kemudian dicari pola tertentu yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

Data yang didapat dari lapangan dalam konteks penelitian ini berupa berita-berita tentang kepemimpinan perempuan muslimah di ranah publik dan bagaimana media daring Republika menyajikannya dari sudut

¹²³Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

¹²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247-249.

pandangan hukum agama Islam. Dari sini, maka perlu dikumpulkan kemudian dicatat secara cermat dan detil. Semakin peneliti fokus dan teliti dalam mencari data, jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak dan kompleks. Dengan begitu, perlu segera dijalankan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)¹²⁵

Langkah selanjutnya setelah melalui tahap reduksi data adalah penyajian data. Dalam konteks ini, data disajikan dalam bentuk pemaparan singkat, dan hubungan antar kategori-kategori. Akan tetapi, diantara semuanya peneliti memilih menyajikan datanya dalam bentuk teks, lebih khusus berbentuk naratif.

3. Kesimpulan/Verifikasi (*Concluding Drawing/Verification*)¹²⁶

Langkah terakhir pada aktivitas analisis interaktif di sini adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disini bersifat dinamis dan sementara, karena akan berubah seiring ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung penelitian. Temuan pada penelitian ini bisa berbentuk deskripsi atau gambar suatu obyek tertentu.

¹²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

¹²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252-253.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Di antara sekian banyak isu gender (permasalahan gender) yang berkembang di masyarakat, isu tentang “pemimpin perempuan di ranah publik” menjadi salah satu isu yang masih terus menghadapi halangan-halangan yang serius, diantaranya dari pandangan keagamaan. Sehingga, sampai hari ini selalu saja pendapat *mainstream* yang dipakai untuk menafsirkan al-Qur’an ataupun hadis, dan adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi *kemudharatan*.

Jika dilihat dengan benar pada ayat-ayat al-Quran, ternyata ide egalitarianisme, kemanusiaan, dan kesejahteraan sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Apabila kita merujuk kepada al-Qur’an dengan cermat banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT adalah setara. Namun, realitanya sampai sekarang ide-ide egalitarian dalam al-Qur’an dan hadist-hadist nabi SAW masih sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias, dengan memposisikan perempuan sebagai *the second class*.

Dalam konteks media massa, lebih khusus media daring Republika, isu “pemimpin perempuan di ranah publik” nampaknya menjadi salah satu topik

pemberitaan yang mendapat perhatian lebih, terlihat dari seringnya media daring Republika memunculkan isu tersebut dalam pemberitaannya. Dalam memberitakan isu tersebut, Republika menyajikannya dalam berbagai rubrik, di antaranya: dalam kategori berita harian, kolom, koran, khazanah, dan juga selarung. Hal tersebut, tidak terlepas dari latar belakang media massa Republika, yang merupakan salah satu media terbesar di Indonesia dengan jumlah pembaca yang mayoritas muslim, sehingga muncul sebutan sebagai “koran hijau atau koran komunitas Islam”.

Oleh karena itu tidak mengherankan isu “pemimpin perempuan di ranah publik” menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh media Republika, karena sebagaimana penjelasan di atas, bahwa isu “pemimpin perempuan di ranah publik” dengan berbagai pro-kontranya merupakan hal yang akan selalu menarik dan aktual untuk dikaji, terutama ummat muslim, karena isu tersebut telah menjadi sebuah perdebatan dari awal diutusnya Rasulullah SAW sampai saat ini. Bahkan, bisa jadi sampai akhir zaman. Perdebatan tersebut berangkat dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat nabi, Abu Bakrah perihal “kehancuran Negara Persia setelah diangkatnya putri Raja Kisra sebagai pemimpin negara”, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهِيْمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Haitsam] Telah menceritakan kepada kami [Auf] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, - yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhari. No. 4073).”

Dan dalil al-Quran surat an-Nisa' ayat 34, sebagai penguat atas penolakan mereka atas kepemimpinan perempuan, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Di bawah ini peneliti akan mencoba menganalisis berita-berita yang dipublikasikan media daring Republika terutama yang mengkaji tentang isu gender, lebih khusus “pemimpin perempuan di ranah publik”. Di sini peneliti akan mencoba melihat bagaimana atau dengan cara apa media daring Republika membingkai isu gender –yang sampai saat ini menjadi perdebatan, terutama dari kalangan agamawan– tersebut. Untuk itu, peneliti akan mencoba menganalisisnya dengan analisis *framing* model Robert N. Entman. Dengan harapan mengetahui bagaimana cara pandang atau prespektif yang digunakan oleh media daring Republika dalam memandang isu tersebut.

Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.¹²⁷ *Framing* disini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan media massa ketika menyeleksi isu (memilih fakta/berita) dan menonjolkan isu (menulis fakta/berita). Dengan cara pandang yang seperti itu pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.¹²⁸ Atau bisa juga mendefinisikan *framing* sebagai sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu atau menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/ peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat khalayak.¹²⁹

Berdasarkan alasan di atas, maka dalam konteks penelitian ini, analisis *framing* Entman digunakan untuk mengetahui: *pertama*, bagaimana media daring Republika dalam menyeleksi isu (memilih fakta), terutama yang berkaitan dengan isu pemimpin perempuan? Hal tersebut dapat dijelaskan dengan empat skema Entman di atas. *Kedua*, bagaimana cara media daring Republika dalam menulis fakta (menonjolkan isu) terutama yang berkaitan dengan isu kepemimpinan

¹²⁷Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Cet.I; Yogyakarta: Lkis, 2004), 186.

¹²⁸Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analalisis Semiotika, dan Analisis Framing*, (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004), 162.

¹²⁹Eriyanto, *Analisi Framing*, 66-67.

perempuan? Berikut ini, akan dipaparkan judul-judul berita yang dipublikasikan media daring Republika terkait “pemimpin perempuan di ranah publik”.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Judul-judul Berita “pemimpin perempuan di ranah publik” yang dipublikasikan media daring Republika.

NO	WAKTU PUBLIKASI	JUDUL
1	Jumat, 07 Des 2012 (Khazanah)	Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?
2	Selasa, 19 Feb 2013 (Berita Nasional)	Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan
3	Kamis, 19 Juni 2014 (Koran)	Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh
4	Jumat, 19 Des 2014 (Koran)	Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?
5	Selasa, 22 Sep 2015 (Kolom)	Kepemimpinan Perempuan
6	Jumat, 16 Okt 2015 (Khazanah)	Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan
7	Senin, 03 Apr 2017 (Selarung)	Akhir Masa Para Sultanah
8	Selasa, 30 Mei 2017 (Berita Nasional)	Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada
9	Senin, 28 Aug 2017 (Kolom)	Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga
10	Selasa, 19 Sep 2017 (Berita Pendidikan)	UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan
11	Sabtu, 06 Jan 2018 (Khazanah)	Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?

A. Analisis Seleksi Isu pada Berita yang Berhubungan dengan “Pemimpin Perempuan” di Media Daring Republika

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang

diwacanakan.¹³⁰ Dalam mendefinisikan peristiwa/isu tertentu, Entman menyebut ada empat cara yang sering dilakukan oleh media. Keempat cara itu merupakan strategi media, dan membawa konsekuensi tertentu atas realitas yang terbentuk oleh media.¹³¹ Di antaranya: a. *Define Problems*, b. *Diagnose Causes*, c. *Make Moral Judgement*, d. *Treatment Recommendation*.

Berita I: Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?

Tabel 4.1.2. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Khazanah
<i>Headline</i>	Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?
<i>Dateline</i>	Jumat 07 Sep 2012 15:40 WIB
<i>Byline</i>	Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad

Pada artikel *pertama* ini, media daring Republika mengkaji bagaimana hukum Islam menanggapi tentang isu gender, terutama tentang kepemimpinan perempuan. Artikel dengan judul **Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?**¹³² ini, oleh Republika dipublikasikan menjadi tiga bagian. Inti ketiga bagian tersebut berisi tentang penolakan para ulama terkait “kepemimpinan perempuan”, lengkap dengan dasar hukum dari hadits yang dikuatkan dengan dalil al-Quran. Selain itu, juga berisi tanggapan ulama terkait hadits (dalil) yang diajukan oleh pembela emansipasi wanita. Tidak tanggung-tanggung, tanggapan tersebut diulas oleh para ulama sampai dua bagian terakhir. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media

¹³⁰Eriyanto, *Analisi Framing*, 188.

¹³¹Eriyanto, *Analisi Framing*, 197-198.

¹³²Chairul Akhmad, “Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?,” Republika, Jumat, 07 September 2012, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/09/09/m9z1fu-bolehkah-wanita-menjadi-pemimpin>, diakses tanggal 21 November 2019.

daring Republika membingkai hukum pemimpin perempuan menurut para ulama dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Dalam berita ini, Frame yang dikembangkan Republika adalah hukum perempuan yang menjadi pemimpin di wilayah publik dalam pandangan agama Islam menurut sebagian kelompok. Hal tersebut terlihat dari: *pertama*, dalam penyajian beritanya, Republika menyajikan pendapat dari satu kelompok, lebih khusus kelompok syiah terkait isu gender tersebut. Di sana dipaparkan dengan jelas bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di wilayah publik.

Kedua, isu gender ini ditempatkan oleh Republika di rubrik Khazanah, di mana dalam rubrik ini khusus menyajikan isu-isu atau tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan Agama Islam. Dengan menempatkan tulisan ini di rubrik khazanah, secara tidak langsung sudah mengkategorikan isu kepemimpinan perempuan ini masuk ke wilayah hukum Agama Islam. *Ketiga*, sebagai konsekuensi mengkategorikan isu ini ke dalam wilayah hukum Agama Islam, sumber-sumber yang dikutip berkaitan dengan Agama Islam, misalnya bersumber dari al-Quran, hadits, kutipan dari tokoh Agama Islam, yaitu Syekh Yusuf Qardhawi (seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia juga dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini.).¹³³

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan tulisan yang dipublikasikan Republika di atas, yang dianggap menjadi pangkal perdebatan utama dilarangnya

¹³³Akhmad, "Bolehkah ...?," Republika, Jumat, 07 September 2012.

perempuan menjadi pemimpin adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ¹³⁴

“Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.”¹³⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dari ‘Usman bin al-Haisam, dari ‘Auf, dari al-Hasan dari Abu Bakrah di atas merupakan sistem periwayatan yang muttasil, karena mata rantai antara perawi satu dengan yang lainnya bersambung dan tidak terputus sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga hadits ini termasuk hadits marfu’.¹³⁶ Dengan melihat pada pemahaman tekstual hadits di atas memang sudah jelas disebutkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi, akan berbeda jika kita melihat dari sisi pemahaman kontekstualnya, misalnya melalui pendekatan historis (*asbabul wurud*) hadis yang dimaksud tersebut, berkenaan dengan kepemimpinan putri Kisra, penguasa Persia yang saat itu menjabat sebagai kepala negara.¹³⁷ Hadits di atas memberikan gambaran bahwa pada saat itu, kualitas perempuan pada umumnya masih kurang berpendidikan, hal tersebut tidak lepas dari kondisi budaya dan sosial masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga (domestik), yang tidak diperkenankan terlibat di

¹³⁴HR. Bukhari. No. 4073.

¹³⁵Akhmad, “Bolehkah ...?,” *Republika*, Jumat, 07 September 2012.

¹³⁶Sulaemang L. “Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum”, (*Al-Munzir* Vol. 8, No. 1, Mei 2015), 117.

¹³⁷Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 133.

wilayah publik, bahkan menuntut ilmu. Namun, seiring berjalannya waktu kondisi tersebut telah berubah, saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki tingkat intelektualitas yang lebih tinggi dibanding laki-laki.¹³⁸

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hadits tersebut sudah tidak relevan dan juga tidak bisa dijadikan alat guna melarang perempuan aktif di dunia publik, bahkan sebagai dasar hukum dilarangnya perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik, karena sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada era ini sudah banyak perempuan yang memiliki kemampuan hebat sama bahkan juga melebihi laki-laki, yang memang belum ada pada zaman dahulu.

Make Moral Judgement: Untuk melegitimasi tindakan pada isu gender di atas, penilaian moral yang disajikan lebih dominan mengarah kepada para pembela emansipasi wanita yang menolak hadits Abu Bakrah di atas, dalam tulisan di atas mereka dikategorikan sebagai orang yang punya kepentingan-kepentingan politis, bodoh, dan juga mendahulukan hawa nafsu.¹³⁹ Inti dari tulisan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang diperjuangkan para perempuan (pembela emansipasi perempuan) selama ini itu salah, bahkan menurut tulisan di atas hal seperti itu bertentangan dengan ajaran agama, terutama Agama Islam.

Treatment Recommendation: Dalam pemberitaannya, media daring Republika menyajikan pendapat ulama yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin di wilayah publik, hal tersebut terlihat dari argumen yang

¹³⁸Sulaemang L. "Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum", (Al-Munzir Vol. 8, No. 1, Mei 2015), 123.

¹³⁹Akhmad, "Bolehkah ...?," Republika, Jumat, 07 September 2012.

menyebutkan bahwa, “para ulama di semua negara Islam sepakat telah menerima hadits Abu Bakrah, yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.” Dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum.¹⁴⁰

Tabel 4.1.3. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita I; Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Hukum perempuan yang menjadi pemimpin di wilayah publik dalam pandangan agama Islam menurut sebagian kelompok
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Hadits sahih yang diriwayatkan Abu Bakrah
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	- Orang yang membela emansipasi wanita dikategorikan sebagai orang yang punya kepentingan-kepentingan politis, bodoh, dan mendahulukan hawa nafsu.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum

Berita II: Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan

Tabel. 4.1.4. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Berita nasional
<i>Headline</i>	Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan
<i>Dateline</i>	Selasa 19 Feb 2013 16:43 WIB
<i>Byline</i>	Rep: M Akbar/ Red: Hazliansyah

¹⁴⁰Akhmad, “Bolehkah ...?,” *Republika*, Jumat, 07 September 2012.

Pada berita *kedua* ini, media daring Republika menjelaskan tentang kegiatan diskusi yang diadakan oleh Baitul Muslimin dengan mengangkat tema “kepemimpinan perempuan”. Berita dengan judul **Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan**¹⁴¹ ini, diadakan dengan tujuan untuk menelaah lebih jauh hak perempuan sebagai manusia sekaligus juga proses mendidik masyarakat agar lebih memberi ruang kepada para perempuan dalam berperan di segenap aspek kehidupan. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media daring Republika meringkas berita di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan Republika pada isu “kepemimpinan perempuan” di atas masuk dalam kategori hak politik perempuan. Hal tersebut terlihat pada *lead* (teras berita) yang memaparkan bahwa perempuan memiliki hak sebagai manusia, yakni ikut berperan aktif di segenap aspek kehidupan, kemudian dilanjutkan pada *body* (tubuh berita) terkait hak perempuan untuk ikut bergerak dalam politik. Berita di atas di masukkan oleh Republika di rubrik berita nasional. Alasan *pertama*, berita di atas ditujukan untuk semua perempuan Indonesia, bahwasannya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana laki-laki dalam hal berpolitik. *Kedua*, meski yang mengadakan kegiatan diskusi tersebut adalah organisasi Islam; Baitul Muslimin Indonesia, namun yang dimaksud dalam diskusi tersebut tidak hanya berlaku bagi perempuan muslim

¹⁴¹Hazliansyah. “Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 19 Februari 2013, 16:43 WIB. Lihat pada <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawabaratnasional/13/02/19/migocn-baitul-muslimin-indonesia-gelar-diskusikepemimpinanperempuan>, diakses tanggal 21 November 2019.

saja, tapi bagi semua perempuan Indonesia, hal ini diperkuat dengan diundangnya pendeta Supriatno sebagai perwakilan dari gereja Sinode GKP.¹⁴²

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan berita Republika di atas, yang dianggap menjadi alasan utama diadakannya diskusi “kepemimpinan perempuan” oleh Baitul Muslimin Indonesia adalah masih kurang ramahnya dunia publik, lebih khusus dunia politik pada perempuan yang aktif di gerakan politik. Selain itu, yang menjadi masalah utama sampai saat ini adalah kurangnya keinginan dan rasa percaya diri dari diri perempuan itu sendiri untuk terlibat aktif dalam gerakan politik.

Make Moral Judgement: Diadakannya diskusi oleh Baitul Muslimin Indonesia tersebut bertujuan untuk menelaah lebih jauh hak perempuan sebagai manusia sekaligus juga proses pendidikan masyarakat untuk memberi ruang kepada perempuan dalam berperan di segenap aspek kehidupan.¹⁴³

Treatment Recommendation: Diadakannya diskusi oleh Baitul Muslimin Indonesia di atas bisa menjadi salah satu instrumen penggerak gerakan politik bagi perempuan Indonesia, dan akhirnya menumbuhkan rasa kepercayaan diri, sehingga mau ikut terlibat aktif dalam upaya melakukan upaya perubahan Indonesia yang lebih baik.¹⁴⁴

Tabel 4.1.5. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita II; Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan

¹⁴²Hazliansyah. “Baitul Muslimin Indonesia ...” Republika, Selasa, 19 Februari 2013.

¹⁴³Hazliansyah. “Baitul Muslimin Indonesia ...” Republika, Selasa, 19 Februari 2013.

¹⁴⁴Hazliansyah. “Baitul Muslimin Indonesia ...” Republika, Selasa, 19 Februari 2013.

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah hak politik perempuan
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Kurang ramahnya dunia publik, lebih khusus politik kepada perempuan. Selain itu, kurangnya rasa percaya diri dari diri perempuan itu sendiri.
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Diskusi yang diadakan Baitul Muslimin bertujuan memberi ruang kepada perempuan dalam berperan di segenap aspek kehidupan
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Diskusi oleh Baitul Muslimin Indonesia di atas bisa menjadi salah satu instrumen penggerak gerakan politik bagi perempuan Indonesia

Berita III: Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh

Tabel 4.1.6. Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Koran
<i>Headline</i>	Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh
<i>Dateline</i>	Kamis 19 Jun 2014 12:00 WIB
<i>Byline</i>	Tiar Anwar Bachtia r (Dosen Sejarah Islam pada STAI Persis Garu)

Pada berita *ketiga* dengan judul **Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh**¹⁴⁵ ini, media daring Republika menyajikan salah satu ijtihad yang dilakukan ulama, lebih khusus ulama Aceh terkait pengangkatan Ratu Safiatuddin putri raja legendaris, Iskandar Muda sekaligus istri dari raja Iskandar Sani menjadi sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam setelah suaminya mangkat. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media daring Republika membingkai berita di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dibangun Republika di atas menyajikan salah satu ijtihad yang dilakukan ulama, lebih khusus ulama Aceh terkait

¹⁴⁵Tiar Anwar Bachtia r, "Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh" Republika, Kamis, 19 Juni 2014, 12:00 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/01/n7egk510-ijtihad-ulama-untuk-pemimpin-perempuan-pertama-aceh>, diakses tanggal 21 November 2019.

pengangkatan Ratu Safiatuddin putri raja legendaris, Iskandar Muda sekaligus istri dari raja Iskandar Sani menjadi sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam setelah suaminya mangkat.

Pengangkatan Sultanah Safiatuddin sebagai ratu di Kerajaan Aceh Darussalam tidak semudah pengangkatan seorang raja atau sultan sebagaimana biasanya (penuh dengan pro dan kontra, terutama dari kalangan ulama Aceh). Lagi-lagi permasalahan yang dijadikan sebagai alasan utama adalah karena statusnya sebagai “perempuan”. Namun, karena kemampuan dan kecakapan yang dimiliki sultanah satu ini sangat baik, maka stereotipe-stereotipe yang selama ini dilekatkan pada perempuan, bahwa perempuan tidak layak bahkan tidak mampu menjadi pemimpin (dengan memosisikan perempuan sebagai *the second class*) terbantahkan dengan sendirinya. Hal tersebut terlihat dari salah satu kutipan berita di atas:¹⁴⁶

“Selain memiliki kecakapan dari segi agama dan ilmu pengetahuan untuk mengelola negara, ia adalah anak dan istri raja, sehingga akan sangat memahami bagaimana kerajaan dikelola.”

Diagnose Causes: Keseluruhan berita di atas, menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan ulama Aceh ketika mengangkat Safituddin sebagai ratu di Kerajaan Darussalam Aceh. Banyak ditemukan perbedaan pendapat terkait

¹⁴⁶Bachtiar, “Ijtihad Ulama ...” *Republika*, Kamis, 19 Juni 2014.

masalah tersebut, terutama berasal dari ulama fikih yang melarang “perempuan” menjadi pemimpin, terutama pemimpin kerajaan.¹⁴⁷

Make Moral Judgement: Frame Sultanah Safiatuddin dalam berita di atas digambarkan sebagai sosok perempuan yang mampu dan layak menjadi seorang pemimpin atau sultanah di sebuah kerajaan, tidak tanggung-tanggung sebuah kerajaan terbesar dalam sejarah wilayah di utara Pulau Sumatra, Kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah Safituddin digambarkan sebagai sosok perempuan yang amanah, adil, dan memiliki keluasan ilmu yang memungkinkannya duduk sebagai ratu, selain itu ia juga memiliki kecakapan dari segi agama serta ilmu pengetahuan untuk mengelola negara.

Treatment Recommendation: Meski dalam pengangkatan Safiatuddin sebagai ratu di Kerajaan Aceh Darussalam mendapat penolakan dari beberapa ulama fikih, dikarenakan statusnya sebagai “perempuan”. Namun ijtihad ulama secara hati-hati untuk mengangkatnya sebagai ratu ternyata berbuah kebaikan bagi masyarakat Aceh.¹⁴⁸

Tabel 4.1.7. Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita III; Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Ijtihad ulama Aceh perihal pengangkatan Safiatuddin sebagai pemimpin Aceh
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Status Safiatuddin sebagai “perempuan”
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Safiatuddin merupakan sosok yang amanah, adil, dan memiliki keluasan ilmu yang memungkinkannya duduk sebagai ratu
<i>Treatment Recommendation</i>	Ijtihad ulama dalam mengangkat Safiatuddin sebagai sultanah berbuah kebaikan bagi Aceh

¹⁴⁷Bachtiar, “Ijtihad Ulama ...” *Republika*, Kamis, 19 Juni 2014.

¹⁴⁸Bachtiar, “Ijtihad Ulama ...” *Republika*, Kamis, 19 Juni 2014.

(Penyelesaian)	
----------------	--

Berita IV: Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?

Tabel 4.1.8. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Koran
<i>Headline</i>	Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?
<i>Dateline</i>	Jumat 19 Dec 2014 13:55 WIB
<i>Byline</i>	Rep. Hafids Muftisany

Pada berita *keempat* ini, media daring Republika mengkaji bagaimana hukum Islam menanggapi tentang isu gender, terutama tentang kepemimpinan perempuan. Berita dengan judul **Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?**¹⁴⁹ ini, berusaha menggali lebih dalam apa yang menjadi penyebab perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, terutama dari sisi Agama Islam, misalnya dari hadits dan al-Quran, yang kemudian dikaji ulang –tanpa keluar dari koridor hukum Islam – agar sesuai dengan konteks zaman ini, hal ini selaras dengan tujuan Agama Islam yang *rahmat li allamin*. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana hukum kepemimpinan perempuan menurut para ulama dibingkai oleh media daring Republika dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Republika mengidentifikasi isu kepemimpinan perempuan di atas dalam koridor masalah hukum, terutama dalam hukum Agama Islam. Republika mengidentifikasi isu kepemimpinan perempuan dalam koridor masalah hukum. Artinya, segala hal yang berhubungan dengan permasalahan ini

¹⁴⁹Hafids Muftisany, “Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?,” Republika, Jumat, 19 Desember 2014, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz36-wanita-menduduki-jabatan-publik-bolehkah>, diakses tanggal 21 November 2019.

tidak disoroti dari segi politik, namun dari aspek hukum, lebih khusus lagi masuk kedalam koridor hukum Agama Islam. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa mengatakan bahwa bingkai hukum Agama Islam sebagai bingkai yang dominan dalam tulisan di atas. *Pertama*, Dimulai dengan penjelasan hadits yang dipaparkan oleh ulama fikih terkait larangan perempuan untuk menjadi pemimpin adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah¹⁵⁰, *kedua*, dalil al-Quran (surat an-Nisa ayat 34)¹⁵¹, *ketiga*, hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Ahkamul Fuqoha yang membahas khusus tentang hukum wanita menjadi kepala desa.¹⁵²

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan tulisan yang dipublikasikan Republika di atas, yang dianggap menjadi pangkal perdebatan utama dilarangnya perempuan menjadi pemimpin adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah¹⁵³, *kedua*, dalil al-Quran (surat an-Nisa ayat 34)¹⁵⁴. Ayat alquran tersebut, biasanya di gunakan oleh sebagian ulama untuk menguatkan pendapat mereka, serta hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, yang berbunyi –larangan bagi seorang perempuan untuk dicalonkan menjadi kepala desa kecuali dalam keadaan

¹⁵⁰ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.” HR. Bukhari. No. 4073.

¹⁵¹ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Al-Quran, an-Nisa’, 4: 34.

¹⁵²Muftisany, “Wanita ...?,” Republika, Jumat, 19 Desember 2014.

¹⁵³ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.” (HR. Bukhari. No. 4073).

¹⁵⁴ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Al-Quran, an-Nisa’ (4): 34).”

terpaksa. Seorang wanita juga tidak boleh menjadi hakim. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.—¹⁵⁵

Make Moral Judgement: Setelah penjelasan tentang boleh tidaknya hukum perempuan menjadi pemimpin dari sisi hukum Agama Islam (dari hadits, nash al-Quran, dan ijtihad ulama fikih), Republika sebagai media massa dengan missinya yang adil dan rahmat lil 'alamin mencoba menjelaskan latar belakang kenapa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Berikut kutipannya:¹⁵⁶

“Dari data sejarah didapat posisi wanita belum beruntung. Nabi SAW datang guna mengangkat derajat kaum wanita yang diperlakukan tak manusiawi di zaman jahiliyah. Dan beberapa abad setelah Nabi SAW pun, pendidikan bagi kaum wanita belum banyak maju. Artinya, larangan itu karena saat itu wanita dinilai belum mampu mengemban tanggung jawab kemasyarakatan. Mereka belum memiliki pengetahuan dan pengalaman.”

Treatment Recommendation: Republika memaparkan bahwa – saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan memiliki wawasan yang bagus terkait urusan masyarakat. Karena itu, boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan, hal tersebut dikuatkan dengan adanya dalil dari al-Quran surat an-Nahl ayat 97, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁵⁵Muftisany, “Wanita ...?,” Republika, Jumat, 19 Desember 2014.

¹⁵⁶Muftisany, “Wanita ...?,” Republika, Jumat, 19 Desember 2014.

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."¹⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka Allah akan memberikan pahala berupa kehidupan yang baik, dan pahala tersebut tidak hanya untuk kaum laki-laki tapi juga kaum perempuan. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Allah tidak pernah membedakan posisi antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.1.9. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita IV;Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah hukum Agama Islam
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	-Hadits yang berbunyi, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”. -Dalil al-Quran surat an-Nisa’ (4:34), yang berbunyi, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita...”. - Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Nabi SAW datang guna mengangkat derajat kaum wanita yang diperlakukan tak manusiawi di zaman jahiliyah
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Saat ini banyak wanita yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang masyarakat. Karena itu, boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan.

Berita V: Kepemimpinan Perempuan

Tabel 4.1.10. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Kolom
<i>Headline</i>	Kepemimpinan Perempuan
<i>Dateline</i>	Selasa 22 Sep 2015 20:16 WIB

¹⁵⁷Muftisany, “Wanita ...?,” Republika, Jumat, 19 Desember 2014.

<i>Byline</i>	Red: Nasih Nasrullah/ Penulis: Muhtar Sadili Syihabudin (Pengkaji Studi Islam)
---------------	---

Pada berita *kelima* dengan judul **Kepemimpinan Perempuan**¹⁵⁸ ini, media daring Republika menyajikan tulisan dari seorang wartawan senior yang sekaligus pengkaji studi Islam, Muhtar Sadili Syihabudin. Dalam rubrik kolom tersebut, Muhtar menunjukkan kepada khalayak umum, bahwa saat ini kehadiran perempuan dalam podium kekuasaan bukan barang baru, yang kemudian ia buktikan dengan menghadirkan contoh-contoh tokoh perempuan yang sukses memimpin negara atau wilayahnya. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana pembedaan pada tulisan kolom yang disajikan media daring Republika di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring Republika dalam tulisan dengan judul “kepemimpinan perempuan” di atas adalah keadilan gender. Maksudnya setiap orang; baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin asal memiliki kemampuan dan potensi untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut terlihat dari contoh-contoh kesuksesan pemimpin perempuan yang disajikan dalam pemberitaan di atas. Misalnya, kesuksesan Ratu Bilqis memimpin negara Yaman yang diabadikan dalam al-Quran, kemudian keberanian perdana menteri Inggris yang mendapat julukan “wanita besi”,

¹⁵⁸Muhtar Sadili Syihabuddin, “Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 22 September 2015, 20:16 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/15/09/22/nv2y71320-kepemimpinan-perempuan>, diakses tanggal 21 November 2019.

Margaret Teacher. Dan tidak ketinggalan Presiden pertama Negara Indonesia, Megawati Soekarno Putri.¹⁵⁹

Pemberitaan di atas dikategorikan media daring Republika ke dalam rubrik kolom. Meskipun kolom berisi opini dari seseorang dan bersifat subjektif, namun tidak setiap orang memiliki kemampuan menulis (jurnais) hingga akhirnya bisa dimuat oleh media massa, apalagi media massa seperti Republika yang merupakan salah satu media massa terbesar di Indonesia, tentunya tidak *sembarangan* memilih tulisan untuk dipublikasikannya. Salah satunya penulis kolom dengan judul “kepemimpinan perempuan” ini, Muhtar Sadili Syihabuddin, ia merupakan wartawan senior dan pengkaji studi islam.

Diagnose Causes: Banyaknya sosok perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada elemen pendefinisian masalah di atas. Dalam keseluruhan berita, sosok-sosok pemimpin perempuan tersebut diposisikan sebagai pelaku (aktor). Mereka diposisikan sebagai sebab yang bisa menjadikan masyarakat umum mau berpikir ulang terkait larangan perempuan menjadi pemimpin yang selama ini menjadi kepercayaan mereka, terutama masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkinya.

Make Moral Judgement: Frame sosok-sosok pemimpin perempuan yang dijadikan media daring sebagai aktor sebelumnya di dukung oleh klaim-klaim moral yang dilekatkan kepada mereka, Misalnya: Ratu Bilqis yang dibingkai sebagai Ratu yang memiliki kecakapan moral, intelektual yang cukup, dan berwawasan ke depan, sehingga mampu menangkap sinyal kemajuan untuk

¹⁵⁹Syihabuddin, “Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 22 September 2015.

menerima Tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Margaret Teacher yang dibingkai sebagai sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan tidak ketinggalan Megawati Soekarno Putri yang dibingkai sebagai sosok pemimpin yang pendiam namun mampu mengendalikan partai besar, seperti PDIP dalam waktu yang cukup lama.¹⁶⁰

Dalam tulisan kolom di atas juga disebutkan bahwa perempuan memiliki nilai sendiri yang membedakannya dari pada laki-laki dalam hal memimpin, berikut kutipannya:¹⁶¹

“Pesan dari semua kisah kepemimpinan perempuan hampir sama. Perpaduan lembut bicara dan cendrung hati-hati dalam memutuskan perkara. Sifat-sifat keibuan yang melekat pada pemimpin perempuan menjadi dominan dalam langkah kepemimpinannya. Perbedaan jelas dari kepemimpinan perempuan memunculkan rasa teduh dan terlindungi bagi rakyatnya.”

Treatment Recommendation: Secara tidak langsung, melalui tulisan kolomnis (penulis kolom) di atas, media daring Republika menyetujui pernyataan “pemimpin tidak mengenal jenis kelamin”. Karena baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Bahkan al-Quran sendiri juga menjelaskan bahwa kepemimpinan itu milik semua jenis kelamin. Sukses tidaknya suatu kepemimpinan dapat dilihat dari niat tulus dan kegigihannya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hal tersebut berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan.¹⁶²

¹⁶⁰Syihabuddin, “Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 22 September 2015.

¹⁶¹Syihabuddin, “Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 22 September 2015.

¹⁶²Syihabuddin, “Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 22 September 2015.

Tabel 4.1.11. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita V: Kepemimpinan Perempuan

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Keadilan gender
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Banyak tokoh-tokoh perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin, misalnya kisah kesuksesan Ratu Bilqis yang diabadikan Allah dalam al-Quran. Kemudian ada perdana menteri Inggris, Margare Teacher yang dijuluki sebagai “wanita besi”, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ia berhasil mencegah konflik berkepanjangan terutama di daerah Timur Tengah. Dan juga ada Presiden pertama negara ini, Negara Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri yang tercatat sebagai presiden sekaligus pimpinan partai yang dihormati sebagai tokoh nasional
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	<ul style="list-style-type: none"> - Perpaduan lembut bicara dan cendrung hati-hati dalam memutuskan perkara. - Sifat-sifat keibuan yang melekat pada pemimpin perempuan menjadi dominan dalam langkah kepemimpinannya. - Kepemimpinan perempuan memunculkan rasa teduh dan terlindungi bagi rakyatnya
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang untuk menjadi pemimpin. Karena al-Quran sendiri menjelaskan bahwa kepemimpinan itu milik semua jenis kelamin. Sukses tidaknya suatu kepemimpinan dapat dilihat dari niat tulus dan kegigihannya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hal tersebut berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan

Berita VI: Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan

Tabel 4.1.12. Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Khazanah
<i>Headline</i>	Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan
<i>Dateline</i>	Jumat 16 Oct 2015 19:02 WIB

<i>Byline</i>	Rep: Sri Handayani/ Red: Agung Sasongko
---------------	---

Pada tulisan *keenam* dengan judul **Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan**¹⁶³ ini, media daring Republika menyajikan sebuah kisah perjuangan seorang pemimpin perempuan berdiri di tengah-tengah masyarakat yang kental dengan ego dan budaya patriarkinya. Pemimpin perempuan tersebut adalah Radhiyatuddin; Sultanah Daulah Mamalik. Meski ia memiliki kemampuan yang menjadikannya layak sebagai pemimpin – kejernihan akal, pemberani, cerdas, menghafal al-Quran, bahkan menguasai ilmu fikih –, berbagai pemberontakan dan penolakan ia terima hanya karena statusnya sebagai “perempuan”. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana bingkai pada tulisan kolom yang disajikan media daring Republika di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring dalam kasus Sultanah Daulah Mamalik, Radhiyatuddin adalah korban ketidakadilan gender. Lebih tepatnya perjuangan seorang perempuan muslimah yang memperjuangkan haknya untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang kental akan ego patriarkinya. Meski memiliki –kejernihan akal, pemberani, cerdas, menghafal al-Quran, bahkan menguasai ilmu fikih–, Radhiyatuddin masih mendapat perlawanan karena statusnya sebagai “perempuan”. Ada beberapa hal kenapa kita bisa mengatakan bingkai korban ketidakadilan gender ini sebagai bingkai yang

¹⁶³Agung Sasongko, “Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan” Republika, Jumat, 16 Oktober 2015, 19:02 WIB. Lihat pada <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/nwbas6313/radhiyatuddin-muslimah-yang-bebaskan-mamalik-dari-keterpurukan>, diakses tanggal 21 November 2019.

dominan dalam artikel di atas. *Pertama*, karena alasan statusnya sebagai “perempuan”, ia didiskualifikasi sebagai calon pemimpin menggantikan ayahnya, Sultan at-Tamsy yang mangkat, meski memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. *Kedua*, Setelah ia berhasil menjadi pemimpin setelah kondisi kerajaan yang kritis akibat ketidakmampuan saudara laki-lakinya memimpin kerajaan, Radhiatuddin mendapat perlawanan dari para pejabat negara yang lagi-lagi karena alasan status Radhiatuddin sebagai seorang “perempuan”. *Ketiga*, Munculnya isu kepemimpinan perempuan yang menurut kepercayaan saat itu dilarang dalam Agama Islam.¹⁶⁴

Selain itu, artikel di atas dimasukkan oleh media daring Republika dalam rubrik khazanah, hal tersebut semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa isu gender, lebih khusus kepemimpinan perempuan, bukan hanya masalah gender sosial dan juga politik. Akan tetapi, juga berkaitan erat dengan hukum Agama Islam, lebih khusus kajian dalam hukum fiqih.

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan artikel di atas, Radhiatuddin lebih dominan diposisikan sebagai korban dari ego patriarki yang masih melekat erat di Daulah Mamalik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kendala-kendala yang dihadapi Radhiatuddin selama memimpin Daulah Mamalik, baik dari dalam maupun dari luar kerajaannya, hanya karena satu alasan yaitu status Radhiatuddin sebagai seorang “perempuan”. Meski dari awal Radhiatuddin memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik, menurut pembesarpembesar kerajaannya hal tersebut masih belum memenuhi syarat.

¹⁶⁴Sasongko, “Radhiatuddin...” Republika, Jumat, 16 Oktober 2015.

Make Moral Judgement: Frame Radhiyatuddin sebagai korban dari ego patriarki ini didukung oleh klaim-klaim moral yang sekaligus menunjukkan kegigihannya membebaskan Mamalik dari keterpurukan. Berikut kutipannya:¹⁶⁵

“Radhiyatuddin pantang menyerah. Ia berusaha mempengaruhi para anggota dewan dan meyakinkan mereka jika kepemimpinan seorang wanita tak masalah demi kemaslahatan. Ia berpenampilan gagah seperti laki-laki dan dengan tegas menghukum para pembangkang. Ia juga memimpin sendiri pasukan dengan mengendarai gajah.”

“Berkat kegigihannya, Radhiyatuddin mampu meredakan pemberontakan para anggota dewan. Kondisi keamanan negara perlahan semakin stabil. Perempuan ini banyak belajar dari ayahnya. Ia memimpin Delhi dengan adil dan bijaksana. Ia mulai mengatur urusan manajemen dan administrasi negara dengan baik. Ia dibantu seorang panglima yang hebat, Saifuddin Aibak.”

Treatment Recommendation: Atas semua peran dan perjuangan yang dilakukan Radhiyatuddin, memimpin dan melindungi kerajaannya dengan adil dan bijaksana tersebut, serta berkat kepiawaiannya, Daulah mamalik ini berhasil terbebas dari krisis akibat pemerintahan yang buruk.

Tabel 4.1.13. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita VI: Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Korban ketidakadilan gender
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Status Radhiyatuddin sebagai seorang perempuan, budaya patriarki yang melekat erat di Daulah Mamalik, diperkuat dengan adanya hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Radhiyatuddin memiliki kejernihan akal, pemberani, cerdas, dan juga menghafal al-Quran, serta menguasai ilmu fikih

¹⁶⁵Sasongko, “Radhiyatuddin...” Republika, Jumat, 16 Oktober 2015.

<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Radhiyatuddin sukses memimpin Daulah Mamalik dengan adil dan bijaksana. Berkat kepiawaiannya, daulah ini berhasil terbebas dari krisis akibat pemerintahan yang buruk
---	---

Berita VII: Akhir Para Sultanah

Tabel 4.1.14. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Selarung
<i>Headline</i>	Akhir Masa Para Sultanah
<i>Dateline</i>	Senin 03 Apr 2017 13:35 WIB
<i>Byline</i>	Red: Fitriyan Zamzami / Penulis: Fitriyan Zamzami (Wartawan Republika)

Pada tulisan *ketujuh* dengan judul **Akhir Masa Para Sultanah**¹⁶⁶ ini, media daring Republika menyajikan kisah perjuangan sultanah terakhir di Kerajaan Aceh, beliau adalah Sri Ratu Kamalatuddin Inayat Syah yang penuh dengan intrik dan rongrongan kekuasaan. Pemberontakan yang terjadi pada saat kesultanan Kamalatuddin ini selain disebabkan permasalahan gender, karena status Ratu sebagai “perempuan”, juga disebabkan dari sektor ekonomi atau perdagangan. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media daring membingkai berita di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring terkait pemberitaan di atas adalah masalah kekuasaan, lebih khusus kekuasaan para sultanah di Kesultanan Aceh. Hal tersebut terlihat pada, *pertama, lead* (teras berita) yang memaparkan bahwa –Pada tahun 1688, Kesultanan Aceh sudah 48 tahun dipimpin tiga sultanah secara berturut-turut– Setelah itu juga disebutkan

¹⁶⁶Fitriyan Zamzami, “Akhir Masa Para Sultanah” Republika, Senin, 03 April 2017, 13:35 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/onth0o393/akhir-masa-para-sultanah>, diakses tanggal 21 November 2019.

bahwa saat sultanah ketiga mangkat, mulai terdengar suara-suara yang menginginkan kembali berkuasanya pemimpin laki-laki. Namun pada saat itu seorang perempuan kembali terpilih menjadi sultanah, meski penuh dengan intrik dan rongrongan kekuasaan. *Kedua, body* (tubuh berita) yang menjelaskan dengan panjang lebar, bagaimana Sultanah Kamalatuddin mendapat tekanan dari para penguasa saat memimpin Daulah Mamalik.¹⁶⁷

Media daring Republika mengkategorikan berita di atas ke dalam rubrik selarung¹⁶⁸. Dengan tujuan ingin menunjukkan kepada khalayak, terutama khalayak Indonesia, bahwa sesungguhnya sudah pernah ada dalam sejarah Indonesia perempuan yang sukses menjadi seorang pemimpin atau sultanah, seperti yang tercatat dalam sejarah Kesultanan Aceh. Dalam berita di atas disebutkan bahwa –Pada tahun 1688, Kesultanan Aceh sudah 48 tahun dipimpin tiga sultanah secara berturut-turut.–¹⁶⁹

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan berita Republika, Sultanah Kamalatuddin diposisikan sebagai obyek (korban) dengan para penguasa yang yang memberontak kepada sultanah diposisikan sebagai subyek (pelaku). Dalam *body* (tubuh berita), media Republika memaparkan dengan panjang lebar pemberontakan-pemberontakan atau rongrongan kekuasaan yang ditemui sultanah

¹⁶⁷Fitriyan, “Akhir Masa Para Sultanah” Republika, Senin, 03 April 2017.

¹⁶⁸**selarung**/se-la-rung/ n jejak kaki binatang besar (babi, gajah, harimau, dan sebagainya) di hutan; denai. Lihat di <https://kbbi.web.id/selarung>. Nampaknya media Republika mengadopsi kata tersebut dalam rangka mengkategorikan berbagai macam berita yang berkaitan dengan jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan Negara Indonesia, salahsatunya kisah para pahlawan kemerdekaan. Hal tersebut terlihat dari judul-judul berita yang disajikan media daring Republika, misalnya: sejarah terbentuknya TNI dan alasan Soedirman jadi Panglima (Republika, 5 Oktober 2019), penghianatan Belanda di balik penangkapan Diponegoro (Republika, 26 Oktober 2019), gaung Pangeran Diponegoro tak mampu dipadamkan Belanda (Republika, 27 Oktober 2019), dan lain-lainnya.

¹⁶⁹Fitriyan Zamzami, “Akhir Masa Para Sultanah” Republika, Senin, 03 April 2017

selama menjadi pemimpin. Diantaranya: Ada kelompok di dalam kerajaan yang menolak kepemimpinan seorang ratu, kemudian muncul konspirasi berupa surat yang diduga berasal dari Makkah, yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan melanggar syariat Islam. Dan muncul pemberontakan dari daerah pegunungan Aceh yang dipimpin sebanyak empat ulebalang guna menggulingkan Ratu Kamalat.¹⁷⁰

Make Moral Judgement: Frame Sultanah Kamalatuddin sebagai korban yang sering mendapat rongrongan kekuasaan dari para penguasa di sekitar Kesultanan Aceh tersebut, didukung oleh klaim-klaim moral. sebagaimana pada kutipan berikut:¹⁷¹

“Legitimasi atas kekuasaan Kamalat kian lemah. Surat dari Makkah soal boleh tidaknya perempuan memimpin kembali ramai jadi pembicaraan dan akhirnya dirundingkan di Balai Majelis Mahkamah Rakyat pada 1699. Keputusan pun diambil, dan Kamalat akhirnya di makzulkan.”

Treatment Recommendation: Dengan semua intrik dan rongrongan kekuasaan yang menemani selama kepemimpinan sultanah, hal tersebut selain karena alasan gender, hukum Agama Islam, hal lain seperti perdagangan juga disinyalir menjadi penyebab banyak muncul pemberontakan-pemberontakan. Setelah pemaparan panjang lebar di atas, di akhir tulisannya media daring

¹⁷⁰Fitriyan Zamzami, “Akhir Masa Para Sultanah” *Republika*, Senin, 03 April 2017

¹⁷¹Fitriyan Zamzami, “Akhir Masa Para Sultanah” *Republika*, Senin, 03 April 2017

Republika menjelaskan bahwa Sultanah Kamalatuddin menjadi sultanah terakhir selama kejayaan Aceh.¹⁷²

Tabel 4.1.15. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita VII: Akhir Para Sultanah

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah kekuasaan
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Banyak muncul rongrongan kekuasaan kepada Sultanah Kamalatuddin selama memimpin
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Legitimasi atas kekuasaan Kamalat kian lemah. Surat dari Makkah soal boleh tidaknya perempuan memimpin kembali ramai jadi pembicaraan dan akhirnya dirundingkan di Balai Majelis Mahkamah Rakyat pada 1699. Keputusan pun diambil, dan Kamalat akhirnya di makzulkan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Ratu Kamalat Shah, adalah sultanah terakhir yang memimpin Kesultanan Aceh, sampai akhirnya takluk pada pada Belanda

Berita VIII: Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada

Tabel 4.1.16 Tabel Latar Belakang Masalah

<i>Breadcrumbs</i>	Berita Nasional
<i>Headline</i>	Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada
<i>Dateline</i>	Selasa 30 May 2017 06:58 WIB
<i>Byline</i>	Red: Bilal Ramadhan

Pada berita *kedelapan* dengan judul **Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada**¹⁷³ ini, media daring memberitakan tentang penolakan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat

¹⁷²Fitriyan Zamzami, "Akhir Masa Para Sultanah" Republika, Senin, 03 April 2017

¹⁷³Bilal Ramadhan, "Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada," Republika, Selasa 30 May 2017, 06:58 WIB. Lihat pada <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/30/oqgitw330-ini-alasan-13-ormas-islam-jabar-tolak-calon-perempuan-di-pilkada>, diakses tanggal 21 November 2019.

Peduli Jawa Barat (AMPJ) terkait keikutsertaan Netty Prasetiyani Heryawan sebagai salah satu kandidat calon kepala daerah Jawa Barat yang diusung Partai Keadilan Sejarah (PKS). Dengan menggunakan alasan agama dan gender para demonstran tersebut berusaha membatalkan pencalonan Netty di Pilkada Jabar. Berikut ini kita akan melihat bagaimana media daring Republika membingkai berita di atas dengan dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring Republika terkait kasus Pilkada Jabar di atas adalah masalah hukum, lebih khusus hukum Agama Islam dan juga mengangkat permasalahan gender. Dengan kata lain, segala hal yang berhubungan dengan kasus Pilkada Jabar ini disoroti Republika dari sisi hukum Agama Islam dan juga gender. Alasan kenapa bisa dikatakan bahwa bingkai hukum Agama Islam dan gender yang dominan dalam pemberitaan, terlihat pada *lead* (teras berita) yang langsung menghukumi kepemimpinan perempuan dari sisi hukum agama, berikut kutipannya:¹⁷⁴

“REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ) menolak kandidat Calon Gubernur Jabar 2018 perempuan yang diusung oleh partai politik karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.”¹⁷⁵

Selain dibingkai dengan hukum agama sebagaimana di atas, pada *body* (tubuh berita) terlihat beberapa kali kutipan yang terindikasi mengangkat isu gender, “Masih banyak kaum pria yang lebih sanggup memimpin 45 juta warga

¹⁷⁴Bilal, “... Tolak Calon Perempuan di Pilkada,” Republika, Selasa 30 May 2017.

¹⁷⁵Bilal, “... Tolak Calon Perempuan di Pilkada,” Republika, Selasa 30 May 2017.

Jawa Barat. "Ibaratnya memang apa enggak punya kader laki-laki? Provinsi Jawa Barat memiliki banyak tantangan dan permasalahan sehingga memerlukan pemimpin laki-laki yang dianggap lebih baik dibanding perempuan."¹⁷⁶

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan berita Repulika, keikutsertaan Netty Prasetiyani Heryawan sebagai salah satu kandidat calon kepala daerah Jawa Barat yang diusung Partai Keadilan Sejarah (PKS) dianggap sebagai penyebab tindakan penolakan dari sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ). Dalam berita ini, misalnya dari awal sampai akhir teks menjelaskan dengan panjang lebar kenapa pencalonan Netty di Pilkada Jabar memunculkan penolakan dari AMPJ.

Dalam berita tersebut HM Roinul Balad sebagai Ketua Presidium AMPJ menjelaskan alasan AMPJ menolak pencalonan Netty di Pilkada Jabar, selain mengangkat isu agama terkait hukum kepemimpinan perempuan, ia juga mengangkat isu gender. Berikut kutipannya:¹⁷⁷

"Atas dasar pandangan para ulama serta berbagai kajian secara mendalam di antara ormas-ormas Islam maka kami tidak sepakat dan secara tegas menolak kepemimpinan perempuan dalam prosesi Pilgub Jabar 2018," kata Ketua Presidium AMPJ HM Roinul Balad, di Bandung."

Kemudian disusul isu gender , –"Masih banyak kaum pria yang lebih sanggup memimpin 45 juta warga Jawa Barat. "Ibaratnya memang apa enggak punya kader laki-laki? – Provinsi Jawa Barat memiliki banyak tantangan dan

¹⁷⁶Bilal, "... Tolak Calon Perempuan di Pilkada," Republika, Selasa 30 May 2017.

¹⁷⁷Bilal, "... Tolak Calon Perempuan di Pilkada," Republika, Selasa 30 May 2017.

permasalahan sehingga memerlukan pemimpin laki-laki yang dianggap lebih baik dibanding perempuan.¹⁷⁸ Pernyataan ini menunjukkan, bahwa sampai saat ini pun perempuan masih dianggap lemah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan publik. Masih banyak yang meyakini, sekaligus melegitimasi kalau tempat yang cocok bagi perempuan hanyalah di dapur (domestik).

Make Moral Judgement: Penilaian atas Netty Prasetiyani Heryawan sebagai sumber masalah ini datang dari dua hal yang sama-sama negatif terhadap Netty. Penilaian moral yang dikenakan pada Netty ini menekankan bahwa keikutsertaannya sebagai salah satu kandidat calon kepala daerah Jawa Barat adalah tindakan yang salah dan dilarang oleh Agama Islam, selain itu karena statusnya sebagai perempuan muncul berbagai macam stereotipe. Dengan alasan untuk kebaikan Provinsi Jawa Barat, salah satu perwakilan Ormas AMPJ yang sekaligus ketuanya, HM. Roinul Balad mengatakan bahwa Netty dianggap tidak pantas, dan tidak akan sanggup memimpin Provinsi Jawa Barat yang memiliki problem besar, karena menurutnya secara naluri laki-laki lebih bisa.¹⁷⁹

Pernyataan Roinul Balad tersebut sejalan dengan pernyataan az-Zamakhsyari (467-538 H), pemikir Mu'tazilah tersebut mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-'aql*), ketegasan (*al-hazm*), tekad yang kuat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), kemampuan menulis (*al-kitabah*), dan keberanian (*al-furusiyah aq al-ramyu*). Para penafsir yang lain, seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad Thahir bin Asyur, mereka semua

¹⁷⁸Bilal, "... Tolak Calon Perempuan di Pilkada," *Republika*, Selasa 30 May 2017.

¹⁷⁹Bilal, "... Tolak Calon Perempuan di Pilkada," *Republika*, Selasa 30 May 2017.

sepakat bahwa kelebihan laki-laki tersebut merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, kodrati. Atas dasar inilah mereka berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik, lebih khusus politik.¹⁸⁰

Namun, sebenarnya dewasa ini, pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut telah terbantahkan sendirinya dengan fakta-fakta yang riil. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Sampai saat ini, banyak kita saksikan perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua organisasi, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan pekerjaan dan profesi. Realitas ini sekaligus memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat di atas tidaklah benar. Yang benar adalah produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Di sisi lain, kenyataan ini juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak secara terus-menerus, dari kehidupan nomaden ke berperadaban, dari kerangka berpikir tradisional ke kerangka berpikir rasionalis, dari pandangan tekstual ke pandangan substansial, dari tertutupan kepada keterbukaan, dan seterusnya.¹⁸¹

Treatment Recommendation: Secara tidak langsung, media daring Republika menyetujui dan mempersilahkan tindakan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ) yang menolak

¹⁸⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. (Cet.II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 283-284.

¹⁸¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 284-285.

keikutsertaan Netty Prasetiyani Heryawan sebagai salah satu calon kepala Daerah di Pilkada Jawa Barat. Terlihat dari kutipan berikut:

“Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak Wilayah Jawa Barat 2018 Ridho Budiman Utama, menyatakan wajar jika ada penolakan terhadap hasil Pemira DPW PKS yang mengusung calon perempuan sebagai kandidat Cagub Jabar.”

Tabel 4.1.17. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita VIII: Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah hukum Agama Islam dan gender
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Keikutsertaan Netty Prasetiyani Heryawan sebagai kandidat calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dianggap sebagai penyebab adanya tindakan penolakan dari AMPJ
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Netty dianggap tidak pantas, dan tidak akan sanggup memimpin Provinsi Jawa Barat yang memiliki problem besar, karena menurutnya secara naluri laki-laki lebih bisa
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Pernyataan Ridho Budiman Utama: “wajar jika ada penolakan terhadap hasil Pemira DPW PKS yang mengusung calon perempuan sebagai kandidat Cagub Jabar”.

Berita IX: Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga

Tabel 4.1.18 Tabel Latar belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Kolom
<i>Headline</i>	Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga
<i>Dateline</i>	Senin 28 Aug 2017 06:00 WIB
<i>Byline</i>	Red: Maman Sudiaman/ Penulis: Ikhwanul Kiram Mashuri

Pada tulisan *kesembilan* dengan judul **Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga**¹⁸² ini, media daring Republika menyajikan tulisan kolomnis yang berpendapat tentang para perempuan penguasa yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam sebuah negara yang disinyalir karena pengaruh kekuasaan keluarganya atau warisan keluarga –entah dari ayah, saudara ataupun suami–. Mulai dari awal sampai akhir teks, kolomnis menunjukkan contoh-contoh penguasa perempuan yang dimaksud dalam tulisannya tersebut. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana pembingkai pada tulisan kolom yang disajikan media daring Republika di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan pada tulisan di atas adalah masalah kekuasaan. Dengan kata lain, bingkai yang dominan pada tulisan di atas adalah bingkai kekuasaan, hal tersebut dapat dilihat mulai dari awal hingga akhir penulisan teks. Si kolomnis menulis secara panjang lebar siapa saja para perempuan yang “mewarisi” kekuasaan dari keluarganya –entah dari ayah, saudara ataupun suami– yang berhasil menjadi pemimpin suatu negeri.¹⁸³

Misalnya *pertama*, Maryam Safdar putri mantan PM Nawa Sayrif yang sebentar lagi akan menduduki jabatan menteri (PM). *Kedua*, Benazir Bhutto (1988 dan 1993) putri sulung dari politikus Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto yang menduduki jabatan sebagai menteri (PM). *Ketiga*, Sirimavo Ratwatta Dias Bandaranaike terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di dunia, ia

¹⁸²Ikhwanul Kiram Mashuri, “Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga” Republika, Senin, 28 Agustus 2017, 06:00 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/08/27/ovbumj319-para-perempuan-penguasa-warisan-keluarga>, diakses tanggal 21 November 2019.

¹⁸³Ikhwanul, “Para Perempuan Penguasa ...” Republika, Senin, 28 Agustus 2017.

diangkat sebagai PM pada tahun 1960 setelah setahun sebelumnya suaminya, Solomon Bandarnike. *Keempat*, putri mereka Candrika Bandaranaike terpilih sebagai PM, bahkan pada tahun yang sama, ia memenangkan pemilu presiden. *Kelima*, Indira Gandhi yang merupakan putri PM pertama India, Jawaharal Nehru terpilih sebagai PM pada tahun 1966-1977. Selain Pakistan, Sri Lanka, dan India, masih ada sejumlah perempuan di beberapa negara Asia yang meraih kekuasaan berkat nama besar keluarganya. Antara lain di Bangladesh, Filipina, Myanmar, Korea Selatan, dan juga Indonesia.¹⁸⁴

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan tulisan di atas, kemenangan tokoh-tokoh perempuan dalam menduduki tampuk kekuasaan tertinggi; baik menjadi Perdana Menteri (PM) atau sebagai Presiden tidak terlepas dari pengaruh kuat keluarganya atau mewarisi kekuasaan dari keluarganya –entah dari ayah, saudara ataupun suami– yang berhasil menjadi pemimpin suatu negeri. Mengutip dari laporan German Science Foundation, si kolonnis (penulis kolom) menyebut kalau para perempuan dalam dinasti keluarga lebih diuntungkan daripada laki-laki. Berikut kutipannya:¹⁸⁵

“Menurut laporan German Science Foundation dengan tema ‘Keluarga Penguasa dan Kepemimpinan Perempuan di Asia’, para perempuan dalam dinasti kekuasaan keluarga lebih diuntungkan daripada laki-laki. Apalagi bila sang kepala keluarga terbunuh atau dijadikan ‘pesakitan’ ketika sedang berkuasa. Dalam kondisi seperti ini, rasa kasihan dan kemarahan bercampur dengan kharisma sang tokoh akan segera pindah ke anak perempuan atau janda sang tokoh. Atau dengan kata lain, mereka akan segera mendapat simpati rakyat.”

¹⁸⁴Ikhwanul, “Para Perempuan Penguasa ...” *Republika*, Senin, 28 Agustus 2017.

¹⁸⁵Ikhwanul, “Para Perempuan Penguasa ...” *Republika*, Senin, 28 Agustus 2017.

Make Moral Judgement: Selain frame kemengan perempuan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan keluarganya; baik itu ayah, saudara atau suami, Republika juga menambahkan klaim-klaim moral, misalnya pada kutipan berikut:¹⁸⁶

“Para perempuan yang ‘mewarisi’ kekuasaan dari keluarganya — entah itu dari ayah ataupun suami —, tentu sah-sah saja. Apalagi hampir semua mereka meraih singgasana kekuasaan dalam sistem yang demokratis. Artinya, mereka pun harus berkeringat, berdarah-darah, dan tentu saja punya jiwa kepemimpinan. Kendati pun harus diakui mereka bisa berhasil meraih kekuasaan lantaran pengaruh dan nama keluarga besar.”

Kutipan di atas secara tegas ingin menegaskan bahwa tokoh-tokoh perempuan di atas memperoleh kemenangan dan kepercayaan masyarakat tidak hanya berbekal dari pengaruh kekuasaan keluarganya saja, tapi mereka juga berjuang sampai berhasil menduduki posisi tersebut, salah satunya adalah menepis anggapan salah yang selama ini dilekatkan masyarakat patriarki akan perempuan yang tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Seperti yang diketahui merubah kepercayaan patriarki –laki-laki akan selalu melebihi perempuan dalam hal apapun– yang selama ini sudah mengakar kuat di hati dan pikiran masyarakat luas bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan sebaliknya, karena bisa sangat berbahaya.

Treatment Recommendation: Setelah memaparkan panjang lebar tokoh-tokoh perempuan yang berhasil menjadi penguasa di wilayahnya, terutama karena pengaruh kekuasaan keluarganya. Kolomnis pada akhir teks mencoba mencari

¹⁸⁶Ikhwanul, “Para Perempuan Penguasa ...” Republika, Senin, 28 Agustus 2017.

jawaban apakah dengan dipilihnya perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya mampu memberi dampak positif kepada masyarakatnya? kemudian ia menjawab tidak. Untuk lebih jelasnya lihat pada kutipan berikut:¹⁸⁷

“Yang jadi pertanyaan, apakah kemunculan para perempuan yang mewarisi kekuasaan dari ayah, suami, atau keluarga besarnya akan memberi dampak positif kepada kehidupan kaumnya? Jawabannya ternyata tidak. Kemunculan para perempuan di panggung kekuasaan ternyata tidak memberi pengaruh berarti bagi hak-hak politik dan kehidupan sosial ekonomi bagi kaum perempuan.”

Tabel 4.1.19. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita IX: Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Kekuasaan “warisan” keluarga
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Banyak perempuan yang berhasil menempati posisi tertinggi karena warisan atau pengaruh kekuasaan dari keluarganya.
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Para perempuan yang ‘mewarisi’ kekuasaan dari keluarganya, entah itu dari ayah ataupun suami, tentu sah-sah saja. Apalagi hampir semua mereka meraih singgasana kekuasaan dalam sistem yang demokratis. Artinya, mereka pun harus berkeringat, berdarah-darah, dan tentu saja punya jiwa kepemimpinan. Kendati pun harus diakui mereka bisa berhasil meraih kekuasaan lantaran pengaruh dan nama keluarga besar
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Kemunculan para perempuan di panggung kekuasaan ternyata tidak memberi pengaruh berarti bagi hak-hak politik dan kehidupan sosial ekonomi bagi kaum perempuan

Berita X: UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan

Tabel 4.1.20. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Berita Pendidikan
--------------------	-------------------

¹⁸⁷Ikhwanul, “Para Perempuan Penguasa ...” *Republika*, Senin, 28 Agustus 2017.

<i>Headline</i>	UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan
<i>Dateline</i>	Selasa 19 Sep 2017 08:30 WIB
<i>Byline</i>	Rep: Neni Ridarineni/ Red: Winda Destiana Putri

Pada berita *kese puluh* dengan judul **UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan**¹⁸⁸ ini, media daring memberitakan tentang kegiatan seminar yang diselenggarakan Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta dengan tema “kepemimpinan perempuan”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya UNISA untuk meningkatkan kesadaran tentang kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan visi Indonesia berkemajuan. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media daring Republika membingkai berita di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring dalam menyajikan berita di atas adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender disini lebih khusus kepada isu kepemimpinan perempuan. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan terkait seminar yang diselenggarakan UNISA (Universitas Aisyiyah) Yogyakarta dengan mengangkat tema “kepemimpinan perempuan”. Isu kepemimpinan perempuan sendiri adalah salah satu isu gender yang sampai sekarang masih menjadi salah satu isu yang terus menghadapi halangan-halangan yang serius (pro dan kontra), diantaranya dari pandangan keagamaan.

Diagnose Causes: Pada hakikatnya, perempuan Indonesia memiliki peran yang besar dari pra kemerdekaan hingga masa kini. Dalam kehidupan

¹⁸⁸Winda Destiana Putri, “UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan” Republika, Selasa, 19 September 2017, 08:30 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/owi6v5359/unisa-selenggarakanseminar-kepemimpinan-perempuan>, diakses tanggal 21 November 2019.

sosial dan profesional, perempuan juga telah berperan secara aktif, meskipun tingkat penghargaan kepada perempuan harus diakui membutuhkan perjuangan dan mengalami masa pasang-surut. Namun seiring berjalannya waktu, semangat dan rasa percaya diri perempuan semakin memudar. Selain karena pemahaman agama yang konservatif terkait permasalahan tersebut, juga karena mengakarnya budaya patriarki, selain itu juga ada kepentingan-kepentingan politik yang ikut serta berkontribusi sehingga muncul keyakinan kalau tempat perempuan bukanlah di publik, tapi hanya domestik (*the second class*).¹⁸⁹

Make Moral Judgement: Dengan diadakannya seminar yang bertema “kepemimpinan perempuan” oleh UNISA Yogyakarta ini diharapkan bisa menjadi salah satu penggerak bagi para perempuan untuk berani menjadi pemimpin di lingkungan apapun dalam berbagai tingkatan, sehingga bisa bersama-sama memberikan kontribusi positif yang besar kepada masyarakat umum.¹⁹⁰

Treatment Recommendation: Atas diselenggarakannya seminar nasional yang bertema “kepemimpinan perempuan” oleh UNISA Yogyakarta ini, media daring Republika secara tidak langsung sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, sekaligus “merekomendasikan” kegiatan itu tetap dilanjutkan dan tidak berhenti di UNISA Yogyakarta saja, karena kegiatan tersebut sangat positif dan mampu menginspirasi perempuan, terutama perempuan Indonesia agar mau melakukan

¹⁸⁹Putri, “UNISA ...” Republika, Selasa, 19 September 2017.

¹⁹⁰Putri, “UNISA ...” Republika, Selasa, 19 September 2017.

gerakan Indonesia yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik dan juga budaya.¹⁹¹

Tabel 4.1.21 Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita X: UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan

1	<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Upaya kesetaraan gender
2	<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	Perempuan Indonesia memiliki peran yang besar dari pra kemerdekaan hingga masa kini. Dalam kehidupan sosial dan profesional, perempuan juga telah berperan secara aktif, meskipun tingkat penghargaan kepada perempuan harus diakui membutuhkan perjuangan dan mengalami masa pasang-surut
3	<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Gerakan ini menginspirasi para perempuan untuk menjadi pemimpin di lingkungan apapun dalam berbagai tingkatan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang besar. Di sisi lain, gerakan ini memberi semangat dan solusi kepada organisasi untuk memperoleh manfaat dari potensi perempuan secara optimal
4	<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Mengapresiasi dan merekomendasikan supaya kegiatan seperti itu terus diadakan

Berita XI: Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?

Tabel. 4.1.22. Tabel Latar Belakang Berita

<i>Breadcrumbs</i>	Khazanah
<i>Headline</i>	Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?
<i>Dateline</i>	Sabtu 06 Jan 2018 01:33 WIB
<i>Byline</i>	Rep: Rahmat Fajar/ Red: Agus Yulianto

Pada tulisan *kesebelas* dengan judul **Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?**¹⁹² ini, media daring Republika menyajikan jejak kisah

¹⁹¹Putri, "UNISA ..." Republika, Selasa, 19 September 2017.

pahlawan perempuan Ratu Nahrasiyah yang masih belum dikenal luas masyarakat Indonesia. Padahal menurut keterangan, Ratu Nahrasiyah telah berkuasa lebih dari 20 tahun di Kerajaan Samudra Pasai. Dalam tulisan di atas juga disebutkan kalau Ratu Nahrasiyah adalah salah satu Ratu yang sangat disegani dan dihormati saat memimpin, hal tersebut terlihat dari bentuk nisan, keadaan makam Ratu Nahrasiyah dan juga dari sejarah Cina yang sempat menulis kebesaran Ratu. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana media daring Republika membingkai tulisan –jejak kepahlawanan Ratu Nahrasiyah– di atas dengan analisis *framing* Robert N. Entman:

Define Problems: Frame yang dikembangkan media daring Republika di atas adalah masalah jejak kekuasaan, lebih jelasnya kekuasaan Ratu Pasai, Ratu Nahrasiyah yang tidak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kebesaran Ratu Nahrasiyah yang dimaksud media daring di atas salah satunya dapat dilihat dari nisannya, selain itu juga terdapat dari sejarah Cina, yakni kronik *Ying-yai sheng-lan*.¹⁹³

Diagnose Causes: Dalam keseluruhan berita di atas, Ratu Nahrasiyah diposisikan sebagai obyek. Sebagaimana disebut di atas kebesaran sosok Ratu Pasai ini, Ratu Nahrasiyan dapat terlihat dari bentuk makam dan peninggalan sejarah Cina. Namun pertanyaannya, kenapa kebesaran beliau tidak dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia? *partama*, namanya tak terdengar karena tertutup

¹⁹²Agus Yulianto, “Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?” Republika, Sabtu, 06 Januari 2018, 01:33 WIB. Lihat pada <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/p22vjt396/ratu-ini-pemimpin-pasai-secara-bijak-siapa-dia>, diakses tanggal 21 November 2019.

¹⁹³Agus, “Ratu ...?” Republika, Sabtu, 06 Januari 2018.

oleh dua raja terkenal Kerajaan Samudra Pasai, yakni Raja Malikussaleh dan Malikudzhahir. *Kedua*, sedikitnya data sejarah tentang Ratu Nahrasiyah yang membuat biodata dirinya susah ditemukan. *Ketiga*, namanya tidak tertera dalam mata uang emas pada zaman Kerajaan Samudra Pasai. Padahal menurut sejarah Kerajaan Pasai, mengabadikan nama sultan di mata uang merupakan suatu kebiasaan.¹⁹⁴

Make Moral Judgement: Kemuliaan dan kebesaran Ratu Nahrasiyah sebagai Ratu Pasai didukung oleh klaim-klaim moral yang dilekatkan pada Ratu Nahrasiyah, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Prof T Ibrahim, berikut kutipannya:

“Nahrasiyah dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama berada di tampuk kepemimpinan, ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Saat itu, harkat dan martabat perempuan begitu mulia.”

Treatment Recommendation: Atas semua peran Ratu Nahrasiyah tersebut, secara tidak langsung media daring Republika mengatakan bahwa Ratu Nahrasiyah adalah salah satu pejuang perempuan Aceh yang juga banyak berkontribusi di Aceh. Namanya harum bersanding dengan tokoh perempuan Aceh lainnya, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Sultanah Safiatuddin Syah, Ratu Inayat Zakiatuddin Syah, dan Nurul Alam Naqiatuddin Syah.¹⁹⁵

Tabel 4.1.23. Tabel Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Berita XI: Ratu Ini Pemimin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?

<i>Define Problems</i>	Jejak sejarah kebesaran Ratu Pasai, Ratu
------------------------	--

¹⁹⁴Agus, “Ratu ...?” Republika, Sabtu, 06 Januari 2018.

¹⁹⁵Agus, “Ratu ...?” Republika, Sabtu, 06 Januari 2018.

(Pendefinisian Masalah)	Nahrasiyah yang tidak dikenal
<i>Diagnose Causes</i> (Sumber Masalah)	- Namanya tak terdengar karena tertutup oleh dua raja terkenal Kerajaan Samudra Pasai, yakni Raja Malikussaleh dan Malikudzahir - Minimnya data sejarah (literatur-literatur) tentang Ratu Nahrasiyah - Namanya tak tertera dalam mata uang emas pada zaman Kerajaan Samudra Pasai
<i>Make Moral Judgement</i> (Keputusan Moral)	Nahrasiyah dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama berada di tampuk kepemimpinan, ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Saat itu, harkat dan martabat perempuan begitu mulia
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian)	Ratu Nahrasiyah adalah salah satu pejuang perempuan Aceh yang juga banyak berkontribusi di Aceh.

Setelah menganalisis berita-berita yang berhubungan dengan isu gender, lebih khusus kepemimpinan perempuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media daring Republika mengidentifikasi isu gender, lebih khusus kepemimpinan perempuan ini sebagai masalah hukum, terutama hukum dalam koridor Agama Islam. Maksudnya, segala hal yang berhubungan dengan isu tersebut pasti oleh media Republika disoroti dari segi hukum Agama Islam terlebih dahulu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, memang sampai saat ini hukum kepemimpinan perempuan atau terlibat dalam masalah publik, lebih khusus politik masih menjadi problem; baik dari kalangan masyarakat secara luas, maupun para ulama (tokoh agama) secara khusus.

Dan perlu diketahui, bahwa dalam proses memilih fakta –hukum kepemimpinan perempuan– ini misalnya, pasti menimbulkan suatu akibat tertentu. Kenapa? Karena begitu fakta didefinisikan maka disana selalu terjadi proses

pemilihan –yang dalam arti tertentu dapat berupa penonjolan– dan mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari suatu realitas.¹⁹⁶

Seleksi isu (pemilihan fakta) pada berita-berita di atas dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dan *kedua*, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik. Kedua fakta tersebut dikemas kedalam bingkai hukum, lebih khusus hukum dalam koridor Agama Islam oleh media daring Republika. Pada pemilihan fakta *pertama*, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dengan membawa dua dalil nash, yaitu a. Kata *qawwam* dalam firman Allah surat an-Nisa' (4:34)¹⁹⁷ dan b. Hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah¹⁹⁸.

Pemilihan fakta tersebut bisa menghilangkan atau menutupi fakta dalil-dalil al-Quran yang membolehkan bahkan mendorong perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan masyarakat, selama itu positif dan bermanfaat. Misalnya *pertama*, dalil al-Quran surat an-Naml (27): 23-25, mengisahkan kesuksesan Ratu Bilqis (Ratu Saba') ketika memimpin negaranya.¹⁹⁹ *Kedua*, dalil al-Quran surat Al-

¹⁹⁶Eriyanto, *Analisi Framing*, 199.

¹⁹⁷الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Al-Quran, an-Nisa', 4: 34.

¹⁹⁸لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَنْفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ أَكْثَرُ الْكُوفِيِّينَ “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.” HR. Bukhari. No. 4073.

¹⁹⁹إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (1). Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah

Taubah (9): 71-72, yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama, yakni sama-sama memiliki tugas untuk *Amar ma'ruf wa nahi munkar*.²⁰⁰ Ketiga dalil al-Quran surat al-Hujurat (49): 13, bahwa tidak ada perbedaan antara satu individu dan individu lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan.²⁰¹ Dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar membawa prinsip egaliter dan persamaan di antara seluruh umat manusia. Bukan sebaliknya.²⁰²

Selain itu juga menutupi fakta empiris yang membuktikan sudah banyak perempuan yang sukses memimpin negaranya, seperti Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, dan cerdas, kemudian seperti yang bisa kita lihat di masa modern ini, sebutlah Benazir Butho di

menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (2) agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan (3).” An-Naml, 27: 23-25.

²⁰⁰وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (71). Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, ... (72).” At-Taubah, 9: 71-72.

²⁰¹يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Al-Hujurat, 49: 13.

²⁰²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Cet. I; Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005), 311.

Pakistan, Indria Gandhi di India,²⁰³ Margaret Tacher di Inggris,²⁰⁴ Jika kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia juga banyak terdapat tokoh, pahlawan, dan raja wanita, seperti Cut Nyak Dien di Aceh,²⁰⁵ Kamalat Shah (1699) di Sumatera.²⁰⁶

Pada pemilihan fakta *kedua*, perempuan dianjurkan ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan juga diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik. Pemilihan fakta ini menghilangkan atau menutupi fakta masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dihadapi perempuan di ranah publik, misalnya dari segi agama (banyak ulama klasik maupun modern yang masih memegang teguh pada dalil-dalil nash yang melarang perempuan menjadi pemimpin), dari segi budaya (budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat), dari segi politik (banyak yang meyakini, laki-laki maupun perempuan bahwa politik adalah dunia khusus untuk laki-laki).

B. Analisis Penonjolan Isu pada Berita yang Berhubungan dengan “Pemimpin Perempuan” di Media Daring Republika

Penonjolan isu ini sangat berkaitan dengan penulisan fakta. Proses ini mau tidak mau sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk dibaca oleh khalayak. Eriyanto dalam bukunya menjelaskan, bahwa pilihan kata tertentu yang digunakan tidak sekedar teknis jurnalistik, akan tetapi

²⁰³Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018), 378.

²⁰⁴Hamka Hasan, *Tafsir Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Cet. I; T.tt: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), 214.

²⁰⁵Ali Yafie, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), 72.

²⁰⁶Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*, (Cet. I; Yogyakarta, LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), 227.

politik bahasa. Bagaimana bahasa –yang dalam hal ini umumnya pilihan kata-kata yang dipilih– dapat menciptakan realitas tertentu kepada khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi kita dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang melihat persepsi lain, menyediakan aspek tertentu dari suatu peristiwa dan mengarahkan bagaimana khalayak harus memahami suatu peristiwa.²⁰⁷

Pertama, cara yang digunakan untuk menonjolkan penulisan fakta “perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin” ini, disajikan dengan menuliskan dalil-dalil nash – al-Quran surat an-Nisa’ ayat 34 dan hadis Abu bakrah – secara berkali-kali (diulang-ulang), kemudian juga ditempatkan pada tempat yang mencolok, seperti di *lead* (teras berita).

Padahal Jika kita gali lebih dalam *asbab an-nuzul* firman Allah surat an-Nisa’ di atas, maka konteks ayat tersebut bukan berkenaan dengan masalah kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, secara kontekstual ayat tersebut berhubungan dengan kasus rumah tangga, lebih khusus lagi, berkaitan dengan kebutuhan biologis suami. Hal ini dipahami dari sebab penamparan suami (Sa’ad bin Rabi’) atas penolakan istrinya (Habibah binti Zaid) yang menolak berhubungan badan. Dari sini, maka ayat di atas bukan bersifat normatif-yuridis melainkan pernyataan sosiologis, karena ia turun berkenaan dengan urusan rumah tangga. Sebagaimana pernyataan Sa’id ‘Aqil Siraj dalam Sofyan, ayat ini adalah

²⁰⁷Eriyanto, *Analisi Framing*, 200.

ayat “ranjang”, dan karenanya tidak bisa dijadikan alasan atas keharaman kepemimpinan perempuan di ranah publik.²⁰⁸

Terkait hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah di atas, kita tidak boleh mengeneralisasinya dalam semua kasus, tapi harus dipahami dari sisi esensinya. Di mana hadits tersebut bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu, yang karena kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratif. Dari sini, maka poin pentingnya dalam sebuah kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas; dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan.²⁰⁹

Kemudian mengangkat isu-isu gender yang diyakini oleh masyarakat patriarki –bahwa laki-laki akan selalu menjadi yang lebih baik dibanding perempuan; baik dari fisik, mental, dan lain sebagainya–. Dan yang terakhir menyajikan berita yang intinya memandang sebelah mata kepada para pemimpin perempuan yang masih memiliki hubungan dengan pemimpin sebelumnya, bisa dari ayah, suami dan juga saudara.

Kedua, cara yang digunakan untuk menonjolkan penulisan fakta “perempuan dianjurkan ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan juga diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik” ini, disajikan media daring Republika dengan menuliskan dalil nash al-Quran yang membolehkan, seperti firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97, menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga Islam guna mendorong para perempuan untuk mau

²⁰⁸Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 129.

²⁰⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 290.

ikut aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat. Dan menyajikan fakta-fakta sejarah, seperti kisah-kisah kesuksesan para pemimpin perempuan dalam memimpin wilayah kekuasaannya, dari zaman klasik sampai modern.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Sampai saat ini, banyak kita saksikan perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua organisasi, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan pekerjaan dan profesi. Realitas ini sekaligus memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat di atas tidaklah benar. Yang benar adalah produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Di sisi lain, kenyataan ini juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak secara terus-menerus, dari kehidupan nomaden ke berperadaban, dari kerangka berpikir tradisional ke kerangka berpikir rasionalis, dari pandangan tekstual ke pandangan substansial, dari ketertutupan kepada keterbukaan, dan seterusnya.²¹⁰

²¹⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 284-285.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana pada rumusan masalah di atas, yakni bagaimana berita-berita yang berhubungan dengan isu gender, lebih khusus pemimpin perempuan dibingkai oleh media daring Republika? Maka setelah melakukan analisis data pada berita-berita tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana media daring Republika menyeleksi isu berita-berita tersebut?

Seleksi isu (pemilihan fakta) pada berita-berita di atas dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dan *kedua*, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik. Kedua fakta tersebut dikemas kedalam bingkai hukum, lebih khusus hukum dalam koridor Agama Islam oleh media daring Republika. Pada pemilihan fakta *pertama*, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dengan membawa dua dalil nash, yaitu a. kata *qawwam* dalam firman Allah surat an-Nisa' (4:34) dan b. hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah – “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.”– Pemilihan fakta tersebut menghilangkan atau menutupi fakta dalil-dalil al-Quran yang membolehkan bahkan mendorong

perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan masyarakat, selama itu positif dan bermanfaat, selain itu juga menutupi realitas sosial dan sejarah modern yang membuktikan sudah banyak perempuan yang sukses dalam bidang yang ditekuninya, misalnya politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Pada pemilihan fakta *kedua*, perempuan dianjurkan ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan juga diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik. Pemilihan fakta ini menghilangkan atau menutupi fakta masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dihadapi perempuan di ranah publik, diantaranya dari segi agama (banyak ulama klasik maupun modern yang masih memegang teguh pada dalil-dalil nash yang melarang perempuan menjadi pemimpin), dari segi budaya (budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat), dari segi politik (banyak di antara laki-laki maupun perempuan yang meyakini bahwa politik adalah dunia khusus untuk laki-laki)

2. Bagaimana media daring Republika menonjolkan isu berita-berita tersebut?

Pertama, dengan cara menonjolkan kalimat “perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin”, penulisan kalimat tersebut dikuatkan dengan menuliskan dalil-dalil nash – al-Quran surat an-Nisa’ ayat 34 dan hadis Abu bakrah – secara berkali-kali (diulang-ulang), misalnya di *body* (tubuh berita), dan ditempatkan pada tempat yang mencolok perhatian, seperti di *lead* (teras berita). Kemudian, mengangkat isu-isu gender yang diyakini oleh masyarakat patriarki – bahwa laki-laki akan selalu menjadi yang lebih baik dibanding perempuan; baik dari fisik, mental, dan lain sebagainya –. Dan yang terakhir menyajikan beritanya

dengan bersikap 4sebelah mata atau meremehkan para pemimpin perempuan yang telah memenangkan sebuah pemilihan atau pilkada. Mereka menganggap kemenangan tersebut bukan karena kemampuan pribadi perempuan tersebut, melainkan adanya hubungan dengan pemimpin sebelumnya, bisa dari ayah, suami dan juga saudara atau biasa disebut dengan penguasa ‘warisan’ keluarga.

Kedua, cara yang digunakan untuk menonjolkan penulisan fakta “perempuan dianjurkan ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan juga diperbolehkan menjadi pemimpin di ranah publik” ini, disajikan media daring Republika dengan menuliskan dalil nash al-Quran yang membolehkan, seperti firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97, kemudian ada fakta-fakta sejarah, seperti kisah-kisah kesuksesan para pemimpin perempuan dalam memimpin wilayah kekuasaannya, serta menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga Islam guna mendorong para perempuan untuk mau ikut aktif dalam setiap kegiatan di masyarakat.

Setelah mengetahui bagaimana media daring Republika dalam menyeleksi dan menonjolkan isu terkait “kepemimpinan perempuan”, menunjukkan bahwa Republika sebagaimana media massa yang lain, sama-sama berdiri di tengah-tengah realitas yang penuh dengan berbagai kepentingan – agama, politik, budaya, dan lain sebagainya–, dan itu menunjukkan bahwa media memang tidak bisa seratus persen netral pada suatu hal/isu tertentu, terbukti ketika memberitakan isu-isu kepemimpinan perempuan di atas, terkadang di satu sisi Republika bisa menjadi wadah ketidakadilan gender, dan terkadang juga bisa menjadi instrumen keadilan gender.

Dari sekian banyak berita pro dan kontra terkait keikutsertaan perempuan di ranah politik/publik yang disajikan oleh Republika Online dapat diambil kesimpulan bahwa Republika sebagai media massa dengan misinya yang adil, ikut berjuang melawan ketidakadilan di masyarakat, lebih khusus ketidakadilan gender. Hal tersebut terlihat dari banyaknya berita yang menyetujui dan mendukung kaum perempuan ikut serta terlibat di wilayah publik, tidak terkecuali ikut serta dalam pemilihan pemimpin suatu daerah (pilkada), dengan syarat memiliki kemampuan dan kualifikasi yang baik dalam bidang tersebut.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan mampu memacu semangat penelitian lain diluar sana dalam membuktikan atau memecahkan permasalahan isu gender terutama dalam ranah politik. Karena, dewasa ini masih banyak ditemukan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan untuk memasuki dunia politik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

(SUMBER BUKU)

Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya

Al-Buthi, Muhammad Sya'id Ramadhan . *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*. (Beirut: *Mu'assah al-Risalah*, 1973).

Afifah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Afifah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: Pustaka Obor, 2017).

Anugrah, Astrid *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. (Cet. II; Jakarta: Pancuran Alam, 2009).

Arfan, Abbas. *Maslahah dan Batasan-batasan menurut al-Buti*, "*de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. 1 (Juni, 2013).

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet. XXIV; Jakarta: PT. Gramedia, 2004).

Cholil, Mufidah. *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2009).

Djajasudarma, Fatimah. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian* (Cet-II; Refika Aditama: Bandung. 2006).

Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*", terj. Farid Wajidi & Cici Farkha. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994).

Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. (Cet. II; Yogyakarta: Lkis 2004).

Faisol, M. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

- Fitriana, Yurike. *Pemimpin Perempuan dalam Media (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk pada Pemberitaan Sosok Tri Risma Harini di Liputan 6 SCTV pada Bulan Februari 2014)*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).
- Hakim, Ali Hosein. et al., *Islam and Fenisism: Theory, Modelling, and Application*, terj. A.H. Jemala Gembala. (Cet.I; Jakarta: al-Huda, 2005).
- Hasan, Hamka. *Tafsir Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. (Cet. I; T.tt: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Ihromi, Tapi Omas et al., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Bandung: ALUMNI, 2000).
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *al-Huquq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*, terj. Ikhwan Fauzi, (Cet. I; T.tt: AMZAH, 2002).
- Kasman, Suf. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika)*. (Cet.I; T.tt: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
- Kau, Sofyan A. P. dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hasan. *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki)*. (Cet. I; Yogyakarta, LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995).
- Mondry. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. (Cet. I; Bogor: Ghalia Indah, 2008).
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. (Cet.II; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*. (Cet. II; Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*. (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. (Cet. I; Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2005).

- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. (Malang: Intimedia, 2012).
- Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*. (Cet. I; Jakarta: Preatada Media, 2006).
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara "Analisis Isu-isu Gender dalam al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjamun al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel*. (Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2017).
- Shihab, Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dasar hermenutika Hukum islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, (Cet. I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2007).
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Quran*. (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001).
- Wariantio, Arif Budi. *Gender and Politics*, (Cet. I; Yogyakarta: Kerjasama antara Tiara Wacana dan Pusat Studi Wanita UGM, 2009).
- Yafie, Ali. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*. (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Yunus, Syarifuddin. *Jurnalistik Terapan*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

(Sumber Jurnal)

- Cholis, Nur. "Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan Pendidikan," *National Forum of Education Administration and Supervision Journal*. 4 (1998-1999).
- Dewi, Machya Astuti. "Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan". *Ilmu Komunikasi*, 3 (September-Desember 2009).
- Djuwita, Amalia. "Politisi Perempuan dalam Bingkai Media (Analisis Framing Robert Entan atas Pemberitaan Politisi Perempuan di Media Cetak)". *Channel*, 1 (April 2018).
- Burnama, Glandy dkk. "Stereotyping Risma: Pembingkai Sosok Tri Rismaharini di Majalah Detik dan Tempo". *Scriptura*, 1 (Juli 2014).
- Fitriyah, "Politik Dinasti pada Kandidasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 di Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Sosial*. 1 (Januari-Juni, 2018).
- L, Sulaemang. "Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum". (Al-Munzir Vol. 8, No. 1, Mei 2015).
- Maulana, Irpan. "Struktur Wacana Rubrik Bale Bandung dalam Majalah Mangle (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk)". *Lokabasa*. 2 (Oktober, 2013).
- Octarianty, Reni. "Analisis Framing terhadap Pemberitaan Pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jawa Timur 2013". *E-Komunikasi*. 1 (Tahun 2015).
- Payuyasa, I Nyoman. "Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV". *Segara Widya*. 5 (November: 2017).
- Pratiwi, Ardina. "Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Rrobert N. Entman)". *Thaqafiyat*, 1 (Juni 2018).

(SUMBER DARING)

Akhmad, Chairul. “Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin?,” *Republika*, Jumat, 07 September 2012, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/09/09/m9z1fu-bolehkah-wanita-menjadi-pemimpin>

Bachtiar, Tiar Anwar. “Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh” *Republika*, Kamis, 19 Juni 2014, 12:00 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/01/n7egk510-ijtihad-ulama-untuk-pemimpin-perempuan-pertama-aceh>

Hazliansyah. “Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan” *Republika*, Selasa, 19 Februari 2013, 16:43 WIB. Lihat pada <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawabaratnasional/13/02/19/migocn-baitul-muslimin-indonesia-gelar-diskusikepemimpinanperempuan>

Mashuri, Ikhwanul Kiram. “Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga” *Republika*, Senin, 28 Agustus 2017, 06:00 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/08/27/ovbumj319-para-perempuan-penguasa-warisan-keluarga>

Muftisany, Hafids. “Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?,” *Republika*, Jumat, 19 Desember 2014, 13:55 WIB. Lihat pada <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz36-wanita-menduduki-jabatan-publik-bolehkah>

Putri, Winda Destiana. “UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan” *Republika*, Selasa, 19 September 2017, 08:30 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/owi6v5359/unisa-selenggarakanseminar-kepemimpinan-perempuan>

Ramadhan, Bilal. “Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada,” *Republika*, Selasa 30 May 2017, 06:58 WIB. Lihat pada <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/30/oqqitw330-ini-alasan-13-ormas-islam-jabar-tolak-calon-perempuan-di-pilkada>

Sasongko, Agung,. “Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan” *Republika*, Jumat, 16 Oktober 2015, 19:02 WIB. Lihat pada <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/nwbas6313/radhiyatuddin-muslimah-yang-bebaskan-mamalik-dari-keterpurukan>

Syihabuddin, Muhtar Sadili. “Kepemimpinan Perempuan” *Republika*, Selasa, 22 September 2015, 20:16 WIB. Lihat pada

<https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/15/09/22/nv2y71320-kepemimpinan-perempuan>

Yulianto, Agus. “Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?” Republika, Sabtu, 06 Januari 2018, 01:33 WIB. Lihat pada <https://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/p22vjt396/ratu-ini-pemimpin-pasai-secara-bijak-siapa-dia>

Zamzami, Fitriyan. “Akhir Masa Para Sultanah” Republika, Senin, 03 April 2017, 13:35 WIB. Lihat pada <https://republika.co.id/berita/onthe0393/akhir-masa-para-sultanah>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di <https://apji.or.id/survei2017>.

Profil Republika Online di <https://esamethyra.wordpress.com/2015/10/23/media-online-republika-co-id-rol/>.

Profil Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat di <https://www.jpjr.or.id/profil/> diakses pada 15 Juli 2019.

LAMPIRAN

Berita I: Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin? (1)²¹¹

Jumat 07 Sep 2012 15:40 WIB (khazanah)/ Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad

REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah hadis pernah mengatakan, “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.”

Sebagian orang yang membela emansipasi wanita menolak hadis tersebut dengan alasan bertentangan dengan hadis yang berbunyi, “Ambillah sebagian agamamu dari Al-Khumaira (si Merah Muda, yakni Aisyah).”

Menanggapi hal ini, Syekh Yusuf Qardhawi dalam Fatwa Kontemporer-nya menegaskan, dalam membahas hal ini harus dibersihkan dari berbagai kepentingan-kepentingan politis. Kejahilan merupakan bencana besar. Dan akan menjadi bencana paling besar jika ia bercampur dengan hawa nafsu.

Firman Allah, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.” (QS. Al-Qashash: 50).

Karena itu, tidak mengherankan, mengingat banyaknya kejahatan yang bercampur dengan hawa nafsu—kalau hadis sahih ditolak, dan hadis mardud dianggap sahih.

Hadis pertama yang berbunyi “Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka” adalah hadis sahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, yang mengatakan, "Ketika sampai berita kepada Rasulullah

²¹¹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/09/09/m9z1fu-bolehkah-wanita-menjadi-pemimpin-1>

SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra Persia untuk menjadi raja mereka.

Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka.” (HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Para ulama di semua negara Islam telah menerima hadis ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum.

Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin? (2)²¹²

Jumat 07 Sep 2012 16:37 WIB/ Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad

REPUBLIKA.CO.ID, Adapun hadis kedua yang berbunyi "Ambillah sebagian agamamu dari Al-Khumaira (si Merah Muda, yakni Aisyah)" oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dikomentari sebagai berikut:

"Saya tidak mengenal sanadnya. Dan saya tidak pernah melihatnya dalam kitab-kitab hadis melainkan dalam “An-Nihayah” karya ibnul Atsir. Namun, dalam kitab ini pun beliau tidak menyebutkan orang yang meriwayatkannya.”

Al-Hafizh Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan, ketika Imam Al-Mazi dan Adz-Dzahabi ditanya tentang hadis ini, ternyata keduanya tidak mengenalnya. Itulah tinjauan kita dari segi sanad dan perawi hadits.

Adapun kalau kita melihatnya dari segi matan dan topiknya, niscaya akal kita akan mengingkarinya, dan kenyataan pun akan menolaknya. Penolakan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

²¹²<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/09/07/m9z41r-bolehkah-wanita-menjadi-pemimpin-2>

1. Bagaimana mungkin Nabi SAW menyuruh kita mengambil sebagian (ajaran) agama ini dari Al-Khumaira (si Merah Muda), yakni Aisyah saja? Bagaimana dengan yang kita ambil dari para sahabat yang jumlahnya sekian banyak itu? Sebagian ajaran mana yang kita ambil dan sebagian ajaran mana yang kita tinggalkan?

2. Sebutan “Al-Khumaira” yang merupakan bentuk isim tashghir (untuk mengecilkan atau melemahkan arti) dari kata hamra’ (merah) adalah sebutan khusus Nabi untuk istri tertentu (Aisyah) dalam hal memerintahkan suatu pekerjaan tertentu.

Dengan demikian, perintah yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan bersifat umum. Dan kenyataan menunjukkan bahwa para ulama Islam tidak mengambil sebagian ajaran agama ini dari Aisyah, bahkan seperempat atau sepersepuluhnya saja tidak, baik dari segi riwayat maupun dari segi dirayah (pengetahuan).

Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin? (3-habis)²¹³

Jumat 07 Sep 2012 17:19 WIB/ Rep: Hannan Putra/ Red: Chairul Akhmad

REPUBLIKA.CO.ID, Dari segi riwayat kita melihat beribu-ribu sahabat, baik pria maupun wanita ikut andil dalam menyampaikan petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, hukum, maupun taqirir.

Aisyah RA termasuk salah seorang dari mereka yang memang banyak meriwayatkan hadis. Namun, bagaimana pun juga banyaknya ia meriwayatkan hadis, tidak sampai sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Dari segi dirayah (pengetahuan), fikih, dan fatwa, pernyataan tersebut bertentangan dengan sejarah sehingga akal kita tidak dapat menerima jika

²¹³<https://www.republika.co.id/berita/m9z613/Fatawa%20Al-Qardhawi>

disebutkan bahwa hanya Aisyah yang menjadi sumber acuan mengenai sebagian ajaran agama.

Kalau demikian pernyataannya, di manakah posisi sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan orang-orang segenerasi serta setingkat dengannya.

Kemudian orang-orang yang lebih muda dari mereka seperti empat orang Abdullah, yaitu, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair? Begitu pula yang lain-lainnya?

Sesungguhnya hadis-hadis fadhail (tentang keutamaan sesuatu) harus diterima secara kritis dan hati-hati. Al-Hafizh (Ibnu Hajar) mengatakan jalan pertama yang ditempuh orang yang suka memalsukan hadis ialah mengutamakan individualisme. Mereka orang-orang yang biasanya berkarakter keras dan suka bermusuhan cenderung mengultuskan seorang tokoh (pemimpin). Dan Aisyah termasuk orang yang mempunyai pengikut seperti itu.

Alquran dalam Surah An-Nur dan hadis-hadis sahih serta hasan sudah cukup memuji keutamaan Aisyah. Namun, pujian itu tidak sampai berlebihan sehingga tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam mukadimah kitabnya "Al-Maudhuat", Ibnul Jauzi berkata, "Alangkah bagusnya perkataan orang yang mengatakan jika semua hadis yang anda lihat bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dan bertentangan dengan dalil-dalil naqli, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut palsu'."

Berita II: Baitul Muslimin Indonesia Gelar Diskusi Kepemimpinan Perempuan²¹⁴

Selasa 19 Feb 2013 16:43 WIB (berita nasional)/ Rep: M Akbar/ Red: Hazliansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baitul Muslimin Indonesia menggelar diskusi kepemimpinan perempuan. Diskusi ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh hak perempuan sebagai manusia sekaligus juga proses pendidikan masyarakat untuk memberi ruang kepada perempuan dalam berperan di segenap aspek kehidupan.

"Diskusi ini kami hadirkan untuk menelaah perkembangan gerakan politik perempuan di Indonesia, sukses dan kendala yang dihadapi dalam gerakan politik perempuan dan bagaimana gerakan politik perempuan bersinergi dengan gerakan politik kerakyatan pada sektoral lainnya," kata Faozan Amar, ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, dalam siaran pers yang diterima *Republika*, Selasa (19/2) di Jakarta.

Faozan menjelaskan, diskusi digelar hari ini di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. Dalam dikusi ini tampil sebagai pembicara guru besar IAIN Alaudin Makassar, Hamka Haq; dosen Unisba Bandung, Nan Rahminawati serta pendeta Supriatno perwakilan dari gereja Sinode GKP.

Faozan mengatakan, sudah saatnya bagi para perempuan di Indonesia terlibat aktif dalam upaya melakukan perubahan. Perubahan tersebut, kata dia, tak hanya pada lingkungan tetapi juga pada dirinya sendiri.

"Salah satunya adalah mau dan percaya diri bahwa perempuan itu mampu untuk menjadi pemimpin," kata pria yang juga menjadi pengajar studi Islam di UHAMKA Jakarta ini.

²¹⁴<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/02/19/migocn-baitul-muslimin-indonesia-gelar-diskusi-kepemimpinan-perempuan>

Berita III: Ijtihad Ulama untuk Pemimpin Perempuan Pertama Aceh²¹⁵

Kamis 19 Jun 2014 12:00 WIB (koran)/ **Tiar Anwar Bachtiar** (Dosen Sejarah Islam pada STAI Persis Garu)

Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan terbesar dalam sejarah wilayah di utara Pulau Sumatra ini. Kerajaan ini mewariskan nama seorang raja legendaris, Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Aceh sampai pada puncak peradaban. Ia dikenal sebagai raja yang adil. Sayang sekali, ia tidak meninggalkan anak laki-laki untuk meneruskan kepemimpinannya, seperti adat kebiasaan para raja di Aceh. Sebetulnya, ia sudah menobatkan anak lelakinya, Meurah Pupok. Tapi, karena ia berzina dengan istri salah seorang perwiranya, Iskandar Muda sendiri yang memutuskan agar anaknya ini dirajam sampai mati sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Jadilah, ia tidak memiliki putra mahkota.

Untuk menjamin kepemimpinan Aceh terus berjalan, ia menunjuk menantunya yang menikah dengan anak perempuannya Safiatuddin untuk meneruskan takhtanya. Menantunya inilah yang kemudian dikenal sebagai Iskandar Sani. Ia sebelumnya dikenal dengan sebutan Sultan Bungsu. Iskandar Sani naik takhta di usia 25 tahun pada 1636. Sayang, usianya tidak panjang. Ia meninggal dalam usia 30 tahun dan meninggalkan istri tanpa anak, Safia tuddin. Aceh menjadi sedikit kacau dengan mangkatnya Iskandar Sani. Dalam situasi seperti itu, para ulama, tokoh, dan pemuka kerajaan saat itu harus mengambil keputusan siapa yang harus menggantikan Iskandar Sani.

Setelah diperbincangkan cukup lama, nama yang paling serius dipertimbangkan adalah istri Iskandar Sani sendiri yang juga anak dari Iskandar Muda, yaitu

²¹⁵<https://republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/01/n7egk510-ijtihad-ulama-untuk-pemimpin-perempuan-pertama-aceh>

Safiatuddin. Selain memiliki kecakapan dari segi agama dan ilmu pengetahuan untuk mengelola negara, ia adalah anak dan istri raja, sehingga akan sangat memahami bagaimana kerajaan dikelola. Akan tetapi, di kalangan ulama sendiri, berbeda pandangan mengenai statusnya sebagai "perempuan". Dalam sebagian pandangan ulama fikih, perempuan dilarang menjadi pemimpin, apalagi pemimpin kerajaan. Nuruddin Ar-Raniry, ulama yang sangat disegani saat itu, untuk mencegah ke mudharatan yang lebih besar dengan tidak adanya calon pemimpin Kerajaan Aceh yang mumpuni dan legitimated secara politik, akhirnya menyimpulkan untuk meng ambil pendapat yang membolehkan pemimpin perempuan. Itu pun, tentu bukan tanpa syarat. Ia harus merupakan sosok yang amanah, adil, dan memiliki keluasan ilmu yang me mung kinkannya duduk sebagai ratu. Semua syarat itu ternyata ada dalam diri Safiatuddin.

Kecakapannya ini memang telah terasah sejak kecil. Dalam usia 7 tahun, ia bersama dengan putra dan putri istana lainnya, termasuk Iskandar Sani yang kemudian menjadi suaminya, telah belajar kepada ulama-ulama besar dan sarjana-sarjana terkenal. Di antara guru-guru Safiatuddin, antara lain, Syekh Hamzah Fansury, Syekh Nurud din Ar-Raniry, Syekh Faqih Zainul Abidin Ibnu Daim Mansur, Syekh Kamaluddin, Syekh Alaidin Ahmad, Syekh Muhyiddin Ali, Syekh Taqiy yudin Hasan, Syekh Saifuddin Abdul kahhar, dan lainnya.

Semangat belajar yang tinggi itu akhirnya membentuk pribadi dan pengetahuan Safiatuddin yang luar biasa. Ia menguasai banyak bahasa asing, antara lain, Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Ia juga menguasai ilmu fikih, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, sastra, dan lainnya. Barangkali, yang boleh dikatakan sebagai salah satu kelemahannya adalah tidak menguasai seluk-beluk militer secara detail. Inilah juga yang menyebabkannya tidak terlalu berhasil dari segi militer dan ekspansi kekuasaan. Akan tetapi, kecintaannya pada ilmu pengetahuan telah mengantarkan prestasi yang cukup baik, yaitu berkembangnya berbagai lembaga pendidikan dan hidupnya ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah Aceh, Sultan yang paling besar dan mengantarkan Aceh sampai puncak kejayaannya adalah ayah Shafiatuddin, Iskandar Muda. Oleh sebab itu, dibandingkan dengan ayahnya, prestasi Shafiatuddin memang masih berada di bawahnya. Secara politik, militer, dan ekonomi, menurun, tetapi kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan sastra membuat Shafiatuddin akhirnya berfokus untuk menghidupkan bidang ini. Tidak mengherankan, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni-budaya pada zamannya sangat pesat dibandingkan dengan zaman sebelum atau sesudahnya.

Universitas Baiturrahman (Jami' Baiturrahman) di Banda Aceh bertambah maju. Demikian juga *dayah-dayah* (pesantren-pesantren) di seluruh daerah wilayah kekuasaan Aceh juga berkembang dengan baik. Perkembangan ini tidak terlepas dari kebijakan Safiatuddin yang sangat mendorong berkembangnya pendidikan. Salah satu contohnya adalah kebijakannya terhadap para ulama yang tidak setuju atas pengangkatannya sebagai ratu. Safiatuddin tidak mengambil sikap represif. Para ulama yang jumlahnya sekitar 300 tersebut dibiarkan untuk pindah dari Banda Aceh untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya, Syekh Abdul Wahhab dibiarkan hijrah ke Tiro dan mendirikan dayah di sana. *Dayah* Syekh Abdul Wahhab ini berkembang sangat pesat menjadi salah satu dayah terbesar di Aceh. Safiatuddin sebagai ratu yang peduli terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak mengganggu perkembangan dayah ini walaupun pendirinya berseberangan dengannya.

Kecintaannya pada ilmu pengetahuan ini pun terlihat dari banyaknya karya para ulama yang lahir pada masanya, baik atas permintaannya atau atas inisiatif dari para ulama sendiri.

Syekh Nuruddin Ar-Raniry, salah satu ulama-pengarang yang sangat produktif pada masa Safiatuddin, pernah menulis kitab *Hidayatul-Iman bi Fadhlil-Manan* dalam bahasa Melayu. Menurut pengakuannya, kitab yang berisi tentang aqidah dan ibadah ini ditulis atas permintaan sang ratu. Pernyataan ini ditulis dalam

mukadimah kitabnya. Selain menulis kitab ini, ia juga menulis lebih kurang 27 kitab lain dalam bahasa Melayu dan Arab. Selain Ar-Raniry, ulama lain yang juga didorong oleh ratu untuk menulis kitab adalah Abdurrauf As-Sinkily yang diminta menulis kitab yang kemudian diberi judul *Mir'atut-Thullab fi tashili Ma'rifatil-Ahkam* selain sembilan kitab lainnya. Ulama lainnya yang juga mengarang kitab atas permintaan Ratu adalah Syekh Daud Ar-Rumy yang menulis Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi. Kitab-kitab itu kemudian oleh ratu dianjurkan agar dibaca masyarakat umum karena isinya diperuntukkan bagi kalangan awam.

Sebagai ratu perempuan pertama, Safiatuddin juga sangat memperhatikan nasib para wanita. Sebagaimana ayah dan kakeknya terdahulu, ia menekankan agar lembaga-lembaga pendidikan dibuka bukan hanya untuk laki-laki, melainkan juga untuk perempuan. Ini berimplikasi pada pembukaan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut ikut ambil bagian dalam berbagai bidang pekerjaan yang memungkinkan mereka melakukannya. Pada masa Safiatuddin, dipertahankan prajurit perempuan pengawal istana yang sudah dibentuk sejak masa ayahnya, Sultan Iskandar Muda. Prajurit pengawal ini diberi nama Dipisi Keumala Cahaya.

Armada Inong Bale (perempuan janda) yang dibentuk pada masa Sultan Riayat Syah juga terus dipertahankan. Bahkan, pada zamannya armada yang dipimpin pertama kali oleh Laksamana Malahayati ini tidak hanya melibatkan janda-janda, melainkan juga perawan yang belum menikah. Pada bidang yang lain, seperti pengajaran, pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan lainnya, banyak perempuan yang ambil bagian.

Situasi yang tidak membedakan gender ini sudah sejak lama hidup di Aceh, sehingga tidak heran bila berabad-abad setelahnya lahir wanita Aceh, seperti Cut Nyak Din yang hidup sezaman dengan Kartini. Oleh sebab itu, nestapa dan nasib perempuan yang tersisih sesungguhnya tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Kalaupun ada, sangat mungkin ini adalah efek dari

kolonialisme yang destruktif terhadap berbagai sendi kehidupan.

Dalam menjalankan kerajaannya, Safiatuddin sebagaimana para pendahulunya tetap berpegang pada *Kanun Meukuta Alam* atau *Kanun Aceh* yang merupakan undang-undang dasar kerajaan Aceh. Undang-undang ini sangat dipengaruhi fikih Islam. Ia pun menjalin komunikasi intensif dengan kerajaankerajaan penting di seluruh dunia, terutama dengan Turki Usmani. Sudah banyak riset yang mengkaji surat-surat Safiatuddin kepada penguasa Usmani yang menunjukkan kecakapan Safiatuddin dalam memimpin Aceh.

Bukan hanya berhubungan dengan Usmani, ia pun harus menghadapi VOC Belanda dan kekuatan-kekuatan luar lain yang mengancam kedaulatan kerajaannya. Semua nya dilalui dengan cukup baik tanpa harus mengorbankan Kerajannya. Al hasil, selama 34 tahun pemerintahannya (1641-1674), Sadiatuddin dapat melalui nya dengan cukup gemilang. Ijtihad Ar-Raniry, Abdurrauf As-Sinkily, dan ulama lainnya ternyata tidak terlalu meleset.

Walaupun banyak ulama yang tidak setuju, demi menghindarkan kemudharatan yang lebih besar, ijtihad yang hati-hati untuk menaikkan Safiatuddin ternyata masih berbuah kebaikan untuk Aceh. *Wallahu A'lam*.

Berita IV: Wanita Menduduki Jabatan Publik, Bolehkah?²¹⁶

Jumat 19 Dec 2014 13:55 WIB (koran)/ rep: hafids muftisany

Wanita termasuk Muslimah kini mendapatkan akses seluas-luasnya dalam berbagai bidang. Diawali dengan terbukanya kesempatan dalam bidang pendidikan, Muslimah kini banyak menduduki posisi strategis. Ada yang menjadi hakim, pimpinan rumah sakit, direktur perusahaan, politisi, bahkan kursi presiden

²¹⁶<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz36-wanita-menduduki-jabatan-publik-bolehkah>

di Indonesia pernah diduduki seorang wanita.

Namun, pembahasan tentang boleh tidaknya seorang wanita berkarier dan menduduki posisi menjadi bahasan klasik. Bolehkah seorang wanita menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki dalam kedudukannya dalam skala kecil seperti direktur atau wali kota?

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Mukhtamar tarjih XVIII di Wiradesa kemudian disempurnakan pada Mukhtamar XVIII di Garut tentang Adabul Mar'ah fil Islam menyatakan agama tidak melarang seorang menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, dan sebagainya (Adabul Mar'ah fil Islam hlm 52).

Mengomentari hadis, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita." Majelis Tarjih tidak melihat dalil-dalil yang merupakan nash bagi pelanggaran wanita menjadi pemimpin.

Beberapa larangan yang dipakai seorang wanita menjadi pemimpin salah satunya adalah surah an-Nisa ayat 34. "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka."

Majelis Tarjih menerangkan dalam tasir ash-Shabuni juz 1 halaman 466 disebutkan asbanun nuzul ayat ini menyangkut hubungan privat laki-laki dan wanita dalam rumah tangga. Ayat ini turun mengenai kasus pembangkangan (nusyuz) istri Sa'ad bin Rabi' sehingga Sa'ad menamparnya dan ia mengadukan hal ini kepada Nabi SAW seraya meminta supaya Sa'ad dihukum qishas. Nabi tidak melakukan hukum ini karena turunnya ayat ini yang berarti Sa'ad bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Sementara dalil hadis di atas menurut Majelis Tarjih harus dipahami semangatnya

tidak menurut arti harfiahnya. Dari data sejarah didapat posisi wanita belum beruntung. Nabi SAW datang guna mengangkat derajat kaum wanita yang diperlakukan tak manusiawi di zaman jahiliyah.

Beberapa abad setelah Nabi SAW pun, pendidikan bagi kaum wanita belum banyak maju. Artinya, larangan itu karena saat itu wanita dinilai belum mampu mengemban tanggung jawab kemasyarakatan. Mereka belum memiliki pengetahuan dan pengalaman. Sementara saat ini banyak wanita yang berpendidikan dan pengetahuan tentang urusan masyarakat. Karena itu, boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan. Seperti firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97. "Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik"

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Ahkamul Fuqoha pernah membahas khusus tentang hukum wanita menjadi kepala desa. Ulama NU melarang seorang wanita dicalonkan menjadi kepala desa kecuali dalam keadaan terpaksa. Seorang wanita juga tidak boleh menjadi hakim. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Namun, Mazhab Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam urusan harta benda. Sementara Imam Thabari berpendapat perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apa pun.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat tidak sah seorang wanita mejadi hakim. Larangan ini merujuk pada hadis yang sama tentang tidak beruntung kaum yang dipimpin wanita. Bahtsul Masail menyebut hadis itu muncul saat masyarakat Persia mengangkat putri kerajaan sebagai raja. Tidak didapati pula mubaligh dari para ulama yang berasal dari wanita. Alasannya wanita dinilai derajatnya belum sempurna. Meskipun beberapa tokoh seperti Maryam bin Imran dan Asiyah istri Fir'aun adalah sosok yang mulia.

Berita V: Kepemimpinan Perempuan²¹⁷

Selasa 22 Sep 2015 20:16 WIB (kolom)/ Red: Nasih Nasrullah

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhtar Sadili Syihabudin

Pengkaji Studi Islam

Kehadiran perempuan dalam podium kekuasaan bukan barang baru. Sejarah mencatat Ratu Bilqis sebagai seorang pemimpin pada masa Nabi Sulaiman. Dikenal sebagai seorang pemimpin cantik, pintar dan berpikiran ke depan. Banyak raja-raja berusaha melamarnya, tapi kandas di tengah jalan. Para raja penasaran campur kagum pada sosok yang terkenal bukan hanya soal elok rupa, tapi piawai memimpin rakyatnya.

Kualitas kemanusiaan seorang ratu yang satu ini dikenalkan Alqur'an sebagai kepemimpinan perempuan. Bahwa memimpin tak mengenal jenis kelamin, asal ada modal kecakapan moral dan intelektual yang cukup. Kepintaran Ratu Bilqis diakui mampu menjadikan pembangunan negerinya. Istana Ratu Bilqis dilukiskan penuh kolam, taman, bangunan dan irigasi air yang bagus.

Ratu Bilqis punya wawasan ke depan, mampu menangkap sinyal kemajuan untuk kesadaran ber-Tuhan yang ditawarkan oleh nabi Sulaiman. Dengan surat ajakan untuk ber-Tuhan yang dibawa oleh burung hud-hud itu, Ratu Bilqis akhirnya bertauhid sekaligus dipersunting oleh nabi sulaiman.

Pada masa jauh setelahnya kita mengenal perdana menteri inggris dengan julukan wanita besi. Margaret Teacher namanya, memimpin Inggris di kala perang dingin berkecamuk antara Blok Timur-Barat. Kedua blok kekuatan dunia berebut pengaruh di setiap konflik di belahan bumi ini. Negara kita sempat masuk dalam pusaran kekuatan itu, meski dengan tetap teguh pada "politik bebas aktif".

²¹⁷<https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/15/09/22/nv2y71320-kepemimpinan-perempuan>

Wanita besi dikenal bisa memutuskan keberpihakan yang tetap proporsional. Meski Inggris masuk dalam Blok Barat bersama negara digdaya Amerika, tapi tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sampai batas tertentu mampu mencegah konflik berkepanjangan, terutama di daerah Timur Tengah yang kerap jadi bulan-bulanan kepentingan memanfaatkan minyak bumi.

Belakangan kita disuguhkan Presiden pertama perempuan negeri ini, Megawari Soekarno Putri. Sosok yang dikenal pendiam ini mampu mengendalikan partai besar; PDIP, untuk waktu yang cukup lama. Setiap ucapan Ibu Mega mampu menenangkan massa banteng kala mengamuk jika ada yang mengusik kepentingannya. Meski menjabat karena berakhirnya kepemimpinan Gus Dur, sejarah mencatat Ibu Mega sebagai presiden sekaligus pimpinan partai yang dihormati tokoh nasional.

Pesan dari semua kisah kepemimpinan perempuan hampir sama. Perpaduan lembut bicara dan cendrung hati-hati dalam memutuskan perkara. Sifat-sifat keibuan yang melekat pada pemimpin perempuan menjadi dominan dalam langkah kepemimpinannya. Perbedaan jelas dari kepemimpinan perempuan memunculkan rasa teduh dan terlindungi bagi rakyatnya.

Alqur'an sendiri menjelaskan kepemimpinan itu milik semua jenis kelamin. Argumen kesetaraan gender lebih disebabkan oleh motivasi kemuliaan di hadapan Yang Kuasa adalah kualitas ketaqwaan, bukan pada jenis kelamin seseorang. Keutamaan karena bertaqwa adalah kunci bagi siapa saja untuk memegang amanah kepemimpinan.

Sejarah yang tercatat dalam Alqur'an seperti Ratu Bilqis, dan yang terlihat dalam waktu selanjutnya di lapangan. Ini semua menyimpan pesan kepemimpinan perempuan tetap bisa jadi rujukan di masa mendatang.

Di negeri ini masih banyak perempuan yang layak memimpin. Sebagaimana tetap

dituntut bagi setiap warga untuk terus mengawasinya. Karena perempuan atau laki-laki punya kecenderungan sama untuk mendekat pada kualitas takwa. Sekaligus mempunyai nafsu untuk terus digoda oleh kilau kekuasaan.

Hanya dengan niat tulus dan gigih memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang bisa menyelamatkan sebuah kepemimpinan, laki-laki maupun perempuan. Kita harus punya ruang apresiasi sama pada semua pola kepemimpinan ini.

Berita VI: Radhiyatuddin, Muslimah yang Bebaskan Mamalik dari Keterpurukan²¹⁸

Jumat 16 Oct 2015 19:02 WIB (khazanah)/ Rep: Sri Handayani/ Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarah Islam tak banyak mencatat perempuan yang berhasil memegang posisi tertinggi di kerajaan. Radhiyatuddin at-Tamsy tercatat sebagai Muslimah ke dua memecah rekor tersebut. Dia memegang tampuk kekuasaan di Daulah Mamalik. Berkat kepiawaiannya, daulah ini berhasil terbebas dari krisis akibat pemerintahan yang buruk.

Radhiyatuddin merupakan putri Sultan at-Tamsy. Ayahnya memimpin Daulah Mamalik secara adil dan bijaksana. Ia piawai dalam urusan manajemen dan administrasi negara. Tak heran, pada masanya, daulah ini dapat mencapai puncak kejayaan.

Selama memimpin kerajaan, at-Tamsy sering kali menyerahkan urusan penting kepada Radhiyatuddin. Melihat jiwa kepemimpinan dalam dirinya, sang ayah pernah terpikir menjadikan dia sebagai pengganti. Sikapnya ini justru menimbulkan rasa tidak suka pada orang-orang di sekitar Radhiyatuddin. Mereka tidak senang at-Tamsy lebih menyayangi Radhiyatuddin daripada anak lelakinya.

²¹⁸<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/nwbas6313/radhiyatuddin-muslimah-yang-bebaskan-mamalik-dari-keterpurukan>

Dalam garis keturunan at-Tamsy terdapat pula nama Ruknuddin Fairuz. Putra kerajaan inilah yang pada akhirnya menggantikan sang ayah setelah wafat tahun 634 H/1236 M. Dari sinilah awal Daulah Mamalik mendekati masa kehancuran. Fairuz seorang pecinta dunia. Ia sibuk bersenang-senang dan melakukan korupsi.

Ia menghamburkan uang negara untuk berfoya-foya. Kesibukannya mengejar dunia membuat Fairuz lupa pada tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemimpin. Fairuz bahkan menyerahkan semua urusan kerajaan kepada ibunya. Namun, sikap ibunya yang diktator justru memperparah keadaan. Daulah Mamalik dilanda krisis kepemimpinan dan hampir jatuh. Ia dilanda berbagai pemberontakan.

Di tengah kondisi kritis, masyarakat mulai menyadari sifat baik yang dimiliki Radhiyatuddin. Tak hanya kejernihan akal, ia juga dikenal sebagai seorang pemberani dan cerdas. Ia seorang penghafal Alquran dan menguasai ilmu fikih.

Sebagian besar pemimpin wilayah akhirnya membaiat putri kesayangan at-Tamsy ini sebagai ratu. Ia memegang pemerintahan Delhi dari 634-637 H/1236- 1239 M. Dikerahkannya segala upaya agar negara yang dipimpin terlepas dari kebangkrutan. Di tengah krisis yang belum dapat sepenuhnya diatasi, ia sering berbenturan dengan para pemimpin besar yang membentuk dewan bernama al-Arba'in.

Para pejabat negara ini tak terima Delhi dipimpin oleh seorang wanita. Mereka pun melakukan pemberontakan. Radhiyatuddin pantang menyerah. Ia berusaha mempengaruhi para anggota dewan dan meyakinkan mereka jika kepemimpinan seorang wanita tak masalah demi kemaslahatan. Ia berpenampilan gagah seperti laki-laki dan dengan tegas menghukum para pembangkang. Ia juga memimpin sendiri pasukan dengan mengendarai gajah.

Berkat kegigihannya, Radhiyatuddin mampu meredakan pemberontakan para anggota dewan. Kondisi keamanan negara perlahan semakin stabil. Perempuan ini banyak belajar dari ayahnya. Ia memimpin Delhi dengan adil dan bijaksana. Ia mulai mengatur urusan manajemen dan administrasi negara dengan baik. Ia dibantu seorang panglima yang hebat, Saifuddin Aibak.

Kondisi ini tak berlangsung lama. Keberadaan pemimpin perempuan masih menjadi polemik bagi raja-raja Daulah Maliki. Mereka menggunakan isu kepemimpinan perempuan yang, menurut kepercayaan mereka, dilarang dalam Islam. "Kalau kalian tidak memiliki seorang pun laki-laki untuk menjadi pemimpin, mintalah kami untuk mengutus seorang," kata seorang khalifah dari Baghdad.

Kebencian para raja kepada Radhiyatuddin makin melangit setelah ia mengangkat Jamaluddin Yaqut, seorang lelaki Prancis, sebagai panglima pasukan berkuda. Para raja memberontak dengan basis kekuatan yang lebih kuat. Radhiyatuddin mencoba menumpas para pemberontak, namun perlawanan makin menjadi dan tak terkendali.

Ia mengalami kekalahan. Masa pemerintahannya berakhir setelah Muslimah ini dibunuh pada 25 Rabiul Awal 637 H/25 Oktober 1239 M. Tumpuk kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya, Sultan Muizud- din.

Berita VII: Akhir Masa Para Sultanah²¹⁹

Senin 03 Apr 2017 13:35 WIB (selarung)/ Red: Fitriyan Zamzami

Oleh **Fitriyan Zamzami**, wartawan *Republika*

REPUBLIKA.CO.ID, Pada 1688 Kesultanan Aceh sudah 48 tahun dipimpin tiga sultanah secara berturut-turut. Saat Sultanah Inayat Syah mangkat tahun itu, suara-suara yang menginginkan kembali berkuasanya pemimpin lelaki kian menguat.

Para tokoh dan ulama di Banda Aceh, begitu Inayat mangkat, telah secara langsung menunjuk Putri Punti, seorang gadis muda hasil didikan istana yang kemudian digelar Sri Ratu Kamalatuddin Inayat Syah.

Masa pemerintahan Sultanah Kamalat penuh dengan intrik dan rongrongan kekuasaan. Pieter Johannes Veth, seorang pengelana Belanda pada masa itu mencatat, ada kelompok di kerajaan yang menolak kepemimpinan seorang ratu.

Kelompok ini mendapat sokongan dari gerakan-gerakan kaum Wujudiyah di daerah-daerah pegunungan. Terlebih, saat itu, satu utusan dari Makkah yang dibiarkan tinggal di Aceh oleh Sultanah Inayat, Syarif Hasyim, juga disebut memiliki ambisi mengambil alih kekuasaan dan mendapat dukungan sejumlah tokoh.

Ambisi itu memunculkan konspirasi yang berupa sebuah surat yang disebut berasal dari Makkah. Isinya, menyatakan bahwa kepemimpinan seorang perempuan melanggar syariat Islam. Hingga saat ini, menurut Veth, surat tersebut tak terbukti otentitasnya.

Bagaimanapun, bukan hanya surat itu saja senjata para penolak Kamalat. Jacob de Roy, seorang Belanda yang berada di Aceh pada saat itu mencatat bahwa pada awal masa pemerintahan Kamalat, sebanyak empat ulebalang dari daerah

²¹⁹<https://republika.co.id/berita/onth0o393/akhir-masa-para-sultanah>

pegunungan Aceh memimpin sekitar 4.000 pasukan guna menggulingkan ratu ke Banda Aceh.

Mereka disebut mengambil posisi tak jauh dari pelabuhan di ujung sungai dekat ibu kota. Menghadapi tantangan tersebut, Kamalat memerintahkan syahbandar saat itu mendirikan tenda yang diisi sejumlah pasukan dan mengarahkan meriam ke arah para pemberontak.

Namun menurut pengelana Inggris William Dampier, kedua pasukan tak sampai menumpahkan darah. Alih-alih, sepanjang malam mereka saling meneriakan argumen dan berdiskusi soal perbedaan pendapat terkait pemerintahan. Pada pagi hari, masing-masing pendukung kembali menjalankan aktifitas seperti biasanya.

Selain alasan gender, Dampier mencatat bahwa yang mereka perdebatkan juga soal pemerintahan di Banda Aceh yang lebih condong memajukan sektor perdagangan lewat jalur laut. Hal tersebut, dinilai para ulebalang melemahkan sektor pertanian di pegunungan dan membuat sektor agrikultur merosot produksinya.

Hal itu berlangsung selama beberapa hari hingga para pemberontak dari pegunungan menyerah dan pulang ke lokasi mereka. Meski begitu, rongrongan terhadap Kamalt tak juga berhenti. Kala itu, beredar juga desas-desus bahwa seorang syahbandar di Aceh hendak menikahkan Kamalt dengan putranya dan kemudian merebut kekuasaan.

Kamalat berhasil bertahan dari rongrongan tersebut. Ia juga melanjutkan kebijakan tegas pendahulunya terhadap VOC. Namun pada 1695, kejadian tragis terjadi. Ulama utama kerajaan, Syekh Abdurrauf Singkil mangkat di usia seratus tahun lebih.

Abdurrauf Singkil, bersama rekannya Syekh Ar-Raniry yang telah berpulang sebelumnya adalah ulama utama pendukung kepemimpinan perempuan di Aceh.

Selepas kematiannya, tak ada lagi ulama dengan kaliber serupa yang bisa menegaskan kekuasaan sultanah.

Selepas itu, legitimasi atas kekuasaan Kamalat kian lemah. Surat dari Makkah soal boleh tidaknya perempuan memimpin kembali ramai jadi pembicaraan dan akhirnya dirundingkan di Balai Majelis Mahkamah Rakyat pada 1699. Keputusan pun diambil, dan Kamalat akhirnya di makzulkan.

Syarif Hasyim kemudian naik tampuk, dan di luar dugaan, justru menjalankan kebijakan-kebijakan yang kembali mendapat penolakan para tokoh dan uleebalang. Sejarahwan Hoesein Djajaninggrat menuliskan pada 1911 bahwa saat itu sejumlah tokoh di Aceh sempat memohon Ratu Kamalat yang telah diasingkan ke Pidie agar bersedia kembali menjabat.

Permintaan tersebut tak pernah terwujud hingga periode singkat kekuasaan Syarif Hasyim berakhir pada 1707. Sejak itu, kejayaan Aceh terus memudar, dan tak ada lagi sultanah yang memimpin Kesultanan Aceh sampai akhirnya takluk pada Belanda di 1903.

Berita VIII: Ini Alasan 13 Ormas Islam Jabar Tolak Calon Perempuan di Pilkada²²⁰

Selasa 30 May 2017 06:58 WIB (berita nasional)/ Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJ) menolak kandidat Calon Gubernur Jabar 2018 perempuan yang diusung oleh partai politik karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

²²⁰<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/05/30/oqqitw330-ini-alasan-13-ormas-islam-jabar-tolak-calon-perempuan-di-pilkada>

"Atas dasar pandangan para ulama serta berbagai kajian secara mendalam di antara ormas-ormas Islam maka kami tidak sepakat dan secara tegas menolak kepemimpinan perempuan dalam prosesi Pilgub Jabar 2018," kata Ketua Presidium AMPJ HM Roinul Balad, di Bandung, Senin (29/5).

Penolakan terhadap kandidat Cagub Jabar 2018 tersebut, kata Roinul, ditujukan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berdasarkan hasil Pemira DPW PKS Jawa Barat yang memunculkan nama Netty Prasetiyani Heryawan sebagai kandidat calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

"Untuk itu, kami mohon kepada pimpinan PKS baik di Jabar atau pusat untuk mempertimbangkan kembali pengusungan kepemimpinan perempuan di Pilgub Jabar," kata dia.

Menurut dia, AMPJ yang terdiri dari 13 ormas Islam ini menolak pengusungan Netty Heryawan sebagai Cagub Jabar 2018 karena masih banyak kaum pria yang lebih sanggup memimpin 45 juta warga Jawa Barat. "Ibaratnya memang apa enggak punya kader laki-laki?" kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Provinsi Jawa Barat memiliki banyak tantangan dan permasalahan sehingga memerlukan pemimpin laki-laki yang dianggap lebih baik dibanding perempuan. "Dan secara naluri laki-laki lebih bisa, apalagi problematika di Jawa Barat ini lebih berat dibanding yang lain, termasuk DKI Jakarta," ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya juga memahami di era demokrasi ini siapa pun memiliki hak politik yang sama. "Hal ini alam demokrasi. Negara memang tidak melarang. Tapi siapa pun juga boleh kan menyampaikan aspirasi," kata dia.

Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak Wilayah Jawa Barat 2018 Ridho Budiman Utama, menyatakan wajar jika ada penolakan terhadap hasil Pemira DPW PKS yang mengusung calon perempuan sebagai kandidat Cagub Jabar.

"Kalau saya menganggap wajar siapa pun yang ingin menang dalam kontestasi politik, termasuk jika ada serangan politik, kampanye hitam, termasuk serangan ke Kang Aher (Ahmad Heryawan) juga ada," kata dia.

Berita IX: Para Perempuan Penguasa ‘Warisan’ Keluarga²²¹

Senin 28 Aug 2017 06:00 WIB (kolom)/ Red: Maman Sudiaman

Oleh : **Ikhwanul Kiram Mashuri**

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam waktu dekat Maryam Safdar diperkirakan segera menempati posisi penting di partai penguasa Pakistan, The Pakistan Muslim League versi Nawaz (PML-N). Jabatan perdana menteri (PM) pun hanya soal waktu. Maryam adalah putri mantan PM Pakistan Nawaz Sharif. Sebulan lalu (28/07) Mahkamah Agung Pakistan memakzulkan Sharif sebagai anggota parlemen dan sekaligus PM Pakistan, terkait serangkaian dugaan korupsi.

Media Newsweek Pakistan edisi Maret 2012 menggambarkan Maryam sebagai pewaris Nawaz Sharif dan pemimpin masa depan PML-N dan sekaligus Pakistan. Maryam selama ini sudah dikader oleh sang bapak. Dia dipandang sebagai pewaris politik ayahnya. Laporan media setempat mengatakan, perempuan kelahiran 28 Oktober 1973 ini akan mengikuti pemilihan sela di daerah pemilihan yang ditinggalkan sang ayah.

Bila Maryam nanti berhasil menapaki karir politik menggantikan ayahnya, sesungguhnya ia bukan perempuan pertama di Pakistan yang mewarisi kekuasaan dari sang bapak. Atau tepatnya memanfaatkan pengaruh dan nama besar ayah mereka. Sebelumnya, ada Benazir Bhutto, PM Pakistan pada 1988 dan 1993.

Benazir adalah putri sulung dari politikus Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto (1928-

²²¹<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/08/27/ovbumj319-para-perempuan-penguasa-warisan-keluarga>

1979). Zulfikar pernah menjadi Presiden (1971-1973) dan PM Pakistan (1973-1977). Ia lalu digulingkan oleh sebuah kudeta militer dan dihukum gantung pada 1979, atas tuduhan membunuh lawan politiknya. Nasib buruk ternyata juga menyertai Benazir. Pada 2007, ia ditembak mati oleh seseorang yang kemudian meledakkan diri dalam sebuah bom bunuh diri.

Kini, dinasti politik keluarga besar Bhutto tampaknya akan diteruskan oleh Bakhtawar Bhutto Zardari, putri sulung Benazir Bhutto dan suaminya Asif Ali Zardari. Perempuan 27 tahun ini sudah mulai dengan berbagai kegiatan filantropi di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pada 2010, ia mendirikan sebuah lembaga kemanusiaan 'Save the Flood and Disaster Victims Organization'.

Perempuan 'mewarisi' kekuasaan dari keluarganya — baik dari ayah maupun suami — tentu bukan monopoli Pakistan. Bahkan kekuasaan dinasti atau keluarga di sejumlah negara Asia sudah mentradisi. Dan, dari warisan kekuasaan dinasti itu ada sepuluh perempuan yang akhirnya mencapai puncak. Mereka bisa anak perempuan, isteri, atau janda sang tokoh. Di antara mereka ada yang harus memimpin gerakan oposisi demokratis sebelum berhasil meraih kekuasaan. Ada yang kemudian menjadi PM atau presiden di negara-negara yang bahkan berpenduduk mayoritas Muslim. Termasuk di Pakistan yang bernama resmi Republik Islam Pakistan.

Bahkan di Sri Lanka, Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike (1916-2000) merupakan perempuan pertama di dunia yang menjabat sebagai PM dalam sejarah modern. Ia diangkat menjadi PM pada 1960 setelah setahun sebelumnya suaminya, Solomon Bandarnike, mati terbunuh.

Pada 1994, putri mereka, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, terpilih sebagai PM. Pada tahun yang sama, perempuan kelahiran 1945 itu memenangkan Pemilu Presiden. Dan, untuk jabatan PM, ia menunjuk ibunya sendiri, Sirimavo Bandaranaike.

Setelah Sirimavo Bandaranaike menjadi PM pertama di dunia dalam sejarah modern, di India Indira Gandhi pada 1966 terpilih sebagai PM hingga 1977. Lalu ia terpilih kembali menjadi PM dari 1966 hingga 1977, dan berlanjut pada 1980 sampai ia terbunuh pada 1984. Indira adalah putri PM pertama India, Jawaharlal Nehru.

Selain Pakistan, Sri Lanka, dan India, masih ada sejumlah perempuan di beberapa negara Asia yang meraih kekuasaan berkat nama besar keluarganya. Antara lain di Bangladesh, Filipina, Myanmar, Korea Selatan, dan juga Indonesia.

Corazon Aquino yang terpilih menjadi Presiden Filipina setelah suaminya Benigno Aquino terbunuh menyatakan, ia bisa menjadi presiden karena suaminya. Sang suami, Benigno Aquino, adalah tokoh oposisi utama pada era Presiden Ferdinand Marcos. ‘‘Saya tahu batasan saya. Saya tidak suka politik. Saya terlibat dalam permainan politik karena suami saya,’’ katanya pada suatu waktu.

Pengalaman hampir sama juga milik Sonia Gandhi. Ia tercebur dalam pusaran politik lantaran suaminya mati terbunuh. Perempuan kelahiran Italia ini menikah dengan putra Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Rajiv dibunuh oleh pemberontak Macan Tamil ketika menjadi PM India. Sepeninggal Rajiv, Sonia pun ‘mewarisi’ kepemimpinan partai yang ditinggalkan suaminya.

Di Bangladesh, Khaleda Zia terpaksa terjun dalam arus politik setelah suaminya, Ziaur Rahman, terbunuh. Suaminya merupakan pemimpin militer dan Presiden Bangladesh. Sepeninggal suaminya, ia pun ‘mewarisi’ Partai Nasional Bangladesh. Setelah memenangkan pemilu Khaleda pun menjabat sebagai PM Bangladesh dari tahun 1991 sampai 1996 dan dari tahun 2001 hingga 2006.

Perempuan kedua di Bangladesh yang ‘mewarisi’ kekuasaan dari keluarganya adalah Hasina Wazed. Ia merupakan PM Bangladesh dari 1996 hingga 2001 dan

dari 2009 sampai sekarang. Hasina merupakan putri sulung Mujibur Rahman, presiden pertama Bangladesh. Saat ayah dan keluarganya dibunuh dalam sebuah kudeta pada 1975, ia selamat. Hasina pun mengasingkan diri di luar negeri. Setelah kembali ke Bangladesh pada 1981, ia pun masuk ke gelanggang politik.

Di Myanmar, ada Aung San Suu Kyi yang merupakan tokoh perempuan pemimpin gerakan prodemokrasi di negaranya. Bertahun-tahun ia dipaksa menjadi tahanan rumah oleh penguasa militer. Setelah dibebaskan ia pun memimpin National League for Democracy yang kemudian memenangkan pemilu. Perempuan 72 tahun itu kini menjadi State Counsellor atau penasihat negara.

Kharisma dan jiwa kepemimpinan Suu Kyi tampaknya diwarisi dari ayahnya, Aung San, seorang revolusioner nasionalis, jenderal, dan tokoh kemerdekaan Burma. Aung San dibunuh oleh lawan politiknya enam bulan sebelum Burma — kini Myanmar — merdeka.

Sedangkan di Korea Selatan ada Park Geun-hye, perempuan pertama yang jadi Presiden Korea Selatan sejak 25 Februari 2013. Pada 10 Maret 2017, ia dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Park Geun-hye merupakan putri Park Chung-hee, pemimpin Korsel pada 1961 hingga dibunuh pada 1979.

Para perempuan yang ‘mewarisi’ kekuasaan dari keluarganya — entah itu dari ayah ataupun suami —, tentu sah-sah saja. Apalagi hampir semua mereka meraih singgasana kekuasaan dalam sistem yang demokratis. Artinya, mereka pun harus berkeringat, berdarah-darah, dan tentu saja punya jiwa kepemimpinan. Kendati pun harus diakui mereka bisa berhasil meraih kekuasaan lantaran pengaruh dan nama keluarga besar.

Menurut laporan German Science Foundation dengan tema ‘Keluarga Penguasa dan Kepemimpinan Perempuan di Asia’, para perempuan dalam dinasti kekuasaan keluarga lebih diuntungkan daripada laki-laki. Apalagi bila sang kepala keluarga

terbunuh atau dijadikan ‘pesakitan’ ketika sedang berkuasa. Dalam kondisi seperti ini, rasa kasihan dan kemarahan bercampur dengan kharisma sang tokoh akan segera pindah ke anak perempuan atau janda sang tokoh. Atau dengan kata lain, mereka akan segera mendapat simpati rakyat.

Yang jadi pertanyaan, apakah kemunculan para perempuan yang mewarisi kekuasaan dari ayah, suami, atau keluarga besarnya akan memberi dampak positif kepada kehidupan kaumnya? Jawabannya ternyata tidak. Kemunculan para perempuan di panggung kekuasaan ternyata tidak memberi pengaruh berarti bagi hak-hak politik dan kehidupan sosial ekonomi bagi kaum perempuan.

Berita X: UNISA Selenggarakan Seminar Kepemimpinan Perempuan²²²

Selasa 19 Sep 2017 08:30 WIB (berita pendidikan)/ Rep: Neni Ridarineni/ Red: Winda Destiana Putri

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- UNISA (Universitas Aisyiyah)

Yogyakarta menyelenggarakan seminar nasional kepemimpinan perempuan hari ini Selasa (19/9). Kegiatan ini merupakan upaya untuk memetakan strategi untuk mendorong pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia dan meningkatkan kesadaran tentang kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan visi Indonesia berkemajuan.

Dikatakan oleh Rektor UNISA, Warsiti, perempuan Indonesia memiliki peran yang besar dari pra kemerdekaan hingga masa kini. Dalam kehidupan sosial dan profesional, perempuan juga telah berperan secara aktif, meskipun tingkat penghargaan kepada perempuan harus diakui membutuhkan perjuangan dan mengalami masa pasang-surut.

²²²<https://republika.co.id/berita/owi6v5359/unisa-selenggarakan-seminar-kepemimpinan-perempuan>

"Konsep Indonesia Berkemajuan tidak bisa lepas dari peran perempuan di dalamnya. Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul. Berkemajuan merupakan keharusan demi terwujudnya tatanan kebangsaan yang merdeka, adil, makmur, damai, berkemanusiaan, bermartabat dan berdaulat," tuturnya.

Gerakan inilah, kata Warsiti menambahkan, yang menginspirasi para perempuan untuk menjadi pemimpin di lingkungan apapun dalam berbagai tingkatan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang besar. Di sisi lain, gerakan ini memberi semangat dan solusi kepada organisasi untuk memperoleh manfaat dari potensi perempuan secara optimal.

"Harapannya, seminar nasional ini mampu menginspirasi perempuan dalam melakukan gerakan Indonesia berkemajuan di berbagai bidang," ungkap Warsiti. Adapun sebagai narasumber dalam seminar adalah Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI), Abdul Munir Mul Khan (Guru Besar UMS), Hetifah Sjaifudian (Anggota Komisi II DPR RI) dan Nurhayati Subakat (Pemilik Wardah Cosmetics) serta sebagai pembicara kunci Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Noordjanah Djohantini.

Berita XI: Ratu Ini Pemimpin Pasai Secara Bijak, Siapa Dia?²²³

Sabtu 06 Jan 2018 01:33 WIB (khazanah)/ Rep: Rahmat Fajar/ Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, Aceh tak kekurangan pejuang-pejuang perempuan. Sedikitnya, terdapat sepuluh tokoh perempuan Aceh yang dikenal luas di

²²³<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/p22vjt396/ratu-ini-pemimpin-pasai-secara-bijak-siapa-dia>

Indonesia, bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Ratu Nahrasiyah adalah salah satu perempuan Aceh yang juga banyak berkontribusi di Aceh. Namanya harum bersanding dengan tokoh perempuan Aceh lainnya, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Sultanah Safiatuddin Syah, Ratu Inayat Zakiatuddin Syah, dan Nurul Alam Naqiatuddin Syah.

Kendati demikian, namanya seolah tak terdengar karena tertutup oleh dua raja terkenal Kerajaan Samudra Pasai, yakni Raja Malikussaleh dan Malikudzahir. Padahal, Ratu Nahrasiyah lebih dari 20 tahun berkuasa.

Nahrasiyah merupakan seorang ratu dari Kerajaan Samudra Pasai yang berkuasa dari 1405-1428 M. Ia anak dari Sultan Zainal Abidin Malikudzahir. Namun, ada versi lain tentang Nahrasiyah yang menyebutkan bahwa ia adalah janda dari Sultan Zainal Abidin.

Prof T Ibrahim Alfian pernah menulis bahwa Nahrasiyah dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama berada di tampuk kepemimpinan, ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Saat itu, harkat dan martabat perempuan begitu mulia.

Waktu itu banyak perempuan yang menjadi penyiur agama. Ibrahim mengatakan terkait sosok Nahrasiyah, jejak sejarahnya bisa dilihat dari nisannya. Keterangan tentangnya juga terdapat pada sejarah Cina, yakni kronik *Ying-yai sheng-lan*.

Buku tersebut berisi laporan umum mengenai pantai-pantai Sumatra waktu itu serta menyebutkan raja-raja yang berkuasa. Ma Huan seorang pelawat Cina Muslim dalam pengantar kronik Cina tersebut disebutkan bahwa dia dikirim bersama Laksamana Cheng Ho ke berbagai negeri karena mampu menerjemahkan buku-buku asing.

Pada 1415 Cheng Ho dan armadanya mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai. Dalam kronik dinasti Ming (1368-1643) buku 32 diceritakan, Sekandar (Iskandar) keponakan suami kedua Ratu bersama ribuan pengikutnya menyerang dan merampok Cheng Ho. Tapi, serdadu-serdadu Cina berhasil mengalahkan penyerang tersebut hingga kemudian Sekandar ditangkap dan dibawa sebagai tawanan Istana Maharaja Cina. Di sana, Sekandar dijatuhi hukuman mati.

Menurut Ibrahim, Ratu yang dimaksud dalam cerita Cina tersebut adalah Ratu Nahrasiyah, putri Sultan Zainal Abidin atau dalam literatur Cina sebagai *Tsai-nu-li-a-pi-ting-ki*. Orientalis Belanda C Snouck Hurgronje terkagum-kagum menyaksikan sebuah makam yang indah di situs purbakala Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara.

Makam yang terbuat dari pualam tersebut disebut-sebut sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Ayat-ayat Alquran menghiasai makam dari Ratu Nahrasiyah. Keistimewaan makam tersebut dinilai sebagai bukti kebesaran dari sosok Ratu Nahrasiyah.

Minimnya data sejarah tentang Ratu Nahrasiyah membuat biografi dirinya susah ditemukan secara detil. Karena itu, sedikit sekali literatur-literatur yang bisa menjadi bahan bacaan. Namanya bahkan tak tertera dalam mata uang emas pada zaman Kerajaan Samudra Pasai.

Padahal, waktu itu, nama sultan di mata uang emas merupakan kebiasaan untuk mengabadikan. Saat itu, mata uang tersebut disebut dirham. Ibrahim berpendapat tidak tercantumnya nama Ratu Nahrasiyah di dalam mata uang emas tersebut karena ia menikah dengan suami keduanya, yakni Salahuddin setelah suami pertamanya wafat.

Nama Salahuddin yang tertera dalam mata uang tersebut dengan gelar Sulthan al Adillah. Namanya diterakan di mata uang emas bagian belakang. Namun, dari

makamnya yang indah dan megah, Ibrahim dan beberapa sejawarawan lainnya mengatakan bahwa Ratu Nahrasiyah adalah sosok besar.

Ukiran-ukiran bahasa Arab di makamnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Ibrahim katakan, bermakna, “Inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci Ratu yang terhormat almarhumah yang diampunkan dosanya Nahrasiyah ... putri Sultanah Zainal Abidin putra Sulthan Ahmad putra Sulthan Muhammad Putra Sulthan Al Malikul Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampuni dosanya meninggal dunia dengan rahmat Allah pada Senin, 17 Dzulhijah 832. ed: a syalaby ichsan

